

Dr. M. Wahyuddin Abdullah, S.E., M. Si., Akt

Akuntansi Keuangan **ADAPTASI IFRS** Jilid 1



Dr. M. Wahyuddin Abdullah, S.E., M. Si., Akt

AKUNTANSI KEUANGAN ADAPTASI IFRS JILID 1



ALAUDDIN UNIVERSITY PRESS

AKUNTANSI KEUANGAN ADAPTASI IFRS

Jilid 1

Dr. M. Wahyuddin Abdullah, S.E., M.Si., Akt



Alauddin University Press

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

All Rights Reserved

AKUNTANSI KEUANGAN ADAPTASI IERS

Penulis:

Dr. M. Wahyuddin Abdullah, S.E., M.Si., Akt

Editor

Rika Dwi Ayu

Cetakan: I 2013

XVI + 241 halaman, 14 cm x 21 cm

ISBN : 978-602-237-682-8

Alauddin University Press

Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36 Samata - Gowa

SAMBUTAN REKTOR

Perubahan tidak selamanya membawa perbaikan. Akan tetapi, setiap perbaikan pasti memerlukan perubahan. Demikian ungkapan bijak Sang Motivator Mario Teguh dalam Mario Teguh's Quotes.

Perubahan dan perbaikan merupakan dua frase yang menjadi *core values* bagi siapa saja yang ingin mendapatkan hasil terbaik. Itulah sebabnya Nabi Muhammad saw. menyatakan "Siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia rugi/tertipu".

Perubahan merupakan sebuah keniscayaan dalam siklus kehidupan. Manusia yang tidak mau berubah mengikuti perkembangan arus zaman, akan digilas oleh roda perubahan yang terus menggelinding mengitari perputaran waktu.

Semangat perubahan yang digagas oleh Rektor dilandasi oleh visi dan misi mulia untuk menjadikan UIN Alauddin sebagai kampus peradaban melalui transformasi ipteks dan pengembangan *capacity building*. UIN Alauddin ingin membuktikan dirinya sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi yang tidak saja menggali doktrin-doktrin agama yang normatif tetapi berusaha menarik wilayah dogmatis itu ke dalam ranah praktis aktual, membumi dan dapat dirasakan manfaatnya untuk kepentingan masyarakat.

Rektor sangat menyadari bahwa di era postmodernisme ini, masyarakat mulai kritis mempertanyakan jaminan bagi *output* lembaga pendidikan tinggi. Perkembangan zaman yang semakin maju memicu dan memacu lahirnya semangat kompetitif di tengah masyarakat, tidak terkecuali dunia perguruan tinggi.

Lembaga pendidikan yang tidak sanggup menghadapi perubahan dan persaingan, perlahan namun pasti akan ditinggalkan masyarakat. Saya hanya khawatir jika lembaga pendidikan Islam tidak berubah dan tidak mampu membac arah perubahan, maka ia hanya akan menjadi lembaga pendidikan kelas dua di tengah masyarakat yang mayoritas muslim atau menjadi lembaga alternatif terakhir bagi mereka yang menemui jalan buntu masuk ke perguruan tinggi pilihan utama.

Atas dasar itu, Rektor berupaya melakukan sejumlah terobosan dan strategi untuk memperkuat jalidiri almamater melalui sejumlah gerakan perubahan, baik perubahan mental (dari analog ke mental digital) maupun perubahan fisik.

Iladimnya buku dari program GSB pada tahun ketiga kali ini merupakan realisasi dari visi-misi Rektor, sekaligus respon atas fenomena perkembangan masyarakat saat ini. Oleh karena itu, saya sangat berharap bahwa kesadaran akan pentingnya perubahan dan perbaikan ini tidak saja dipandang sebagai sebuah doktrin institusional, tetapi sebagai sebuah ladang amal saleh sebagai implikasi dari pengamalan firman Allah dan sunnah Rasulullah saw.

Akhirnya, saya mengucapkan selamat atas terbitnya buku GSB kali ini, semoga program ini menjadi pioner dan *Institutional branding* bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun penguatan *inner capacity* bagi civitas akademika UIN Alauddin.

Samata, November 2013
Rektor

Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT, MS.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allāh Rabbul Alamin atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau yang setia. Buku yang berjudul 'Akuntansi Keuangan Adaptasi IFRS Jilid 1' merupakan respon atas perubahan tata cara pelaporan keuangan dari PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP (*generally accepted accounting principles*) Indonesia ke IFRS (*International Financial Reporting Standards*) versi IASB (*International Accounting Standard Board*).

Penyajian laporan keuangan berbasis IFRS di Indonesia mengalami konvergensi yang drastis sepanjang tahun 2009-2012. Konvergensi tersebut berdampak luas pada pemenuhan kompetensi wajib baru bagi akuntan publik, akuntan manajemen, penilai, akuntan pendidik, dan profesi akuntansi lainnya. Selain itu, bagi mahasiswa jurusan akuntansi untuk menuju kompetensi wajib baru tersebut dan bersaing secara global, maka perlu memahami berbagai refrensi penyajian laporan keuangan, salah satunya buku ini Akuntansi Keuangan Adaptasi IFRS.

Keberadaan buku ini juga dilandasi kebutuhan entitas bisnis yang *listing* di bursa efek yang wajib menyajikan laporan keuangan berdasarkan IFRS berlaku per 1 Januari 2013 tahun ini. Komitmen manajemen entitas bisnis di Indonesia mengadopsi IFRS merupakan syarat mutlak meningkatkan daya saing mereka di masa datang. Buku ini

menunjang pencapaian manfaat konvergensi IFRS, diantaranya: memudahkan pemahaman laporan keuangan (*enhance comparability*), meningkatkan arus investasi global melalui transparansi, menurunkan biaya modal dengan membuka peluang *fund raising*, menciptakan efisiensi penyusunan laporan keuangan, dan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Buku ini jauh dari kesempurnaan dan masih membutuhkan pembahasan lanjutan pada jilid-jilid berikutnya. Niatlah yang mengantarkan dan mendorong semangat penulis merangkai kata demi kata menjadi lembaran buku. Kritik konstruktif dari pembaca buku ini senantiasa kami nantikan untuk penyempurnaan selanjutnya. Ucapan terima kasih kepada Bapak Rektor UIN Alauddin, Prof. Dr. H.A. Qadir Gassing HT., M.S. atas amanah yang diberikan untuk menulis buku ini dalam program Gerakan Seribu Buku (GSB). Semoga buku ini memberikan manfaat. *Amin, ya Rabbul Alamin.*

Makassar, Oktober 2013
Penulis,

M. Wahyuddin Abdullah

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMBUTAN REKTOR	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR ILUSTRASI	xv
BAB	
1. RERANGKA KONSEPTUAL	1
Pengertian Rerangka Konseptual	1
Rerangka Konseptual PSAK	2
Tujuan Laporan Keuangan	5
Asumsi Dasar	10
Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan	15
Kendala Informasi yang Relevan dan Andal	18
Pertanyaan	20
Latihan	21
2. PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN	23
Pengertian Laporan Keuangan	23
Unsur-unsur Laporan Keuangan	24
Pengukuran Akun-akun Laporan Keuangan	28
Konsep Modal dan Pemeliharaan Modal	31
Format Laporan Keuangan	32
Pertanyaan	42
Latihan	43
3. AKUN KAS	45
Pengertian dan Komposisi Kas	45

	Pengendalian Kas	48
	Kas Kecil	49
	Rekonsiliasi Bank	60
	Pertanyaan	65
	Latihan	66
4.	AKUN PIUTANG	69
	Pengertian dan Jenis-jenis Piutang	69
	Pengakuan Piutang	71
	Wesel Tagih	80
	Penilaian Piutang	84
	Penurunan Nilai Piutang	90
	Pertanyaan	98
	Latihan	98
5.	AKUN PERSEDIAAN	101
	Pengertian Persediaan	101
	Pengukuran Persediaan	103
	Penurunan Nilai Persediaan	112
	Metode Lain Estimasi Persediaan	115
	Pertanyaan	118
	Latihan	119
6.	AKUN INVESTASI JANGKA PENDEK	121
	Pengertian dan Klasifikasi Investasi	121
	Penilaian dan Penyajian	122
	Sekuritas yang Diperdagangkan	124
	Penurunan Nilai	129
	Pertanyaan	131
	Latihan	132
7.	AKUN ASET TETAP	135
	Pengertian dan Kriteria Aset Tetap	135
	Pengakuan dan Pengukuran Awal	137
	Pengukuran Setelah Pengakuan Awal	150
	Perlakuan Saldo Revaluasi	158

	Pertanyaan	161
	Latihan	161
8.	PENYUSUTAN DAN PENURUNAN NILAI	165
	Pengertian dan Alokasi Penyusutan	165
	Metode-metode Penyusutan	168
	Penurunan Nilai	178
	Pengukuran Penurunan Nilai	181
	Penurunan Nilai Unit Penghasil Kas	185
	Pemulihan Rugi Penurunan Nilai	190
	Pertanyaan	192
	Latihan	193
9.	AKUN ASET TIDAK BERWUJUD	195
	Pengertian Aset Tidak Berwujud	195
	Pengukuran Biaya Perolehan Awal	197
	Amortisasi, Umur Manfaat, dan Nilai Sisa	203
	Pengukuran Setelah Perolehan	207
	Penurunan Nilai	209
	Penghentian Pengakuan	212
	Pertanyaan	213
	Latihan	214
10.	AKUN LIABILITAS LANCAR	217
	Pengertian Liabilitas Lancar	218
	Liabilitas yang Jumlahnya Pasti	224
	Liabilitas Lancar yang Harus Diestimasi	233
	Liabilitas Kontijensi	235
	Pertanyaan	236
	Latihan	239
	DAFTAR PUSTAKA	239
	RIWAYAT HIDUP PENULIS	241

DAFTAR TABEL

	Nama Tabel	Halaman
Tabel 4.1	Nilai Pinjaman	73
Tabel 4.2	Nilai Pinjaman Biaya Transaksi	74
Tabel 4.3	Angsuran dan Pembayaran Bunga	79
Tabel 4.4	Amortisasi Pinjaman	79
Tabel 4.5	Jangka Waktu Wesel	81
Tabel 4.6	Amortisasi Diskon	83
Tabel 4.7	Analisis Umur Piutang	88
Tabel 4.8	Taksiran Kerugian Piutang	89
Tabel 4.9	Penurunan Nilai Piutang	92
Tabel 4.10	Pembayaran dan Angsuran Bunga	93
Tabel 4.11	Penurunan Piutang Tidak Terjadi	94
Tabel 5.1	Sistem Periodik Versus Sistem Prepetual	104
Tabel 5.2	Transaksi Persediaan	107
Tabel 5.3	MPKP Sistem Perpetual	110
Tabel 5.4	Metode Rata-rata Sistem Periodik	111
Tabel 5.5	Metode Rata-rata Tertimbang Sistem Prepetual	112
Tabel 5.6	<i>Lower of Cost or Net Realizable Value</i>	114
Tabel 5.7	Metode Ritel	116
Tabel 7.1	Distribusi Biaya Pinjaman	143
Tabel 7.2	Alokasi Pengeluaran Spesifik	143
Tabel 7.3	Nilai Wajar Pertukaran Aset	149
Tabel 7.4	Perubahan Model Revaluasi	160
Tabel 8.1	Metode Penyusutan Garis Lurus	170
Tabel 8.2	Metode Penyusutan Saldo Menurun	172
Tabel 8.3	Metode Penyusutan Jumlah Angka Tahun	175
Tabel 8.4	Metode Penyusutan Unit Produksi	176
Tabel 8.5	Alokasi Kerugian Penurunan Nilai	188

Tabel 10.1	Estimasi Biaya Kerusakan	229
Tabel 10.2	Pembandingan Provisi dengan Liabilitas Kontingensi	234

DAFTAR GAMBAR

	Nama Gambar	Halaman
Gambar 1.1	Rerangka Konseptual	4
Gambar 2.1	Hirarki Nilai Wajar	30
Gambar 7.1	Model Pengukuran Aset Tetap	151
Gambar 8.1	Rerangka Penurunan Nilai Aset	178
Gambar 8.2	Pengujian Penurunan Nilai	182
Gambar 10.1	Proses pengakuan provisi dan pengungkapan liabilitas kontingensi	227

DAFTAR ILUSTRASI

	Nama Ilustrasi	Halaman
Ilustrasi 2.1	Laporan Posisi Keuangan, Lampiran 1, Halaman 1	34
Ilustrasi 2.2	Laporan Posisi Keuangan, Lampiran 1, Halaman 2	35
Ilustrasi 2.3	Laporan Posisi Keuangan, Lampiran 1, Halaman 3	36
Ilustrasi 2.4	Laporan Pendapatan Komprehensif, Lampiran 2, Halaman 1	37
Ilustrasi 2.5	Laporan Pendapatan Komprehensif, Lampiran 2, Halaman 2	38
Ilustrasi 2.6	Laporan Perubahan ekuitas, Lampiran 3	39
Ilustrasi 2.7	Laporan Arus Kas, Lampiran 4	40
Ilustrasi 3.1	Kas Kecil	57
Ilustrasi 3.2	Rekonsiliasi Bank	64
Ilustrasi 5.1	Sistem Persediaan Periodik	105
Ilustrasi 5.2	Sistem Persediaan Perpetual	106

Pengertian Rerangka Konseptual

Rerangka konseptual (*conceptual framework*) akuntansi dapat dianalogikan sebagai konstitusi atau Undang-Undang Dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara. Konstitusi suatu negara merupakan acuan pokok penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam akuntansi, rerangka konseptual atau biasa diistilahkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan merupakan konsep-konsep acuan dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk kepentingan umum. Rerangka konseptual tersebut berfungsi sebagai acuan evaluasi praktik akuntansi yang berjalan, pengarah pengembangan praktik dan prosedur akuntansi baru, dan pedoman pemecahan masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar yang berlaku umum.

Rerangka konseptual bersumber atau dituangkan dari penalaran logis (*logical reasoning*) yang berisi asumsi, dasar pikiran, konsep, dan argumen-argumen akuntansi yang saling berkaitan logis. Rerangka konseptual merupakan dokumen resmi, yang disebut pula sebagai seperangkat prinsip umum (*a set of broad principles*), seperangkat doktrin (*a body of doctrine*), atau struktur konsep-konsep yang terpadu atau saling berkaitan (*a structure or scheme of interrelated ideas*). Rerangka konseptual akuntansi adalah konstitusinya praktisi akuntansi. Tanpa rerangka konseptual, standar akuntansi akan subjektif sesuai selera penyusunnya.

Penalaran logis digunakan untuk menjawab mengapa praktik akuntansi yang sekarang berjalan bentuknya seperti itu, bukan seperti bentuk lainnya.

Penalaran logis digunakan untuk mengevaluasi dan membenarkan praktik akuntansi yang sekarang berjalan agar sesuai dengan tujuan pelaporan yang diatur dalam rerangka konseptual. Penalaran logis juga digunakan untuk memengaruhi dan mengembangkan praktik akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi. Akuntan praktik menggunakan rerangka konseptual untuk pertimbangan praktis atau landasan berpikir pemecahan praktik-praktik akuntansi yang baru, sehingga praktik-praktik akuntansi tersebut menjadi berdasar dan konsisten.

Rerangka Konseptual PSAK

Rerangka konseptual PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) mengadopsi *Conceptual Framework* IAS (*International Accounting Standards*). IASB (*International Accounting Standards Board*) tidak memberikan rumusan khusus tentang *Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statement*, namun kalimat pembuka *framework* tersebut disebutkan kerangka dasar ini merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para pengguna eksternal. Rerangka konseptual bukanlah Standar Akuntansi Keuangan yang memuat pernyataan-pernyataan yang mengatur praktik akuntansi, namun jika terjadi pertentangan standar akuntansi keuangan dengan ketentuan yang termuat dalam rerangka konseptual, maka standar akuntansi keuangan mempunyai skala prioritas untuk diutamakan. Rerangka konseptual yang tidak lain sebagai landasan penyusunan standar akuntansi keuangan akan semakin meminimalisir pertentangan antara keduanya.

PSAK mengungkapkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan terdiri atas:

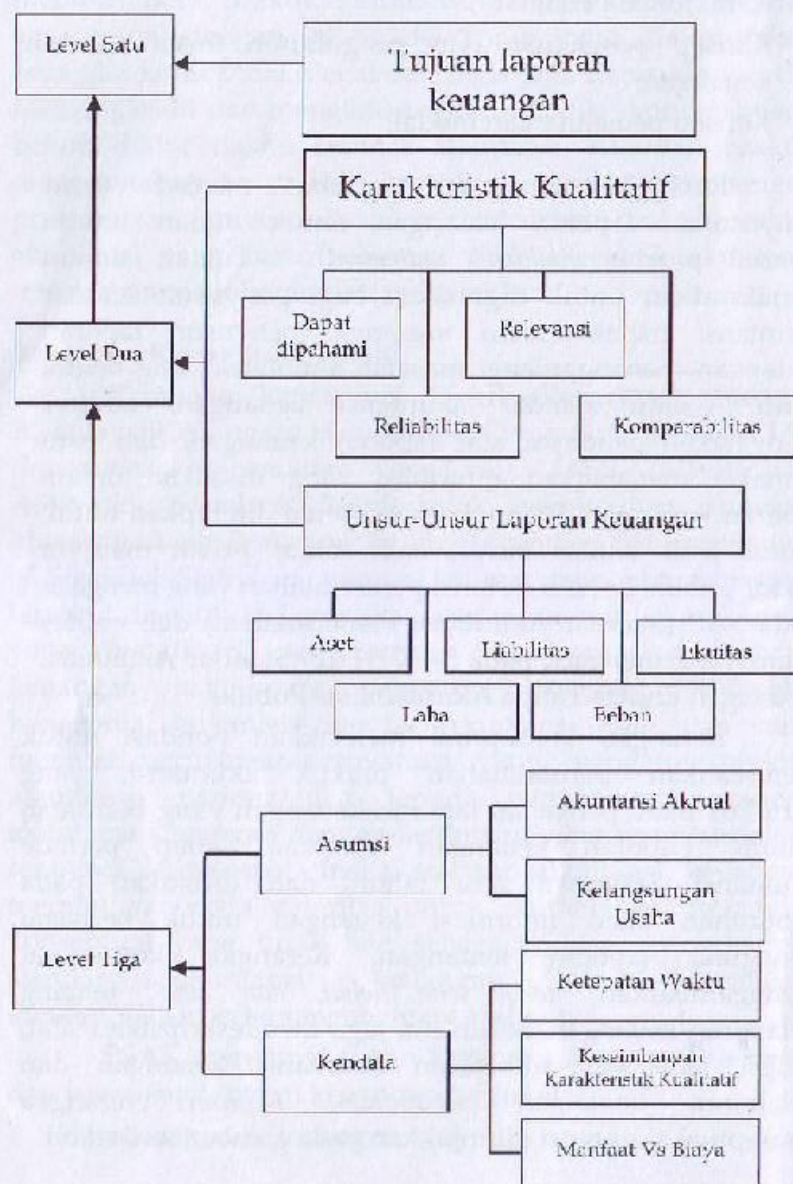
1. Tujuan laporan keuangan;

2. Asumsi dasar;
3. Karakteristik kualitatif;
4. Konsep pengakuan dan pengukuran unsur laporan keuangan;
5. Konsep pemeliharaan modal;

Rerangka konseptual tersebut menjadi dasar penyusunan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*). Tujuan umum dimaksudkan untuk digunakan bagi penyusun standar akuntansi melaksanakan tugasnya, penyusun laporan keuangan menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan, auditor menyatakan pendapat atas laporan keuangan, dan para pemakai menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Rerangka konseptual diterapkan untuk semua jenis entitas bisnis, baik sektor privat maupun sektor publik, kecuali instansi pemerintahan yang mengacu pada SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) dan entitas bisnis yang mengacu pada SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik).

Rerangka konseptual meletakkan pondasi untuk memecahkan permasalahan praktik akuntansi, yang berfokus pada penyajian laporan keuangan yang bertujuan umum. Laporan keuangan disajikan setiap periode akuntansi, lazimnya satu tahun, dan ditujukan pada kebutuhan akan informasi keuangan untuk berbagai pengguna laporan keuangan. Rerangka konseptual menggambarkan "*why, who, what, dan how*" tentang pelaporan keuangan. Selain itu, juga mendeskripsikan sifat, fungsi, dan batasan-batasan akuntansi keuangan dan pelaporan keuangan beroperasi. Adapun rerangka konseptual akuntansi ditunjukkan pada gambar berikut ini.

Gambar 1.1 Rerangka Konseptual



Perubahan kerangka konseptual konvergensi IFRS mengelompokkan karakteristik kualitatif atas dua, yaitu karakteristik kualitatif fundamental dan karakteristik kualitatif yang dapat meningkatkan relevansi laporan keuangan. Karakteristik kualitatif fundamental meliputi relevan (*relevance*) dan penyajian yang jujur (*faithful representation*), sedangkan karakteristik kualitatif yang dapat meningkatkan relevansi laporan keuangan meliputi komparabilitas (*comparability*), dapat diuji (*verifiability*), dan ketepatan waktu (*timeliness*), dan dapat dipahami (*understandability*). Rerangka konseptual terbaru tersebut hanya menggunakan asumsi kelangsungan usaha (*going concern*). Kendala informasi yang relevan dan andal (*reliability*) fokus memperhatikan pertimbangan biaya dan manfaat dari informasi keuangan. Pengakuan dan pengukuran mengalami beberapa perubahan pada rerangka konseptual yang baru tersebut.

Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi semua pengguna laporan keuangan atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) entitas bisnis. Kepentingan para pemangku kepentingan tidak selalu sama dan biasanya bertentangan antara satu pihak dengan pihak lainnya (pemangku kepentingan lainnya), sehingga informasi keuangan yang dihasilkan harus netral, objektif, dan transparan. Rerangka konseptual menyatakan tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan yang bermanfaat bagi sebagian besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Pengguna laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha lainnya, pelanggan,

pemerintah serta lembaga-lembaga lainnya dan masyarakat. Adapun beberapa kebutuhan informasi yang berbeda bagi para penggunalaporan keuangan tersebut sebagai berikut:

1. Investor ataupun penanam modal beresiko dan penasihat mereka berkepentingan dengan resiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar dividen.
2. Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja.
3. Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunga dapat dibayar pada saat jatuh tempo.
4. Pemasok dan kreditor usaha lain tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditor usaha berkepentingan pada perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka tergantung pada kelangsungan hidup perusahaan.
5. Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan terutama

kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan atau tergantung pada perusahaan.

6. Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaan berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena ini berkepentingan dengan aktivitas perusahaan mereka menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.
7. Masyarakat; perusahaan memengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. Misalnya perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (*trend*) dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya.

Laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan, informasi kinerja entitas, perubahan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut disajikan dengan cara wajar, yaitu penyajian yang secara jujur memperlihatkan dampak yang terjadi dari transaksi, peristiwa dan kondisi lain sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan akun-akun aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang diatur dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. Penerapan SAK, dengan pengungkapan tambahan jika diperlukan, dianggap menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Deskripsi singkat laporan keuangan tersebut sebagai berikut:

1. Posisi keuangan (neraca) menggambarkan sumber daya yang dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas dan solvabilitas, serta kemampuan beradaptasi terhadap

perubahan lingkungan. Informasi sumber daya ekonomi yang dikendalikan dan kemampuan perusahaan dalam memodifikasi sumber daya ini di masa lalu berguna untuk memprediksi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas (dan setara kas) di masa depan. Informasi struktur keuangan berguna untuk memprediksi kebutuhan pinjaman di masa depan dan bagaimana penghasilan bersih (laba) dan arus kas di masa depan akan didistribusikan kepada mereka yang memiliki hak di dalam perusahaan; informasi tersebut juga berguna untuk memprediksi seberapa jauh perusahaan akan berhasil meningkatkan lebih lanjut sumber keuangannya. Informasi likuiditas dan solvabilitas berguna untuk memprediksi kemampuan perusahaan dalam pemenuhan komitmen keuangannya pada saat jatuh tempo. Likuiditas merupakan ketersediaan kas jangka pendek di masa depan setelah memperhitungkan komitmen yang ada. Solvabilitas merupakan ketersediaan kas jangka panjang untuk memenuhi komitmen pada saat jatuh tempo.

2. Kinerja atau informasi kinerja entitas menggambarkan profitabilitas, diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa datang. Informasi fluktuasi kinerja adalah penting dalam hubungan ini. Informasi kinerja bermanfaat untuk memprediksi kapasitas perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada. Di samping itu, informasi tersebut juga berguna dalam perumusan pertimbangan tentang efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan tambahan sumber daya.
3. Perubahan posisi keuangan menggambarkan perubahan sumber daya yang dikendalikan entitas. Informasi

perubahan posisi keuangan bermanfaat untuk menilai aktivitas investasi, pendanaan dan operasi selama periode pelaporan. Informasi ini berguna bagi pemakai sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas (dan setara kas) serta kebutuhan perusahaan untuk memanfaatkan arus kas tersebut. Dalam penyusunan laporan perubahan posisi keuangan, dana dapat didefinisikan dalam berbagai cara, seperti, seluruh sumber daya keuangan, modal kerja, aktiva likuid atau kas. Kerangka dasar ini tidak mendefinisikan dana secara spesifik. Informasi perubahan posisi keuangan disajikan dalam laporan tersendiri.

4. Catatan atas laporan keuangan menampung catatan dan *skedule* tambahan serta informasi lainnya yang dipandang relevan. Akun-akun yang disajikan pada laporan posisi keuangan (neraca), kinerja (laporan laba-rugi komprehensif), dan perubahan posisi keuangan (laporan arus kas) masih memerlukan penjelasan rinci agar lebih informatif dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan ekonomi. Penjelasan tersebut ditampung dalam catatan atas laporan keuangan. Selain itu, juga mencakup pengungkapan tentang risiko dan ketidakpastian yang mempengaruhi perusahaan dan setiap sumber daya dan kewajiban (*obligation*) yang tidak dicantumkan dalam neraca (seperti cadangan mineral). Informasi segmen-segmen industri dan geografi serta pengaruhnya pada perusahaan akibat perubahan harga dapat juga disediakan dalam bentuk informasi tambahan.

Asumsi Dasar

Asumsi dasar yang melandasi penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah dasar akrual (*accrual basis*) dan kelangsungan usaha (*going concern*). Kedua asumsi dasar penyajian laporan keuangan dijelaskan sebagai berikut:

Dasar Akrual

Dasar (*basis*) akrual merupakan salah satu asumsi dasar akuntansi yang berhubungan dengan proses akuntansi yang berdampak terhadap pengakuan (*recognising*) transaksi keuangan dalam periode terjadinya dibandingkan hanya fokus pada penerimaan atau pembayaran kas. Basis akrual mengakui transaksi dan peristiwa lain pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode bersangkutan. Basis akrual memberikan informasi masa lalu yang menimbulkan penerimaan dan pembayaran kas, dan kewajiban pembayaran kas di masa datang, serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima di masa datang.

Standar akuntansi mengharuskan konsep akrual melandasi penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Basis akrual ini menyelenggarakan pencatatan dan pelaporan transaksi dalam laporan keuangan pada periode terjadinya tanpa memandang pembayaran dan penerimaan kas dilakukan secara tunai atau tidak. Implikasinya, informasi akuntansi yang dilaporkan pada laporan keuangan konsisten terhadap dampak transaksi yang dilakukan secara tunai (*cash*) dan kredit (*credit*). Itulah alasan para pendukung basis akrual yakin bahwa akuntansi akrual lebih unggul dibandingkan akuntansi basis kas, baik untuk mengukur kinerja maupun kondisi keuangan.

Sistem akuntansi akrual mengurangi masalah penentuan waktu (*timing*) dan penandingan (*matching*) yang tidak dapat dipisahkan dalam arus kas untuk pengukuran kinerja entitas. Informasi mengenai laba perusahaan yang berdasarkan akuntansi akrual biasanya memberikan indikasi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan arus kas tahun berjalan dan masa datang yang lebih baik dibandingkan dengan informasi yang dibatasi oleh aspek keuangan berupa penerimaan dan pembayaran kas. Akuntansi akrual mengakui peristiwa yang berhubungan dengan kejadian arus kas sebelum dan sesudah periode akuntansi.

Akuntansi akrual juga merupakan sistem pengukuran laba yang meliputi dua prinsip atau konsep akuntansi, yaitu prinsip pengakuan pendapatan (*revenue recognition principle*) dan prinsip penandingan (*matching principle*). Berdasarkan prinsip penandingan dan pengakuan pendapatan tersebut, akuntansi akrual mengakui peristiwa yang berhubungan arus kas sebelum dan sesudah periode akuntansi dengan mentransformasikan arus kas ke dalam laba akuntansi sehingga laba dapat dipandang sebagai suatu indikator penilaian entitas. Laba diukur dari suatu jumlah pendapatan (*revenue*) melebihi biaya atau beban (*expenses*) untuk setiap periode pencatatan. Untuk suatu entitas, laba akrual dan nilai aset bersih diharapkan sama dengan sisa arus kas bersih.

Kelangsungan usaha

Konsep kelangsungan usaha entitas (*going concern concept*) mengasumsikan entitas akan melanjutkan usahanya di masa datang tidak terbatas, entitas beroperasi tidak dimaksudkan untuk dilikuidasi atau dipersempit skala usahanya. Entitas yang didirikan dan bermaksud untuk melikuidasi dalam jangka waktu dekat (waktu tertentu)

maka entitas tersebut akan menggunakan penilaian lain dan harus mengungkapkannya dalam laporan keuangan. Entitas yang didirikan hanya untuk mengerjakan proyek pembangunan dengan jangka waktu tertentu, misalnya 10 tahun, maka entitas tersebut harus mengestimasi peralatan yang digunakannya maksimal 10 tahun. Entitas tersebut dapat mengestimasi nilai sisa peralatan yang dipakai dengan cukup tinggi karena akan dijual pada akhir masa proyek. Dengan demikian, untuk kondisi tersebut nilai likuidasi dipandang relevan menentukan nilai sumber daya akhir penyelesaian proyek.

Implikasi asumsi kelangsungan usaha atau juga diistilahkan *continuing entity assumption* adalah mengukur kinerja manajemen dengan membagi segmen waktu tertentu dan laporan progres untuk pencatatan setiap periode tertentu. Perusahaan yang hanya mencatat transaksi kas akan menghadapi masalah ketika transaksi melibatkan lebih dari satu periode pencatatan. Contoh, perusahaan melakukan transaksi dengan membeli aset secara kredit, pembayaran dilakukan pada periode mendatang sehingga tidak tanding (*matching*) dengan periode pembelian. Bilamana perusahaan mencatat hanya transaksi-transaksi kas, laporan tidak menunjukkan biaya (*cost*) pada waktu pembelian aset tersebut. Informasi yang tidak lengkap tersebut akan memberikan suatu pengukuran yang tidak akurat terhadap kinerja perusahaan.

SAK konvergensi IFRS juga mulai menggunakan nilai wajar (*fair value*) untuk aset tertentu. Hal tersebut sejalan dengan asumsi kelangsungan usaha untuk penyajian wajar laporan keuangan yang tidak menyesatkan penggunaannya. Konsep kelangsungan usaha memfokuskan perhatian manajemen pada informasi masa datang yang relevan, minimal satu tahun sesudah akhir pelaporan

keuangan periode tertentu. Entitas yang masih normal menghasilkan laba usaha dan sumber pembiayaan masih cukup signifikan diandalkan, maka penilaian entitas tidak memerlukan analisis yang terlalu rinci. Namun, entitas yang menderita kerugian signifikan cukup besar dan sumber pembiayaan sudah sangat diragukan, seperti devaluasi mata uang yang mengancam kelangsungan usaha entitas, maka manajemen perlu mengungkapkan kondisi tersebut dalam laporan keuangannya. Entitas menyusun laporan keuangan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, namun jika entitas tidak menggunakannya asumsi tersebut maka perlu ada penjelasan dalam laporan keuangan periode tersebut.

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif (*qualitative characteristics*) menggambarkan atribut informasi yang tersedia dalam laporan keuangan. Keterpenuhan karakteristik kualitatif menentukan kebermanfaatan informasi kuantitatif (angka-angka keuangan) bagi para penggunaannya. PSAK menyatakan karakteristik kualitatif terbagi atas empat unsur utama, yaitu dapat dipahami (*understandability*), relevan (*relevance*), keandalan (*reliability*), dan dapat dibandingkan (*comparability*). Adapun penjelasan karakteristik kualitatif tersebut sebagai berikut:

Dapat dipahami

Akuntansi sebagai bahasa bisnis dengan formulasi simbol-simbol mengharuskan penggunaannya untuk dapat membaca dan memahaminya. Para pengguna laporan keuangan diharapkan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi, bisnis, dan konsep-konsep yang mendasari penyusunan laporan keuangan. Informasi atau laporan keuangan akan bermanfaat bilamana pengguna informasi tersebut mempunyai kemampuan untuk

memahaminya. Dengan demikian, karakteristik dapat dipahami menunjukkan informasi akuntansi harus cukup transparan sehingga masuk akal bagi penggunaanya.

Informasi yang disajikan diharapkan sesederhana mungkin dengan tujuan dapat dimengerti oleh sebagian besar pembacanya, bukan orang-orang yang punya keahlian khusus. Namun, kemudahan membaca informasi oleh para penggunaanya tidak boleh mengabaikan relevansi informasi yang seharusnya disajikan dengan kompleks. Pengguna informasi akuntansi perlu memahami dasar-dasar atau disiplin yang mendasari akuntansi keuangan, sehingga laporan keuangan auditan bermanfaat bagi penggunaanya. Pihak penyusun laporan keuangan dan pengguna laporan keuangan mempunyai pemahaman yang sama terhadap informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Relevan

Informasi yang bermanfaat harus relevan bagi pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Karakteristik kualitatif relevan bermakna informasi harus mampu memengaruhi keputusan ekonomi bagi penggunaanya yang memiliki nilai prediktif atau umpan balik. Relevan juga berarti membantu pengguna informasi akuntansi mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, dan atau masa datang. Informasi dalam bentuk laporan keuangan dapat digunakan untuk memprediksi kinerja dan posisi keuangan di masa datang, seperti kemampuan arus kas masa datang, kemampuan entitas membayar dividen, dan kemampuan entitas melunasi kewajibannya yang jatuh tempo.

Informasi penegasan (*confirmatory*) yang terdiri dari peristiwa masa lalu dan masa kini berkaitan dengan informasi peramalan (*predictive*), atau proyeksi peristiwa masa datang. Informasi keuangan yang meliputi laporan

posisi keuangan dan kinerja entitas disajikan dalam dua tahun perbandingan menunjukkan peristiwa masa lalu dan masa kini, juga bermanfaat untuk analisis dan peramalan bisnis entitas dan arus kas masa datangnya. Informasi tersebut bermanfaat untuk pengambilan keputusan dividen bagi pemegang saham, pembagian bonus bagi manajemen, dan keputusan ekonomi lainnya. Suatu informasi dianggap relevan untuk disajikan atau tidak disajikan dipengaruhi oleh tingkat materialitas (*materiality*).

Materialitas adalah tolok ukur informasi yang relevan. Informasi dikatakan material bilamana kesalahan (*error*), salah saji (*misstatement*), atau kelalaian menyajikan (*omission*) informasi memengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan, atau menyesatkan pengambil keputusan. Dengan kata lain, materialitas merupakan ambang batas informasi keuangan yang dipandang berguna bagi para pengguna laporan keuangan. Materialitas tersebut bergantung pada besarnya akun-akun atau kesalahan yang dinilai sesuai situasi khusus. Tidak ada standar ukuran tingkat materialitas dalam jumlah tertentu.

Ukuran materialitas dipengaruhi oleh hakikat informasi, kondisi entitas, dan ukuran entitas. Biasanya, ukuran materialitas didasarkan pada besaran nilai penjualan atau total aset. Contoh, peraturan Bapepam-LK (VIII G7) untuk akun-akun yang disajikan pada laporan posisi keuangan menggunakan ukuran materialitas 5% dari total aset, dan akun-akun yang disajikan pada laporan laba-rugi komprehensif menggunakan ukuran materialitas 10% dari total penjualan. Informasi yang bersifat material diungkapkan atau dibahas secara terpisah dalam laporan keuangan. Akun-akun yang tidak material tidak perlu diungkapkan secara terpisah, atau digabungkan dengan informasi lainnya.

Reliabilitas

Keandalan (*reliability*) menunjukkan bahwa laporan keuangan harus menyajikan informasi yang andal (*reliable*). Informasi berkualitas andal jika bebas dari informasi yang menyesatkan, kesalahan material, dan diandalkan penggunaannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful presentation*) dari seharusnya yang disajikan, atau secara wajar diharapkan dapat disajikan. Informasi yang tidak diandalkan jarang memiliki kebermanfaatan. Informasi dapat saja relevan tetapi penyajiannya tidak dapat diandalkan, maka penggunaan informasi tersebut dapat saja menyesatkan. Contoh, jumlah tuntutan kerugian suatu tindakan hukum yang masih disengketakan, meskipun tepat untuk mengungkapkan jumlah serta keadaan tuntutan tersebut, namun tidak tepat bagi entitas untuk mengakui seluruh tuntutan tersebut dalam laporan posisi keuangan. Informasi yang dapat diandalkan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Penyajian jujur (*faithful representation*); informasi menggambarkan secara jujur transaksi, kejadian, atau keadaan dengan apa ada adanya sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum. Informasi keuangan tidak luput dari risiko penyajian yang kurang/tidak jujur, bukan kesengajaan untuk menyesatkan tetapi kesulitan yang melekal pada pengidentifikasian transaksi yang disajikan.
2. Substansi mengungguli bentuk (*substance over form*); peristiwa atau transaksi harus disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan bentuk hukumnya. Substansi transaksi dan realitas ekonomi tidak selalu sejalan dengan bentuk hukumnya, maka harus mengutamakan substansinya.

3. Netralitas (*neutrality*); informasi digunakan untuk kebutuhan pemakai umum, dan tidak untuk kebutuhan atau keinginan pihak-pihak tertentu. Informasi tidak diperuntukkan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu dan merugikan pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berbeda.
4. Pertimbangan sehat (*prudence*); penyusunan laporan keuangan sering diperhadapkan dengan ketidakpastian peristiwa atau keadaan tertentu, sehingga diperlukan pertimbangan sehat dengan penuh kehati-hatian dalam pemilihan metode, penghitungan, dan pelaporannya. Pertimbangan sehat bermakna kehati-hatian melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban disajikan secara wajar, atau tidak menyesatkan.
5. Kelengkapan (*completeness*); informasi yang disajikan harus lengkap dalam batasan relevan dan mempertimbangkan biaya penyusunannya. Kelalaian atau kesengajaan pengungkapan suatu informasi yang relevan harus dihindari, karena mengakibatkan informasi menjadi menyesatkan, tidak dapat diandalkan, dan tidak sempurna.

Komparabilitas

Pengguna laporan keuangan membandingkan laporan keuangan dua atau lebih periode tertentu bertujuan untuk mengidentifikasi tren dalam posisi keuangan dan kinerja keuangan. Selain itu, komparabilitas laporan keuangan antarperiode menggambarkan prospek entitas di masa datang. Komparabilitas laporan keuangan antarentitas dapat membantu memberikan masukan yang berguna bagi calon investor dan investor potensial untuk menentukan pilihan investasi. Komparabilitas antarperiode dan antarentitas harus dilakukan secara konsisten dan

menggunakan standar akuntansi yang sama, agar pengukuran dan penyajian informasi sama antarentitas yang berbeda. Karakteristik komparabilitas ini mengisyaratkan pengguna laporan keuangan harus mendapatkan informasi tentang kebijakan akuntansi dan perubahan kebijakan, serta pengaruh kebijakan tersebut, baik antarperiode ataupun antarentitas yang akan diperbandingkan. Ketaatan entitas pada standar akuntansi keuangan membantu pencapaian komparabilitas berdaya banding tinggi.

Kebutuhan terhadap komparabilitas bukan berarti keseragaman menggunakan prinsip dan kebijakan akuntansi yang sama, namun perlu memilih alternatif yang lebih relevan dan dapat diandalkan. Entitas tidak perlu menggunakan kebijakan akuntansi yang tidak sesuai dengan karakteristik relevan dan andal, serta menggantinya dengan kebijakan baru yang lebih sesuai dengan kondisinya. Dengan demikian, jika terjadi perubahan kebijakan akuntansi tidak menggunakan karakteristik kualitatif relevan dan andal tersebut, maka entitas perlu mengungkapkan perubahan itu, dan dampak yang ditimbulkannya berdasarkan kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku.

Kendala Informasi yang Relevan dan Andal

Agar informasi akuntansi atau laporan keuangan bermanfaat bagi penggunaanya, penyusunan dan penyajian laporan keuangan menghadapi kendala-kendala yang menjadikan informasi tersebut berkualitas relevan dan andal. Kendala-kendala informasi yang relevan dan andal terdiri atas keseimbangan antara karakteristik, ketepatan waktu, dan keseimbangan antara biaya dan manfaat. Adapun pembahasan kendala-kendala tersebut sebagai berikut:

1. Keseimbangan antara karakteristik kualitatif (*balance between qualitative characteristics*); *trade-off* berbagai karakteristik kualitatif bertujuan mencapai keseimbangan untuk memenuhi tujuan laporan keuangan. Karakteristik-karakteristik kualitatif sering kali bertentangan antara satu dengan lainnya, khususnya relevan dan andal sulit terpenuhi secara bersamaan. Setiap kasus yang berbeda memerlukan pertimbangan profesional agar laporan keuangan dihasilkan secara wajar dan tidak memihak. Contoh, tanah secara andal dibuktikan dengan harga historisnya berdasarkan akta jual-beli dan bukti pembayarannya, namun harga historis tersebut tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Sebaliknya, nilai wajar tanah saat ini yang diperoleh dengan hasil taksiran penilai dipandang lebih relevan, namun tidak andal karena tidak didukung bukti transaksi historis.
2. Ketepatan waktu (*timeliness*); informasi yang disajikan tidak tepat waktu atau terlambat menyebabkan informasi tersebut akan kehilangan relevansinya. Manajemen entitas bertugas menyeimbangkan manfaat informasi tepat waktu dengan keandalan informasi. Keandalan informasi terkait dengan penyajian laporan keuangan secara keseluruhan, namun membutuhkan waktu yang lama, sehingga laporan keuangan tersebut dapat saja terlambat disajikan. Keterlambatan penyajian laporan keuangan akan mengurangi relevansi informasi yang terkandung di dalamnya. Pencapaian keseimbangan tepat waktu dan andal didasarkan pertimbangan pemenuhan kebutuhan informasi bagi pengguna untuk pengambilan keputusan ekonomi.
3. Keseimbangan antara biaya dan manfaat (*balance between benefit and cost*); proses dan pengolahan data keuangan

untuk menghasilkan informasi yang akurat dan tepat waktu membutuhkan biaya yang besar tetapi manfaat informasi yang diharapkan harus jauh lebih besar pula. Keseimbangan manfaat dan biaya merupakan kendala terbesar karakteristik kualitatif laporan keuangan, sehingga memerlukan proses pertimbangan manajemen yang substansial atau materialitas. Manajemen sebagai penanggung jawab laporan keuangan harus menggunakan pertimbangan yang tepat (jitu) menentukan informasi yang cukup material dan tidak terlalu mahal untuk mengungkapkannya.

Unsur-unsur laporan keuangan, pengakuan unsur-unsur laporan keuangan, pengukuran unsur-unsur laporan keuangan, dan konsep modal dan pemeliharaan modal akan dibahas pada bab selanjutnya, penyajian laporan keuangan. Pembahasan penyajian laporan keuangan masih merupakan bagian penting dari kerangka konseptual standar akuntansi keuangan. Bagian-bagian tersebut berada pada kerangka konseptual tingkat kedua, seperti terlihat pada gambar kerangka konseptual sebelumnya.

Pertanyaan

Jawablah setiap pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas untuk membuktikan pemahaman teoritis pembahasan bab ini.

1. Kerangka konseptual dianalogikan "konstitusi" penyelenggaraan pemerintahan negara. Jelaskan makna "konstitusi" tersebut dalam praktik akuntansi?
2. PSAK mengungkapkan kerangka dasar penyusunan laporan keuangan dalam beberapa unsur-unsur penting. Sebutkan dan jelaskan unsur-unsur dalam kerangka dasar penyusunan laporan keuangan tersebut? Sajikan

kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan dalam bentuk gambar?

3. Laporan keuangan berkepentingan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi semua pengguna laporan keuangan atau pemangku kepentingan (*stakeholders*). Sebutkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan dan tujuannya masing-masing?
4. Laporan keuangan disusun dan disajikan berdasarkan asumsi-asumsi dasar dan karakteristik kualitatif yang melingkupinya. Jelaskan asumsi-asumsi dan karakteristik-karakteristik kualitatif yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan?
5. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan diperhadapkan pada kendala-kendala tertentu yang menjadikan informasi tersebut berkualitas relevan dan andal. Sebutkan dan jelaskan kendala-kendala penyusunan dan penyajian laporan keuangan? Uraikan pertimbangan-pertimbangan profesional terhadap kendala-kendala tersebut?

Latihan

Anggaplah diri Anda bagian manajemen dari entitas bisnis tertentu. Posisikan diri Anda sebagai penyedia atau penyusun laporan keuangan entitas. Sajikan pandangan-pandangan kontroversi Anda tentang berbagai hal-hal penting berikut ini.

1. Penyajian laporan keuangan tahunan *versus* laporan keuangan saat likuidasi?
2. Asumsi dasar akrual *versus* dasar kas penyajian laporan keuangan?
3. Biaya historis *versus* nilai wajar penyajian aset-aset dalam laporan keuangan?

4. Karakteristik relevan *versus* karakteristik andal penyajian laporan keuangan?
5. Biaya *versus* manfaat kendala informasi laporan keuangan?
6. Relevan *versus* ketepatan waktu penyajian laporan keuangan?
7. Substansi atau realitas ekonomi *versus* bentuk hukum penyajian laporan keuangan?
8. Laporan posisi keuangan *versus* laporan arus kas penyajian laporan keuangan?
9. Materialitas setiap akun-akun laporan keuangan *versus* materialitas kelompok akun-akun laporan keuangan?
10. Informasi kualitatif *versus* kuantitatif penyajian laporan keuangan?

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

2

Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan menggambarkan kondisi suatu entitas yang disajikan secara terstruktur dalam bentuk informasi keuangan dengan tanggal atau periode waktu tertentu. Selain itu, laporan keuangan menunjukkan dampak keuangan dari transaksi-transaksi atau peristiwa lain yang terjadi dalam suatu entitas tertentu. Laporan keuangan yang disajikan dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang diharapkan dapat bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan ekonomi.

Laporan keuangan merupakan sarana pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan dan pengelolaan sumber daya entitas yang dipercayakan kepada mereka. Pertanggungjawaban manajemen tersebut tidak dimaksudkan untuk tujuan khusus maupun untuk kepentingan pihak-pihak tertentu saja. Laporan keuangan menyediakan informasi tentang aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban suatu entitas. Selain itu, laporan keuangan juga menyediakan informasi tentang kontribusi dan distribusi kepada pemilik entitas yang merupakan pemegang instrumen yang diklasifikasikan sebagai ekuitas.

Untuk mencapai tujuan laporan keuangan tersebut, laporan keuangan harus didukung oleh komponen-komponennya yang lengkap. Komponen-komponen atau jenis-jenis laporan keuangan yang lengkap terdiri dari:

1. Laporan posisi keuangan (Neraca) akhir tahun;
2. Laporan laba-rugi komprehensif selama periode;

3. Laporan perubahan ekuitas selama periode;
4. Laporan arus kas selama periode;
5. Catatan atas laporan keuangan, yang memuat ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lainnya;
6. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara restrospektif, atau penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan.

Unsur-unsur Laporan Keuangan

Laporan keuangan menyajikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan. Tiga jenis informasi utama keuangan tersebut disajikan pada tiga jenis laporan keuangan yang berbeda, posisi keuangan disajikan dalam neraca, kinerja disajikan dalam laporan laba-rugi komprehensif, dan perubahan posisi keuangan disajikan dalam bentuk sumber, penggunaan, dan perubahan dana yang berdampak pada posisi keuangan. Pada dasarnya, laporan keuangan utama hanya meliputi neraca dan laba-rugi, sedangkan laporan perubahan posisi keuangan baru dapat disajikan setelah neraca dan laporan laba-rugi selesai disusun. Dengan demikian, unsur-unsur laporan keuangan terdiri atas lima, yaitu tiga unsur neraca yang meliputi aset, liabilitas, dan ekuitas, dan dua unsur laporan laba-rugi yang meliputi penghasilan dan beban.

Laporan posisi keuangan (statement of financial position)

PSAK 1 memperkenalkan istilah laporan posisi keuangan untuk menunjukkan neraca, yang sebelum-sebelumnya dikenal dengan nama neraca. Walaupun demikian, laporan keuangan dengan judul neraca masih tetap diperkenankan. Judul laporan posisi keuangan belum

menjadi keharusan, entitas juga masih dibolehkan menggunakan nama neraca untuk laporan keuangan yang dimaksudkan. Laporan posisi keuangan atau neraca merupakan daftar yang menunjukkan posisi keuangan, yaitu komposisi dan jumlah aset, liabilitas, dan ekuitas suatu entitas tertentu pada suatu tanggal tertentu pula.

Unsur-unsur atau akun-akun utama yang menggambarkan posisi keuangan meliputi aset, liabilitas, dan ekuitas. Adapun penjelasan akun-akun tersebut sebagai berikut:

1. Aset (*assets*);

Aset merupakan sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, dan dari mana manfaat ekonomi di masa datang diharapkan akan diperoleh entitas. Manfaat ekonomi masa datang suatu aset dapat terwujud dengan cara: sebagai alat produksi penghasil barang dan jasa, dipertukarkan dengan aset lainnya, digunakan untuk menyelesaikan kewajiban, dan dibagikan kepada para pemilik entitas. Pengakuan aset didasarkan pada keterpenuhannya definisi aset, kemungkinan manfaat ekonomi akan mengalir ke dalam entitas, dan akun tersebut mempunyai nilai dan biaya yang dapat diukur dengan andal. Dengan demikian, aset diakui dalam neraca sebesar kemungkinan (*probable*) manfaat ekonomi di masa datang diperoleh entitas dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

2. Liabilitas (*liability*);

Liabilitas atau biasa disebut kewajiban merupakan kewajiban (utang) entitas masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Penyelesaian

liabilitas dapat dilakukan dengan pembayaran kas, penyerahan aset lain, pemberian jasa, penggantian dengan liabilitas lainnya, dan konversi liabilitas menjadi ekuitas. Liabilitas entitas harus diakui jika ada kemungkinan manfaat ekonomi akibat liabilitas tersebut akan mengalir ke dalam entitas, dan liabilitas tersebut mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal. Dengan demikian, liabilitas diakui dalam neraca sebesar kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban sekarang dan jumlah yang harus discloseasikan dapat diukur dengan andal.

3. Ekuitas (*equity*);

Ekuitas merupakan hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua liabilitas. Subklasifikasi ekuitas dalam neraca meliputi setoran modal, saldo laba, dan pencadangan saldo laba atau penyesuaian saldo laba yang tidak dapat dibagikan sebagai dividen. Seperti halnya aset dan liabilitas, keterpenuhan definisi, manfaat ekonomi, dan keterukuran yang andal mengharuskan ekuitas diakui sebagai bagian yang disajikan di neraca.

Laporan laba-rugi Komprehensif (*Statement of Comprehensive Income*)

Laporan laba-rugi komprehensif memberikan gambaran tentang kinerja suatu entitas, yang menimbulkan perubahan pada jumlah ekuitas entitas yang bukan berasal dari transaksi pemilik, seperti setoran modal dan pembagian dividen. Laba-rugi komprehensif terdiri dari laba-rugi itu sendiri dan pendapatan komprehensif lainnya. Laba-rugi menggambarkan pendapatan, beban, dan laba-rugi suatu entitas pada periode tertentu, atau biasa disebut dengan jumlah laba bersih. Pendapatan komprehensif lainnya atau biasa disebut OCI (*other comprehensive income*) melingkupi

akun-akun pendapatan dan beban yang tidak diakui dalam laba-rugi. Komponen pendapatan komprehensif lainnya meliputi perubahan dalam surplus revaluasi aset tetap (PSAK 16; Aset Tetap), keuntungan dan kerugian aktuarial program manfaat pasti (PSAK 24; Imbalan Kerja), keuntungan dan kerugian penjabaran laporan keuangan (PSAK 10; Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing), dan keuntungan dan kerugian pengukuran kembali aset keuangan serta bagian efektif keuntungan dan kerugian instrument lindung nilai (PSAK 55; Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran).

Unsur-unsur yang berkaitan langsung dengan laporan laba-rugi meliputi penghasilan dan beban. Adapun penjelasan akun-akun tersebut sebagai berikut:

1. Penghasilan (*Income*);

Penghasilan merupakan kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset, atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal meningkat. Penghasilan diakui dalam laporan laba-rugi komprehensif jika kenaikan manfaat ekonomi di masa datang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Penghasilan yang dimaksudkan tersebut meliputi pendapatan (*revenue*) dan keuntungan (*gain*).

2. Beban (*Expense*);

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar, atau berkurangnya aset, atau terjadinya liabilitas yang mengakibatkan menurunnya ekuitas yang tidak terkait dengan pembagian kepada penanam modal. Beban diakui dalam laporan laba-rugi komprehensif jika terjadi

penurunan manfaat ekonomi masa datang yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Beban didasarkan pada hubungan langsung biaya dengan akun penghasil tertentu yang diperoleh (*matching of cost with revenues*). Manfaat ekonomi yang diharapkan timbul selama beberapa periode, maka beban diakui dengan dasar prosedur alokasi yang rasional dan sistematis dalam periode manfaat tersebut dinikmati oleh entitas.

Pengukuran Akun-akun Laporan Keuangan

Satuan unit moneter merupakan alat denominasi untuk menyajikan akun-akun laporan keuangan. Untuk kepentingan penyajian dalam unit moneter maka diperlukan pengukuran (*measurement*) terhadap akun-akun laporan keuangan. Pengukuran merupakan proses penetapan jumlah uang untuk akun-akun laporan keuangan yang disajikan dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba-rugi komprehensif, termasuk pemilihan dasar pengukurannya. Berbagai dasar pengukuran akun-akun laporan keuangan sebagai berikut ini.

1. Biaya Historis (*Historical Cost*);

Biaya historis biasa juga disebut biaya atau harga perolehan pada tanggal transaksi. Biaya historis menunjukkan aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset saat perolehannya. Liabilitas dicatat sebesar jumlah yang timbul sebagai penukar kewajiban, atau sejumlah kas atau setara kas yang diharapkan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban entitas (usaha normal).

2. Biaya Kini (*Current Cost*);

Biaya kini merupakan biaya yang seharusnya diperoleh saat sekarang pada saat pengukuran. Aset dinilai berdasarkan jumlah kas atau setara kas yang seharusnya dibayarkan bilamana aset yang sama diperoleh pada saat sekarang. Liabilitas diukur didasarkan jumlah kas atau setara kas yang tidak didiskontokan yang mungkin akan diperlukan menyelesaikan kewajiban sekarang.

3. Nilai Realisasi/ Penyelesaian (*Realizable/Settlement Value*);

Nilai realisasi atau nilai penyelesaian merupakan nilai yang dapat diperoleh dengan menjual aset, pelepasan normal. Aset diukur dengan jumlah kas atau setara kas yang diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan normal. Liabilitas diukur dengan nilai penyelesaian, jumlah kas atau setara kas yang tidak didiskontokan yang diharapkan akan dibayarkan untuk pelunasan kewajiban entitas (usaha normal).

4. Nilai Sekarang (*Present Value*);

Nilai sekarang merupakan arus kas masuk (bersih) di masa datang yang didiskontokan ke biaya sekarang. Aset diukur sebesar arus kas masuk bersih di masa datang yang didiskontokan ke nilai sekarang dari akun yang diharapkan memberikan hasil atas pelaksanaan usaha normal. Liabilitas diukur sebesar arus keluar bersih di masa datang yang didiskontokan ke nilai sekarang yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban entitas (usaha normal).

5. Nilai Wajar (*Fair Value*);

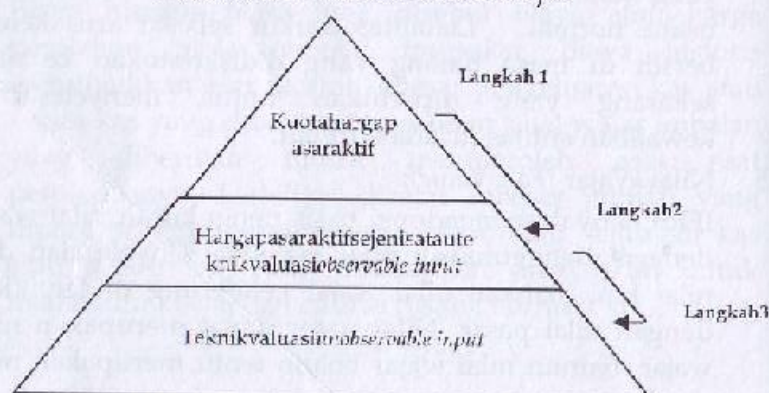
IFRS banyak mengadopsi basis pengukuran nilai wajar dengan menggunakan nilai realisasi/ penyelesaian dan nilai kini, bahkan nilai wajar cenderung diidentikkan dengan nilai pasar. Nilai pasar dapat merupakan nilai wajar, namun nilai wajar belum tentu merupakan nilai

pasar. IASB telah menerbitkan IFRS 3 tentang Pengukuran Nilai Wajar (*Fair Value Measurement*) yang terintegrasi untuk aset dan liabilitas. Namun, IFRS yang diadopsi Indonesia (PSAK Revisi 2009) belum mengatur suatu standar yang secara terintegrasi mengatur pengukuran nilai wajar. Konsep nilai wajar diatur dalam PSAK 16, PSAK 22, PSAK 48, dan PSAK 55.

US-GAAP maupun IFRS menggunakan basis pengukuran yang lazim, yaitu biaya historis, biaya kini, nilai realisasi/penyelesaian, dan nilai sekarang. Sebelum tahun 2000-an, basis pengukuran yang dominan digunakan adalah biaya pengukuran. Memasuki dekade 2000-an, IFRS perlahan-lahan meninggalkan basis pengukuran biaya historis dengan lebih banyak mengadopsi basis pengukuran nilai wajar. Basis pengukuran nilai wajar dipandang lebih independen, namun akan meningkatkan biaya pelaporan keuangan. Penentuan basis pengukuran nilai wajar akan banyak menggunakan bantuan profesi pendukung, seperti analis, appraisal, aktuaris, dan lainnya.

FASB (*Financial Accounting Standard Board*) yang mengeluarkan FAS 157 tentang "Fair Value Measurement", menentukan nilai wajar dengan hirarki piramida berikut ini.

Gambar 2.1 Hirarki Nilai Wajar



Konsep Modal dan Pemeliharaan Modal

Konsep modal dibedakan menjadi dua, yaitu konsep modal keuangan dan modal fisik. Penjelasan kedua konsep tersebut sebagai berikut:

1. Konsep Modal Keuangan (*Financial Capital Maintenance*);
Menurut konsep ini, modal adalah aset bersih atau ekuitas entitas, berupa uang atau daya beli yang diinvestasikan. Pemeliharaan modal keuangan menganggap laba hanya diperoleh bilamana nilai uang (nilai finansial) dari aset bersih pada akhir periode melebihi awal periode, setelah memperhitungkan penysetoran dan penarikan modal pemilik. Pemeliharaan modal keuangan dapat diukur dalam satuan moneter ataupun satuan daya beli yang konstan. Konsep ini seharusnya diterapkan, ketika pihak pengguna laporan keuangan berkepentingan dengan pemeliharaan modal nominal atau daya beli modal yang diinvestasikan.
2. Konsep Modal Fisik (*Physical Capital Maintenance*);
Menurut konsep ini, modal dipandang sebagai kapasitas produksi yang didasarkan pada *output* per hari atau kemampuan entitas untuk memproduksi. Pemeliharaan modal fisik menganggap laba hanya diperoleh jika kapasitas produksi fisik (kemampuan usaha) pada akhir periode melebihi kapasitas produksi fisik pada awal periode, setelah memperhitungkan penysetoran dan penarikan modal pemilik. Konsep modal fisik seharusnya diterapkan, ketika pengguna berkepentingan dengan kemampuan usaha entitas.

Konsep yang dipilih menunjukkan sasaran yang akan dicapai dalam penetapan laba. Pemilihan dasar pengukuran dan konsep pemeliharaan modal akan menentukan model akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan

keuangan. Konsep pemeliharaan modal keuangan mengukur modal dalam satuan moneter nominal, dan mengukur laba berdasarkan kenaikan dalam modal uang nominal selama periode tertentu. Modal keuangan diukur dalam satuan daya beli konstan, maka laba merupakan kenaikan daya beli yang diinvestasikan selama suatu periode tertentu. Laba merupakan kenaikan harga aset yang melebihi kenaikan tingkat harga umum, dan kenaikan lainnya diperlakukan sebagai penyesuaian pemeliharaan modal (bagian ekuitas).

Konsep pemeliharaan modal fisik menganggap semua perubahan harga yang memengaruhi aset dan liabilitas entitas dipandang sebagai perubahan pengukuran kapasitas produksi fisik, jumlahnya merupakan penyesuaian pemeliharaan modal, bagian ekuitas dan bukan merupakan laba. IAS/IFRS menjelaskan kedua konsep pemeliharaan modal tersebut, dan tidak dengan jelas memilih atau mengutamakan satu diantara dua konsep modal yang berbeda tersebut. Dengan demikian, manajemen harus mempertimbangan keseimbangan antara relevansi dan keandalan untuk memilih konsep modal dan pemeliharaan modal untuk kepentingan penyusunan laporan keuangan.

Format Laporan Keuangan

Akun-akun laporan keuangan akan dibahas pada pembahasan bab-bab selanjutnya. Sub pembahasan ini memberikan pengenalan bentuk laporan keuangan beserta akun-akun yang terkandung di dalamnya. Entitas menyajikan informasi-informasi berikut ini dalam laporan keuangan secara jelas dan mengulanginya pada setiap halaman (lampiran) laporan keuangan. Adapun informasi-informasi tersebut sebagai berikut:

1. Nama entitas penyusun/penyaji laporan keuangan;

2. Laporan keuangan satu entitas atau kelompok entitas lain;
3. Tanggal akhir periode pelaporan atau periode yang dicakup;
4. Nomor urut catatan atas laporan keuangan setiap akun-akun laporan keuangan;
5. Mata uang laporan keuangan yang digunakan;
6. Angka pembulatan yang digunakan dalam penyajian jumlah;

Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan atau neraca menunjukkan posisi keuangan, yang meliputi komposisi dan jumlah aset, liabilitas, dan ekuitas entitas tertentu pada suatu tanggal tertentu. PSAK 1 memperkenalkan jenis laporan keenam, laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif dalam hal entitas melakukan retrospektif atau mereklasifikasi akun-akun laporan keuangan. Contoh berikut PT Bukit Asam (Persero) Tbk menyajikan laporan keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2012, dan pada periode tersebut entitas melakukan penerapan kebijakan akuntansi secara retrospektif, maka saat penyajian laporan keuangan yang berakhir 31 Desember 2012 akan menyajikan laporan posisi keuangan 31 Desember 2012 dengan perbandingan 31 Desember 2011 dan 1 Januari 2011. Format laporan posisi keuangan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Ilustrasi 2.1 Laporan Posisi Keuangan, Lampiran 1, Halaman 1:

PT BUKIT ASAM (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 1/1 Schedule

LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011, DAN
1 JANUARI 2011

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali nilai nominal dan data saham)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION

31 DECEMBER 2012 AND 2011, AND
1 JANUARY 2011

(Expressed in millions of Rupiah,
except par value and share data)

	Catatan/ Notes	2012	31 Desember/ December 2011*	1 Januari 2011*	
ASET					ASSETS
ASET LANCAR					CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	7	8.812.034	8.761.291	8.054.075	Cash and cash equivalents
Piutang usaha					Trade receivables
- Pihak ketiga	8	511.319	335.847	182.938	Third parties -
- Pihak yang beresiko	8.33	1.294.207	844.348	514.238	Related parties -
Persediaan	9	765.864	644.833	423.123	Inventory
Biaya dibayar di muka dan uang muka	11	171.465	155.650	63.674	Prepayment and advances
Pajak dibayar di muka					Prepaid taxes
- Pajak penghasilan badan	10a	62.383	7.038	17.054	Corporate income tax -
- Pajak lainnya	10a	35.074	834	278	Other taxes -
Aset keuangan tersedia untuk dijual	16	172.554	39.217	71.422	Available-for-sale financial assets
Aset lancar lainnya	12	43.227	50.339	28.535	Other current assets
Total aset lancar		9.716.397	8.835.146	8.648.875	Total current assets
ASET TIDAK LANCAR					NON-CURRENT ASSETS
Investasi pada entitas asosiasi	13a	531.667	408.383	398.079	Investments in associate
Investasi pada entitas pengendalian bersama	13b	21.551	-	-	Investment in joint venture
Properti pertambangan	14	154.335	174.824	187.542	Mining properties
Aset tetap	15	1.863.447	1.136.424	912.355	Fixed assets
Beban pengembangan tangguhkan	16	704.873	490.922	327.567	Deferred development expenditure
Aset pajak tangguhan	19a	648.064	386.702	318.032	Deferred tax assets
Aset tidak lancar lainnya		57.885	55.054	55.233	Other non-current assets
Total aset tidak lancar		4.610.694	3.855.117	3.072.516	Total non-current assets
TOTAL ASET		13.726.381	11.510.263	8.719.364	TOTAL ASSETS

*Direklasifikasi, lihat Catatan 33

*Reclassified, refer to Note 33

Ilustrasi 2.2 Laporan Posisi Keuangan, Lampiran 1, Halaman 2:

PT BUKIT ASAM (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 1/2 Schedule

LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011, DAN
1 JANUARI 2011

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali nilai nominal dan data saham)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION

31 DECEMBER 2012 AND 2011, AND
1 JANUARY 2011

(Expressed in millions of Rupiah,
except par value and share data)

	Catatan/ Notes	2012	31 Desember/ December 2011*	1 Januari 2011*	
LIABILITAS					LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK					CURRENT LIABILITIES
Utang usaha					Trade payables
- Pihak ketiga	17	129.478	111.834	70.563	Third parties -
- Pihak yang beresiko	17.33	21.365	10.448	3.091	Related parties -
Beban akrual	18a	977.715	995.455	922.180	Accrued expenses
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	18b	231.823	280.175	125.843	Short term employee benefit liabilities
Utang pajak					Tax payables
- Pajak penghasilan badan	19a	50.563	545.518	142.050	Corporate income tax -
- Pajak lainnya	19b	148.240	87.303	88.780	Other taxes -
Pinjaman bank	20	34.015	18.155	13.284	Bank borrowings
Provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang	21	35.613	45.319	37.531	Provision for environmental reclamation and mine closure
Liabilitas imbalan pesakit kerja jangka pendek lainnya	21	98.532	98.978	69.959	Current portion of post-employment benefits obligation
Liabilitas jangka pendek lainnya		4.763	4.185	6.952	Other current liabilities
Total liabilitas jangka pendek		1.770.804	1.610.413	1,133,931	Total current liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG					NON-CURRENT LIABILITIES
Provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang	20	332.437	274.804	174.343	Provision for environmental reclamation and mine closure
Liabilitas imbalan pesakit kerja jangka panjang	21	2,210,991	1,224,515	958,972	Long term portion of post-employment benefits obligation
Pinjaman bank	22	5.879	-	-	Bank borrowings
Total liabilitas jangka panjang		2,451,145	1,420,679	1,133,115	Total non-current liabilities
TOTAL LIABILITAS		4,221,949	3,031,092	2,267,046	TOTAL LIABILITIES

*Direklasifikasi, lihat Catatan 38

*Reclassified, refer to Note 38

Ilustrasi 2.3 Laporan Posisi Keuangan, Lampiran 1, Halaman 3:

PT BUKIT ASAM (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES			
Lampiran 1/3 Schedule			
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011, DAN 1 JANUARI 2011 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali nilai nominal dan data saham)	CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION 31 DECEMBER 2012 AND 2011, AND 1 JANUARY 2011 (Expressed in millions of Rupiah, except par value and share data)		
	Catatan Notes	31 Desember December 2012	1 Januari January 2011
EKUITAS			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Modal saham			
Modal dasar: 1 lembar saham preferen dan 7.000.000.000 lembar saham biasa, modal ditempatkan dan disetor penuh: 1 lembar saham preferen dan 2.001.131.919 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp500 per lembar saham			
24	1.122.065	1.122.065	1.122.065
Tambahan modal disetor	24	50.405	50.405
Saham treasury	25	(120.525)	-
Cadangan perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual	10	5.843	(755)
Defisit penjabaran laporan keuangan anak Saldo laba			
- Dicalonkan	37	8.150.542	4.054.041
- Dalam dicadangkan		2.345.545	2.847.451
		5.415.119	8.095.427
Keperluan non-kependidikan	23a	85.051	75.743
Total ekuitas		5.505.159	5.165.122
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		12.725.694	9.760.384
*) Diklasifikasi, lihat Catatan 36			

Ilustrasi 2.4 Laporan Pendapatan Komprehensif, Lampiran 2, Halaman 1:

PT BUKIT ASAM (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES			
Lampiran 2/3 Schedule			
LAPORAN PENDAPATAN KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali nilai bersih per saham)	CONSOLIDATED STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012 AND 2011 (Expressed in millions of Rupiah, except earnings per share)		
	Catatan Notes	2012	2011
Pendapatan	38	11.524.057	19.581.576
Beban pokok penjualan	39	(6.565.232)	(6.992.500)
Laba bruto		5.058.125	6.279.076
Beban umum dan administrasi, beban penjualan dan pemasaran, Pendapatan lainnya, bersih	28	(945.445)	(637.987)
29	(748.534)	(875.082)	
Laba usaha		2.560.610	3.741.059
Pendapatan keuangan		227.637	408.119
Beban keuangan		(2.845)	(3.240)
Bagian penghasilan bersih dari asosiasi asosiasi		(5.874)	(2.751)
Laba sebelum pajak penghasilan		3.511.567	4.141.122
Beban pajak penghasilan	19c	(1.002.189)	(1.052.054)
Laba tahun berjalan		2.509.421	3.085.044
Laba komprehensif lain			
Perubahan nilai wajar dari aset keuangan tersedia untuk dijual		7.712	(2.205)
Defisit penjabaran laporan keuangan anak		11.297	2.566
Keugian aktuaria dari manfaat pensiun pasokan	21	(197.252)	-
		(85.243)	(119)
Beban pajak penghasilan terkait	12b	115.822	-
Rugi komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak		(440.547)	(119)
Total laba komprehensif tahun berjalan		2.068.874	3.067.940

38

Ilustrasi 2.7 Laporan Arus Kas, Lampiran 4:

PT BUKIT ASAM (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES		Lampiran 4 Schedule	
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI BERSAMA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (Disajikan dalam jutaan Rupiah)		CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH & CASH EQUIVALENTS FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012 AND 2011 (Expressed in millions of Rupiah)	
	2012	2011	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari pelanggan	11.221.536	10.246.420	Cash receipts from customers
Penerimaan operasional lainnya	137.815	137.746	Cash receipts from other operations
Pembayaran royalti	(723.779)	(670.505)	Payments of royalties
Pembayaran kepada pemasok dan karyawan	(3.771.241)	(5.551.005)	Cash paid to suppliers and employees
Pembayaran pajak	(1.401.744)	(928.203)	Payment for taxes
Penerimaan bunga	262.164	324.892	Interest receipts
Pembayaran bunga	(2.649)	(3.243)	Interest paid
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	3.255.701	3.807.892	Net cash provided from operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES
Pembelian aset tetap	(940.207)	(395.263)	Purchases of fixed assets
Pembayaran atas beban pengembangan tangkutan	(237.197)	(176.189)	Payments for deferred development expenditure
Pembelian aset keuangan tersebut untuk dijual	(922.030)	(480.000)	Purchases of available-for-sale financial assets
Penerimaan dari penjualan aset keuangan tersebut untuk dijual	312.845	404.094	Proceeds from disposal of available-for-sale financial assets
Pembelian investasi kepada asosiasi strategis	(124.728)	(138.886)	Acquisition of shares in associates
Pembelian investasi kepada entitas yang dikendalikan bersama	(21.851)	-	Acquisition of interest in joint ventures
Transfer ke kas yang dikelola penggunaannya	(39.832)	-	Transfer to restricted cash
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(1.922.459)	(1.006.264)	Net cash used in investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS FINANSI			CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES
Pembayaran dividen kepada pemegang saham biasa	(1.811.716)	(1.291.751)	Payment of dividends to holders of the parent
Pembayaran dividen kepada kepemilikan non-pengendali	(29.131)	-	Payment of dividends to noncontrolling interest
Penerimaan pinjaman bank	88.080	69.548	Proceeds from bank loans
Pembelian saham dari bank	(109.002)	(61.832)	Repurchases of bank loans
Pembelian saham dari saham beredar	(109.525)	-	Purchases of treasury shares
Pembayaran atas program kemiskinan dan bina lingkungan	(122.433)	(60.355)	Payments for partnership and development program
Transfer ke kas yang dibatasi penggunaannya	(9.833)	-	Transfer to restricted cash
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas keuangan	(1.922.459)	(1.307.940)	Net cash used in financing activities
(PENURUNAN/KENAIKAN PERSAH KAS DAN SETARA KAS	(667.008)	1.798.405	NET (DECREASE)/INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
ARUS SELISIR KURS TERHADAP KAS DAN SETARA KAS	(12.391)	(1.169)	EXCHANGE RATE LOSSES OR GAINS AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE	6.791.251	6.661.278	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	6.111.852	6.168.721	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE PERIOD

Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan PT Bukit Asam (Persero) Tbk tidak dibahas dalam pembahasan buku ini, mengingat jumlah lembarnya mencapai 126 halaman, tetapi pembaca dapat mengakses langsung ke website perusahaan tersebut. Nomor urut catatan atas laporan keuangan PT Bukit Asam (Persero) Tbk ditunjukkan pada kolom catatan (notes) untuk tiap-tiap akun laporan keuangan. Untuk memahami naratif pengungkapan atau catatan atas laporan keuangan, pembaca diharapkan dapat menelusuri langsung pada laporan keuangan yang utuh, akses di website perusahaan yang bersangkutan (*download* di internet).

PSAK 1 menyatakan bahwa catatan laporan keuangan berisi informasi tambahan atas apa yang dihasilkan dalam laporan posisi keuangan, laporan pedapatan komprehensif, laporan laba-rugi terpisah (jika disajikan), laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Catatan tersebut memberikan penjelasan naratif atau rincian akun-akun yang disajikan dalam laporan keuangan, dan informasi mengenai akun-akun yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memuat informasi tentang dasar penyusunan laporan dan kebijakan akuntansi tertentu, informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan namun disyaratkan oleh PSAK, dan memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan namun relevan untuk memahami setiap akun-akun laporan keuangan.

Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis, informasi yang berhubungan ditunjukkan dengan referensi silang atas setiap akun terkait antarkomponen laporan keuangan. Item-item catatan atas laporan keuangan mengikuti urutan akun-akun yang terdapat pada laporan

posisi keuangan, laporan laba-rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Sistematika penyajian catatan atas laporan keuangan meliputi pernyataan atas kepatuhan atas PSAK, ringkasan kebijakan akuntansi signifikan diterapkan (dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi lain), informasi tambahan untuk akun-akun yang disajikan, dan pengungkapan lainnya (tidak terbatas liabilitas kontijensi dan komitmen kontraktual belum diakui, dan pengungkapan informasi non keuangan). Pengungkapan yang terkait dengan kebijakan akuntansi meliputi dasar pengukuran yang digunakan, kebijakan akuntansi yang digunakan, pertimbangan yang dibuat manajemen, sumber ketidakpastian estimasi, informasi pengelolaan permodalan, dan pengungkapan lainnya (penjelasan mengenai entitas dan dividen entitas).

Pertanyaan

Jawablah setiap pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas untuk membuktikan pemahaman teoritis pembahasan bab ini.

1. Laporan keuangan merefleksikan kondisi keuangan entitas bisnis. Jelaskan pengertian dan tujuan laporan keuangan? Uraikan secara lengkap komponen-komponen laporan keuangan?
2. Laporan keuangan memiliki unsur-unsur atau akun-akun utama pembentuk informasi keuangan. Uraikan definisi dan pengakuan akun-akun utama laporan keuangan?
3. Akun-akun laporan keuangan disajikan dalam bentuk satuan unit moneter. Uraikan pengukuran setiap akun-akun utama laporan keuangan? Berikan tanggapannya tentang pengukuran nilai wajar?

4. Pemilihan dasar pengukuran dan konsep pemeliharaan modal akan menentukan model akuntansi penyusunan laporan keuangan. Jelaskan konsep modal dan pemeliharaan modal? Uraikan konsekuensi konsep-konsep modal tersebut terhadap akun-akun laporan keuangan?
5. Catatan atas laporan keuangan menjadi penting keberadaannya dalam memberikan tambahan informasi pada laporan keuangan utama entitas. Uraikan informasi apa saja yang termuat pada catatan atas laporan keuangan? Bagaimanakah struktur catatan atas laporan keuangan?

Latihan

Setiap mahasiswa di kelas mengunjungi *website* entitas-entitas bisnis yang *listing* di bursa efek Indonesia. Mahasiswa melakukan *download* laporan keuangan entitas bisnis yang terbaru. Setiap mahasiswa mempunyai laporan keuangan yang berbeda-beda diantara mereka. Upayakan laporan keuangan tersebut dalam bentuk *hard copy* (*print out*) agar memudahkan membacanya. Selanjutnya, mahasiswa mengikuti petunjuk sebagai berikut:

- a. Amati laporan keuangan mulai dari halaman pertama sampai dengan halaman terakhir;
- b. Baca dan simak sebaik-baiknya surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan;
- c. Baca dan simak sebaik-baiknya laporan auditor independen kepada para pemegang saham;
- d. Baca dan simak sebaik-baiknya akun-akun dan klasifikasi akun-akun laporan keuangan untuk laporan posisi keuangan, laporan pendapatan komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas;

- e. Baca dan telusuri nomor-nomor catatan/*notes* item pengungkapan laporan keuangan pada lampiran catatan atas laporan keuangan;

Instruksi:

1. Tuliskan secara singkat informasi apa saja yang terkandung pada surat pernyataan direksi dan laporan auditor independen?
2. Tuliskan secara singkat informasi apa saja yang terkandung pada setiap laporan keuangan?
3. Temukan sistematika atau struktur penyajian laporan catatan atas laporan keuangan? Lakukan pendalaman pengungkapan untuk dua atau tiga akun tertentu?
4. Diskusikan dan bandingkan laporan keuangan yang Anda miliki dengan salah seorang teman Anda yang memiliki laporan keuangan yang berbeda (sektor usahanya sejenis)? Tuliskan secara singkat hasil komparasi kedua entitas tersebut?

Pengertian dan Komposisi Kas

Salah satu instrumen keuangan klasifikasi aset keuangan adalah kas. Kas tidak diatur secara khusus dalam standar akuntansi, namun secara umum dibahas dalam standar akuntansi tentang instrumen keuangan. Kas merupakan suatu alat pertukaran, dan juga digunakan sebagai ukuran dalam akuntansi. Aset keuangan ini berguna untuk kegiatan rutinitas operasional perusahaan. Aset kas tergolong paling likuid (lancar) karena aset keuangan ini paling sering berubah, dapat digunakan untuk membayar kewajiban perusahaan. Ketersediaan kas menunjang aktivitas operasi perusahaan. Tanpa kas, aktivitas operasi perusahaan tidak dapat berjalan secara efektif. Transaksi kepada pihak luar entitas paling sering melibatkan penyelesaian dengan kas, seperti pembelian secara kredit, pelunasan utang yang jatuh tempo, dan penyelesaian liabilitas-liabilitas lainnya.

Kas merupakan aset paling likuid, namun kas aset tersebut tidak produktif. Dengan demikian, entitas perlu menjaga jumlah kas agar tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar yang dapat mengakibatkan kas menganggur (*idle cash*). Ketersediaan jumlah kas harus sesuai dengan kebutuhan, karena jumlah kas yang terlalu kecil akan mengganggu aktivitas operasi, dan jumlah kas terlalu besar akan menyebabkan tidak efektifnya memperoleh imbal hasil yang tinggi. Daya beli uang dapat saja naik atau turun, namun kenaikan dan penurunan daya beli tersebut tidak akan mengakibatkan penilaian kembali terhadap kas. Kas sebagai alat pembayaran membiayai kegiatan entitas dapat berupa uang kartal yang tersimpan dalam entitas, uang tersimpan

dalam rekening bank, dan kas setara kas. Kas tersebut digunakan tanpa pembatasan atau persyaratan tertentu untuk aktivitas perusahaan.

Kas yang dimiliki untuk tujuan tertentu dan tidak bebas digunakan untuk operasional perusahaan, dan kas yang dicadangkan dengan tujuan penggunaan khusus tidak boleh dikategorikan sebagai kas, tetapi diklasifikasikan sebagai dana cadangan. Dana cadangan yang digunakan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban entitas kurang dari satu tahun dikelompokkan sebagai aset lancar. Sedangkan, dana cadangan dalam bentuk kas untuk kegiatan khusus yang akan digunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Akuntansi memandang kas sebagai alat pertukaran yang dapat diterima untuk pelunasan utang, diterima sebagai setoran ke bank sebesar jumlah nominalnya, disimpan dalam bank atau tempat-tempat lain yang dapat diambil sewaktu-waktu. Biasanya, kas dipersyaratkan dengan batasan dapat diterima sebagai setoran oleh bank sebesar nilai nominalnya. Kas terdiri dari uang kertas, uang logam, cek yang belum disetorkan, simpanan giro atau *bill*, *traveller's checks*, *cashier's checks*, *bank draft*, dan *money order*. Beberapa elemen tertentu yang sepintas mempunyai unsur kas, tetapi tidak dapat digolongkan sebagai kas, yaitu wesel tagih yang diserahkan ke bank untuk ditagihkan disajikan sebagai piutang wesel, cek mundur (*post dated checks*) disajikan sebagai piutang, surat-surat berharga (saham dan obligasi) disajikan sebagai investasi jangka pendek, dan uang kas yang dibatasi penggunaannya disajikan sebagai dana.

Kas dalam mata uang asing tetap disajikan sebagai kas. Uang asing yang dimaksudkan tersebut pada tanggal pelaporan keuangan harus dinyatakan dalam mata uang

pelaporan dengan menggunakan kurs spot yang berlaku pada tanggal neraca. Pada dasarnya kurs mata uang ada tiga jenis, yaitu kurs jual, kurs beli, dan kurs tengah. Untuk kepentingan penyajian kas atas mata uang asing pada tanggal pelaporan dapat menggunakan kurs tengah. Mata uang asing yang kepemilikan untuk tujuan konversi menjadi kas dapat menggunakan kurs beli untuk penyajiannya pada saat pelaporan keuangan.

Kas ekuivalen, atau biasa diistilahkan akun kas setara kas merupakan kategori instrumen keuangan. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid. Untuk dapat digolongkan sebagai kas setara kas, maka harus memenuhi karakteristik dapat dikonversi menjadi kas sebesar jumlah tertentu tanpa risiko perubahan nilai, dan jatuh tempo dalam waktu sesegera mungkin. PSAK 21 tentang Laporan Arus Kas, menjelaskan bahwa deposito berjangka waktu kurang dari 3 bulan serta tidak dijaminakan dan instrumen pasar uang yang diperoleh dan akan dicairkan dalam waktu kurang dari tiga bulan dapat dikategorikan sebagai kas setara kas. Dengan demikian, investasi jangka pendek yang dapat dikonversi menjadi kas, atau jatuh tempo kurang dari tiga bulan termasuk kategori kas setara kas.

Saldo minimum dalam rekening bank (*compensating balance*), yang biasanya timbul dari perjanjian kredit (pinjaman) entitas dengan pihak perbankan. Pinjaman yang diberikan kepada entitas oleh bank terkait tidak semuanya dapat dicairkan, namun harus menyisakan saldo minimum, yang tersedian pada rekening bank tersebut. Saldo minimum tersebut disajikan sebagai aset lancar atau aset tidak lancar tergantung jangka waktu perjanjian pinjamannya. Saldo minimum pinjaman yang bersumber dari kredit jangka panjang, disajikan sebagai aset tidak

lancar, karena saldo minimum tersebut terkendala dengan batasan tidak bebas dipergunakan untuk operasional perusahaan.

Pengendalian Kas

Sifat kas yang mudah dipindahtangankan dan tidak dapat dibuktikan kepemilikannya, sehingga memudahkan kas digelapkan. Selain itu, kas sebagai aset likuid dan banyak menginginkan untuk pemenuhan kebutuhan orang-orang tertentu, sehingga mudah dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab tersebut. Dengan demikian, entitas bisnis perlu merancang pengendalian *intern* yang baik untuk menjaga keamanan aset kas perusahaan, dan terlindung dari penggunaan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Umumnya, pengendalian *intern* kas akan memisahkan fungsi-fungsi penyimpanan, pelaksanaan, dan pencatatan.

Pengendalian *intern* kas dapat saja berbeda-beda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya, sangat tergantung jenis dan bentuk perusahaan itu sendiri. Namun, dasar-dasar pengendalian *intern* kas adalah memisahkan ketiga fungsi yang telah disebutkan sebelumnya. Pengendalian *intern* tersebut dengan cara melakukan pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otorisasi dengan pihak yang bertugas melakukan pembayaran. Pihak yang bertugas melakukan pengelolaan kas dengan pihak yang bertugas melakukan pencatatan kas, pihak pengguna, dan pihak yang melakukan pembayaran kas itu sendiri. Selain itu, penyimpanan kas dilakukan dengan brankas (lemari besi) dengan akses terbatas, penggunaan rekening yang berbeda untuk pengeluaran dan penerimaan kas, pengeluaran kas menggunakan cek melalui bank, penggunaan sistem kas kecil untuk pengeluaran jumlahnya

relatif kecil, dan rekonsiliasi pencatatan perusahaan dengan rekening Koran bank.

Pengendalian *intern* atau sistem pengawasan *intern* kas pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu penerimaan kas dan pengeluaran kas. Penerimaan kas (uang) dapat sumber dari penjualan tunai dan pelunasan piutang atau pinjaman. Prosedur pengawasan terhadap aktivitas penerimaan kas tersebut meliputi fungsi-fungsi penerimaan kas yang jelas, setiap penerimaan kas harus segera dicatat dan disetorkan ke bank, pemisahan fungsi pengelolaan kas dengan fungsi pencatatan kas, dan setiap hari harus menyusun laporan kas. Sedangkan, pengeluaran kas melakukan aktivitas membayar berbagai macam transaksi. Pengawasan pengeluaran kas yang tidak ketat menimbulkan pengeluaran yang diperbesar, atau selisihnya diperuntukkan untuk digelapkan. Prosedur pengawasan pengeluaran meliputi pengeluaran uang menggunakan cek, kecuali pengeluaran kecil (dibayar dari kas kecil), penulisan cek didukung bukti yang lengkap (sistem voucher), pemisahan fungsi pihak yang bertugas mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran dengan pihak yang menulis cek, termasuk pihak yang menandatangani cek dan pengeluaran kas, pemeriksaan dengan jadwal tidak menentu, dan menyusun laporan kas harian.

Kas Kecil

Dana kas kecil merupakan uang kas yang disediakan oleh entitas bisnis yang diperuntukkan membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil. Pengeluaran-pengeluaran yang dimaksudkan tersebut tidak efisien bilamana dibayarkan dengan menggunakan cek. Dana kas kecil dibentuk dengan menyerahkan sejumlah uang kepada kasir kas kecil, yang bertanggung jawab terhadap pembayaran-pembayaran yang jumlahnya relatif

kecil. Jika jumlah dana kas kecil sudah menipis atau anggap kurang, maka kasir kas kecil dapat meminta dana kas kecil ditambahkan. Penambahan dana kas kecil biasanya dilakukan dalam waktu-waktu tertentu, seperti mingguan, atau hitungan jumlah hari tertentu yang kurang dari satu bulan. Pengendalian kas dengan pembentukan kas kecil menggunakan dua metode, yaitu sistem tetap (*imprest system*) dan sistem fluktuasi (*fluctuating system*).

Sistem Imprest

Sistem *imprest* merupakan sistem kas kecil yang menunjukkan jumlah rekening kas kecil yang selalu tetap. Jumlah kas kecil sebesar jumlah uang yang diserahkan kepada kasir kas kecil. Kasir kas kecil menguangkan cek di bank untuk pembentukan kas kecil. Uang tersebut digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil. Kasir kas kecil membuat bukti pengeluaran pada saat melakukan pembayaran kas kecil. Ketika jumlah kas kecil tinggal sedikit, dan juga pada akhir periode, maka kasir kas kecil meminta pengisian kembali kas kecil sesuai dengan jumlah kas kecil yang telah dikeluarkan atau dibayarkan. Kas kecil pada akhir periode perlu diisi kembali untuk dapat mencatatkan pengeluaran-pengeluaran yang telah dilakukan kasir kas kecil. Dengan demikian, jumlah dana kas kecil setelah pengisian kembali akan menunjukkan jumlah yang tetap seperti semula pembentukannya.

Kasir kas kecil menyerahkan bukti-bukti pengeluaran dan menerima cek sebesar pengeluaran yang telah dibayarkan. Pengisian kembali kas kecil tersebut dicatat dengan mendebit akun yang sesuai untuk pengeluaran-pengeluaran kas kecil (bukti pengeluaran), dan akun kreditnya adalah kas. Pencatatan pengeluaran-pengeluaran kas kecil pada saat pengisian kas kecil akan menunjukkan

saldo akun kas kecil tidak akan berubah. Perubahan saldo kas kecil dengan sistem *imprest* dapat terjadi ketika kasir kas kecil melakukan penambahan atau pengurangan kas kecil, atau menyesuaikan kebutuhan saldo kas kecil yang baru, sesuai kebutuhan pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil.

Teknisnya, kasir kas kecil melakukan pengeluaran-pengeluaran dengan menerima bukti-bukti pengeluaran (transaksi). Bukti pengeluaran tersebut disimpan bersama dengan sisa uang yang ada dalam brankas kas kecil (*petty cash*). Kas kecil tidak diperbolehkan digunakan sebagai tempat penukaran cek-cek dari pegawai, untuk menghindari fungsi kas kecil yang salah sebagai tempat meminjam uang. Kasir kecil untuk mengetahui jumlah atau sisa uang yang ada dalam kas kecil, dapat saja menyusun pencatatan kas kecil. Catatan kasir kas kecil tersebut bukan dalam bentuk jurnal, tetapi catatan *intern* saja bagi kasir kas kecil.

Contohnya, PT Sehat Sekali menentukan jumlah kas kecil sebesar Rp 7.500.000. Entitas tersebut menetapkan jumlah kas kecil minimal Rp 500.000. Pada tanggal 1 Desember 2010 membentuk kas kecil sebesar ketentuan yang telah ditetapkan. Adapun jurnal yang disajikan sebagai berikut:

Kas kecil	7,500,000	
Kas di bank		7,500,000

Entitas tersebut menarik cek dari bank untuk dikelola oleh kasir kas kecil. Penggunaan kas kecil mulai dibentuknya sampai tanggal 25 Desember 2010 sebagai berikut:

- Membayar honor pegawai tidak tetap sebesar Rp 1.500.000.
- Membayar biaya listrik sebesar Rp 500.000.

- c. Membeli perlengkapan kantor sebesar Rp 1.000.000
- d. Membayar biaya pengiriman penjualan sebesar Rp 1.500.000
- e. Membayar konsumsi rapat dan pertemuan sebesar Rp 1.000.000
- f. Membayar biaya pemeliharaan kantor sebesar Rp 1.500.000

Pada saat pengeluaran-pengeluaran di atas terjadi, entitas tidak menyajikan jurnal, hanya mengumpulkan dokumen atau bukti pengeluaran, atau mencatat dalam bentuk daftar pengeluaran. Tanggal 25 Desember 2010, entitas tersebut melakukan pengisian kas kecil. Jurnal yang disajikan sebagai berikut:

Deban gaji	1,500,000	
Beban listrik	500,000	
Beban perlengkapan kantor	1,000,000	
Beban pengiriman	1,500,000	
Beban konsumsi	1,000,000	
Beban pemeliharaan kantor	1,500,000	
Kas di bank		7,000,000

Setelah entitas mencatat atau menjurnal pengeluaran-pengeluaran tersebut, saldo kas kecil akan kembali sebesar dana kas kecil yang dibentuk semula, yaitu sebesar Rp 7.500.000.

Kasus tertentu, pada akhir tahun pelaporan keuangan, saldo kas kecil sudah berkurang, namun belum dilakukan pengisian kembali, entitas menyajikan jurnal penyesuaian kas kecil untuk menunjukkan saldo yang

sebenarnya. Setelah awal periode berikutnya, entitas perlu menyajikan jurnal pembalik untuk memudahkan pencatatan berikutnya. Contohnya, kasus di atas, sampai pada tanggal 31 Desember 2010, entitas belum melakukan pengisian kembali kas kecil, jurnal penyesuaian yang disajikan adalah sebagai berikut:

Beban gaji	1,500,000	
Beban listrik	500,000	
Beban perlengkapan kantor	1,000,000	
Beban pengiriman	1,500,000	
Beban konsumsi	1,000,000	
Beban pemeliharaan kantor	1,500,000	
Kas kecil		7,000,000

Akun-akun beban di atas akan ditutup pada akhir periode 2010 dengan jurnal penutup. Setelah jurnal penutup disajikan, saldo akun-akun pengeluaran tersebut menjadi nol. Untuk menjaga konsistensi pencatatan, pada tanggal 1 Januari 2011 disajikan jurnal pembalik. Setelah jurnal pembalik disajikan, saldo kas kecil akan kembali seperti pembentukan semula, dan saldo akun-akun pengeluaran di atas akan bersaldo kredit. Jurnal pembalik yang disajikan sebagai berikut:

Kas kecil	7,000,000	
Beban gaji	1,500,000	
Beban listrik	500,000	
Beban perlengkapan kantor	1,000,000	
Beban pengiriman	1,500,000	
Beban konsumsi	1,000,000	
Beban pemeliharaan kantor	1,500,000	

Seumpamanya, pada tanggal 5 Januari 2011 dilakukan pengisian kembali kas kecil, jurnal yang disajikan seperti jurnal pengisian kas kecil tanggal 25 Desember 2010, jurnal sebelumnya.

Sistem fluktuasi

Sistem fluktuasi menetapkan dana kas kecil sejumlah tertentu sehingga saldonya bervariasi atau berfluktuasi dari waktu ke waktu. Pengisian kembali atau penggantian tidak didasarkan jumlah pengeluaran kas kecil, tetapi sering kali ditetapkan dengan jumlah tertentu. Pembentukan kas kecil dengan metode fluktuasi dilakukan dengan cara yang sama dengan sistem *imprest*. Perbedaannya dengan sistem *imprest* adalah menetapkan saldo akun kas kecil tidak tetap, berfluktuasi sesuai dengan jumlah pengisian kembali dan pengeluaran-pengeluaran dari kas kecil. Sistem *imprest* mencatat pengeluaran-pengeluaran kas kecil pada saat pengisian kembali kas kecil, sedangkan sistem fluktuasi langsung mencatat pengeluaran-pengeluaran kas kecil pada terjadi transaksi pengeluaran tersebut.

Dengan demikian, metode fluktuasi menjadikan buku pengeluaran kas kecil berfungsi sebagai buku jurnal, dan menjadi dasar untuk posting keakun-akun buku besar. Pencatatan dilakukan setiap terjadi pengeluaran, akun kas kecil akan dikredit sebesar jumlah pengeluaran, dan pengisian kembali kas kecil dengan mendebit akun tersebut sebesar uang yang diterima pihak pemegang kas kecil. Contohnya, Tanggal 2 Desember 2010, PT Jati Diri membentuk dana kas kecil sebesar Rp 10.000.000. Adapun jurnal yang disajikan sebagai berikut:

Kas kecil	10,000,000	
Kas di bank		10,000,000

Setelah pembentukan kas kecil tersebut, terjadi transaksi-transaksi pengeluaraannya sebagai berikut:

2010				
Des	4	Membayar biaya angkut pembelian	Rp	2,000,000
	12	Membayar biaya listrik	Rp	1,500,000
	15	Membayar biaya telepon	Rp	500,000
	18	Membayar konsumsi rapat	Rp	1,000,000
	22	Membayar biaya pemeliharaan	Rp	2,000,000
	25	Pengisian dana kas kecil	Rp	5,000,000

Dengan metode fluktuasi, pengeluaran-pengeluaran tersebut langsung di jurnal pada saat terjadinya transaksi pengeluaran. Pengisian kembali kas kecil juga di jurnal pada saat terjadi terjadi pengisian kas kecil. Adapun jurnal yang disajikan pada saat terjadinya transaksi-transaksi di atas sebagai berikut:

2010				
Des	4	Beban angkut	2,000,000	
		Kas kecil		2,000,000
2010				
Des	12	Beban listrik	1,500,000	
		Kas kecil		1,500,000
2010				
Des	15	Beban telepon	500,000	
		Kas kecil		500,000
2010				
Des	18	Beban konsumsi rapat	1,000,000	
		Kas kecil		1,000,000
2010				
Des	22	Beban pemeliharaan	2,000,000	
		Kas kecil		2,000,000
2010				
Des	25	Kas kecil	5,000,000	
		Kas kecil		5,000,000

Apabila jurnal-jurnal di atas diposting ke buku besar akun kas kecil maka saldonya sebesar Rp 8.000.000, seperti ditunjukkan akun kas kecil berikut ini. Saldo awal pembentukan kas kecil tersebut sebesar Rp 10.000.000. Dengan demikian, saldo kas kecil berfluktuasi sesuai

pengeluaran-pengeluaran yang dialokasikan dan pengisian kembali kas kecil. Tidak seperti sistem *imprest*, metode fluktuasi tidak memerlukan jurnal penyesuaian, karena penerimaan (pengisian kembali) dan pengeluaran-pengeluaran kas kecil langsung dicatat pada saat terjadinya.

Ilustrasi 3.1 Kas Kecil

Kas Kecil			
2010		2010	
Des	2	Des	4
	25		12
			15
			18
			22
Saldo			

Untuk kepentingan pengendalian kas, sistem *imprest* menunjukkan pengendalian kas yang lebih baik, karena jumlah dana kas kecil akan terkontrol dan tidak akan terjadi penumpukan dana kas kecil di kasir kas kecil. Selain itu, pengendalian kas juga terjamin, karena setiap pengisian kas kecil akan dilakukan kalkulasi dana kas kecil yang terpakai dan dana kecil yang tersisa, sehingga memudahkan pemantauan pemakaian dana kas kecil, dan memastikan tidak ada uang tunai yang hilang. Berbeda dengan sistem fluktuasi, dana kas kecil di kasir kas kecil tidak dapat terkontrol, karena jumlahnya dapat bertambah terus menerus jika tidak ada pemakaian kas kecil, dan dapat saja kekurangan kas kecil ketika pengeluaran terus menerus dilakukan tanpa pengisian kas yang pasti.

Lazimnya, entitas memiliki saldo kas kecil dalam bentuk mata uang asing. Kas kecil yang ditetapkan dengan

menggunakan mata uang asing, pencatatannya dilakukan dengan menggunakan mata uang fungsional sesuai PSAK 10, yaitu pengaruh perubahan kurs valuta asing. Standar akuntansi ini mengatur bahwa setiap transaksi dengan mata uang asing harus dicatat ke dalam mata uang fungsional dengan menggunakan kurs spot. Kas kecil dalam mata uang asing pada akhir periode pelaporan akan dinyatakan dengan mata uang fungsional dengan kurs spot tanggal pelaporan.

Selisih Kas

Kas merupakan aset dengan ukuran kecil dibandingkan aset-aset lainnya, namun memiliki nilai yang relatif besar. Hal itulah yang memudahkan aset kas ini diselewengkan. Salah satu pengendalian *intern* terhadap kas dengan melakukan *cash-opname*, yaitu menghitung fisik kas (kas kecil), dan membandingkannya dengan saldo kas (kas kecil) yang ada dalam buku besar. *Cash-opname* sering kali menimbulkan atau ditemukan selisih kas, yaitu fisik jumlah kas tidak sama dengan jumlah kas dalam buku besar.

Cash-opname dapat saja menimbulkan selisih lebih maupun selisih kurang. Selisih lebih terjadi jika jumlah kas secara fisik lebih besar dibandingkan dengan jumlah kas yang tercatat dalam buku besar. Sedangkan, selisih kurang terjadi jika jumlah kas secara fisik lebih kecil dibandingkan jumlah kas yang tercatat dalam buku besar. Selisih kas lebih maupun selisih kas kurang disebabkan oleh ketidakteelitian kasir atau kecurangan. Selisih tersebut harus dicatat dan diakui, serta dilaporkan sebagai akun selisih kas. Akun selisih kas akan selalu berubah saldonya, tergantung frekuensi dilakukannya *cash-opname*, dan jumlah temuan selisih kas lebih atau selisih kas kurang. Akun selisih kas bersaldo debit menunjukkan bagian beban yang akan mengurangi laba usaha perusahaan pada tahun bersangkutan. Sedangkan, selisih kas bersaldo kredit

menunjukkan bagian pendapatan yang akan menambah laba usaha perusahaan tahun bersangkutan.

Contoh, internal auditor PT Rendah Hati melakukan *cash-opname* pada kasir yang ada dalam perusahaan tersebut. Akhir Oktober 2010, buku besar kas kecil berjumlah Rp 3.838.000, sedangkan hasil *cash-opname* menemukan uang nilai sebesar Rp 5.383.000. Kondisi ini menunjukkan selisih kas kurang sebesar Rp 455.000. Jurnal yang disajikan atas temuan ini selisih kas kurang ini sebagai berikut:

Selisih kas	455,000	
Kas		455,000

Seumpamanya lagi, akhir Nopember 2010, buku besar kas kecil menunjukkan jumlah Rp 7.630.000, sedangkan hasil *cash-opname* ditemukan uang tunai sebesar Rp 7.880.000. Kondisi ini menunjukkan selisih kas lebih sebesar Rp 250.000. Jurnal yang disajikan atas temuan ini selisih kas lebih ini sebagai berikut:

Kas	250,000	
Selisih kas		250,000

Jika sampai akhir tahun 2010, akun selisih kas di atas bersaldo debit sebesar Rp 205.000 (Rp 455.000 - 250.000), maka selisih kas tersebut menjadi bagian beban yang akan mengurangi laba perusahaan pada periode pelaporan keuangan 2010. Sebaliknya, jika akun selisih kas bersaldo kredit, maka selisih kas tersebut menjadi bagian pendapatan yang akan menambah laba perusahaan pada periode akuntansi tersebut.

Rekonsiliasi Bank

Untuk menjamin keamanan dana entitas bisnis, pihak entitas menggunakan fasilitas penyimpanan dana di perbankan, bahkan untuk pengendalian *intern* kas memerlukan bank sebagai mediator transaksi penerimaan dan pengeluaran kas. Perusahaan yang memiliki rekening di bank, atau menyimpan dananya di bank, akan menerima rekening koran, laporan mengenai arus keluar masuk dana perusahaan di bank selama satu bulan, beserta saldo akhirnya. Walaupun perusahaan menerima rekening koran secara rutin, perusahaan juga melakukan pencatatan arus keluar-masuk dana yang disimpan di bank.

Setiap akhir periode, akun kas akan disajikan pada laporan posisi keuangan. Sebelum menyajikan kas tersebut perlu mengetahui berapa jumlah yang sebenarnya harus disajikan dalam laporan keuangan. Saldo kas menurut catatan perusahaan ditunjukkan pada buku besar kas perusahaan. Sedangkan, saldo kas perusahaan di bank ditunjukkan pada saldo kas menurut akun koran bank. Kedua pencatatan tersebut sering kali terjadi selisih perhitungan atau saldo, sehingga sulit menentukan jumlah yang mana harus disajikan sebagai akun kas pada laporan keuangan, untuk menentukan jumlah pastinya, perusahaan harus mencari penyebab selisih saldo kas (buku besar *versus* akun koran) supaya saldonya menjadi sama.

Rekonsiliasi bank merupakan daftar atau laporan yang berisi penyebab perbedaan selisih saldo kas menurut catatan perusahaan dan menurut catatan bank. Dengan demikian, tujuan rekonsiliasi adalah mencocokkan pencatatan di perusahaan dengan pencatatan kas yang dilakukan oleh bank yang mengelola dana perusahaan. rekonsiliasi sebagai pengendalian *intern* kas perusahaan

karena mengurangi potensi timbulnya kesalahan pencatatan dan juga potensi hilangnya dan perusahaan.

Setiap penerimaan uang di perusahaan akan segera disetorkan ke bank, dan setiap pengeluaran uang (kecuali yang relatif kecil) menggunakan cek, maka akun kas di perusahaan dapat dibandingkan dengan akun koran laporan bank. Rekonsiliasi bank sebaiknya disusun oleh pegawai yang tidak mempunyai kepentingan terhadap kas, karena penyusunan rekonsiliasi dimaksudkan untuk mengecek catatan-catatan kas dan bank. Rekonsiliasi laporan bank adalah merekonsiliasikan catatan perusahaan dan bank, atau membuat perbandingan kedua catatan tersebut untuk mengetahui perbedaan-perbedaannya. Perbandingan ini dilakukan dengan cara, debit akun kas dibandingkan dengan kredit catatan bank yang ditunjukkan pada kolom penerimaan laporan bank. Kredit akun kas dibandingkan dengan debit catatan bank yang ditunjukkan pada kolom pengeluaran laporan bank.

Perusahaan menerima akun koran bank yang berisikan mutasi pencatatan kas oleh bank. Rekonsiliasi tersebut dilakukan dengan membandingkan mutasi kas pada catatan perusahaan dengan mutasi kas catatan akun koran bank. Jika terdapat perbedaan nilai pada kedua mutasi pencatatan tersebut, maka entitas perlu melakukan penyesuaian pencatatan. Transaksi yang hanya ada pada salah satu pihak, maka item transaksi tersebut perlu diteliti lebih lanjut, begitu pula dengan ketidaksesuaian besaran jumlah atau nilai yang dicatat pada mutasi pencatatan tertentu.

Secara umum, hal-hal yang menyebabkan perbedaan pencatatan yang dimaksudkan di atas, dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Penerimaan sudah dicatat oleh perusahaan tetapi bank belum mencatatnya. Kategori ini meliputi setoran yang dikirimkan ke bank pada akhir periode tetapi belum diterima oleh bank sampai periode waktu berikutnya (setoran dalam perjalanan), setoran yang diterima oleh bank pada akhir periode tetapi dilaporkan pada periode berikutnya (setoran dalam perjalanan), dan uang tunai yang tidak atau belum disetorkan ke bank.
- b. Penerimaan sudah dicatat oleh bank tetapi perusahaan belum mencatatnya. Kategori ini meliputi bunga yang diperhitungkan bank terhadap simpanan (jasa giro) dan penagihan wesel oleh bank sebagai penerimaan tetapi perusahaan belum mencatatnya.
- c. Pengeluaran sudah dicatat oleh perusahaan tetapi bank belum mencatatnya. Kategori ini meliputi cek-cek yang beredar sudah dicatat sebagai pengeluaran kas tetapi penerimanya belum menguangkan di bank, dan cek yang sudah ditulis dan sudah dicatat dalam jurnal pengeluaran kas tetapi ceknya belum diserahkan kepada yang dibayar.
- d. Pengeluaran sudah dicatat oleh bank tetapi perusahaan belum mencatatnya. Kategori ini meliputi cek-cek dari langganan yang ditolak oleh bank (cek kosong), bunga yang diperhitungkan *overdraft* (saldo kredit kas), dan biaya jasa bank yang belum dicatat perusahaan.
- e. Kesalahan mencatat yang dilakukan pihak bank dan pihak perusahaan. Kesalahan yang dilakukan pihak bank perlu pembetulan atas kesalahan tersebut. Kesalahan yang dilakukan pihak perusahaan perlu pembetulan atas kesalahan tersebut. Kesalahan yang dilakukan oleh pihak bank, mengharuskan perusahaan untuk melaporkan kesalahan tersebut kepada bank, sehingga bank dapat menindaklanjuti kesalahan

tersebut dengan melakukan koreksi pada periode berikutnya.

Contoh, data yang diperoleh dari catatan PT Indah Jaya pada tanggal 31 Desember 2010 sebagai berikut:

Dari laporan bank:

Saldo akhir	Rp 7,383,600
Jasa giro	252,600
Biaya bank	175,000
Cek dari langganan tidak cukup dananya	1,250,000
Salah mencairkan cek (cek dari entitas lain)	175,000

Dari laporan entitas:

Saldo akhir	Rp 7,083,000
Setoran dalam perjalanan	1,200,000
Kas belum disetor	350,000
Cek untuk bayar utang Rp 141.000 dicatat Rp 414.000	273,000
Penerimaan Rp 596.000 dicatat Rp 968.000	372,000
Cek-cek masih beredar:	
No. 7021	1,600,000
No. 7088	750,000
No. 8021	1,220,000

Berdasarkan data di atas, laporan rekonsiliasi saldo bank dan saldo kas untuk menunjukkan saldo yang benar ditunjukkan sebagai berikut:

Ilustrasi 3.2 Rekonsiliasi Bank

PT Indah Jaya
Rekonsiliasi Bank Merdeka
Tertanggal 31 Desember 2010

Saldo per laporan bank	7.283.600	Saldo kas	7.083.000
Ditambah:		Ditambah:	
Seroran dalam perjalanan	1.200.000	Jasa giro	252.600
Kesalahan bank	175.000	Kesalahan pencatatan	273.000
Kas belum dibayar	350.000		252.600
	<u>1.725.000</u>		<u>252.600</u>
	9.008.600		7.538.600
Dikurangi:		Dikurangi:	
Cek-cek masih beredar:		Biaya bank	175.000
No. 7021	1.600.000	Cek kosong	1.250.000
No. 7088	750.000	Kesalahan Pencatatan	372.000
No. 8021	1.220.000		<u>1.797.000</u>
	<u>3.570.000</u>		
Saldo bank yang benar	5.538.600	Saldo kas yang benar	5.538.600

Berdasarkan hasil rekonsiliasi atau laporan rekonsiliasi bank, jurnal penyesuaian yang disajikan sebagai berikut:

Kas	252.600	
Pendapatan bunga		252.600
Kas	273.000	
Utang usaha		273.000

Beban administrasi bank	175.000	
kas		175.000
Piutang usaha	1.622.000	
Kas		1.622.000

Sesudah jurnal-jurnal di atas diposting keakun masing-masing, maka akun kas yang akan di sajikan pada laporan posisi keuangan atau neraca sebesar Rp 5.538.600. Rekonsiliasi bank ini juga merupakan pembuktian dalam pengauditan, karena rekonsiliasi ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi perbedaan antara saldo kas menurut catatan bank dengan saldo kas menurut catatan entitas. Dalam proses audit, rekonsiliasi pembuktian ini tidak lagi dimaksudkan untuk menentukan saldo kas dalam laporan keuangan.

Pertanyaan

Jawablah setiap pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas untuk membuktikan pemahaman teoretis pembahasan bab ini.

1. Kas merupakan aset yang paling likuid dan paling mudah diselewangkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Uraikan pengendalian *intern* kas untuk menjamin keandalan kas tersebut?
2. Secara umum terdapat dua sistem pengelolaan dan pencatatan kas kecil. Sebutkan kedua sistem pengelolaan kas kecil tersebut? Uraikan perbedaan pencatatan untuk kedua sistem kas kecil tersebut?
3. Salah satu unsur pengendalian *intern* atas kas adalah *cash-opname* untuk membandingkan fisik kas dengan

saldo kas berdasarkan buku besar. Jelaskan perlakuan akuntansi atas saldo akun selisih kas?

4. Setiap penerimaan uang oleh entitas langsung disetorkan ke bank dan setiap pengeluaran uang menggunakan cek sehingga saldo kas dapat dibandingkan dengan laporan bank. Uraikan hal-hal yang dapat membedakan kedua pihak yang melakukan pencatatan tersebut?
5. Rekonsiliasi bank merupakan laporan yang memuat berbagai penyebab perbedaan selisih saldo kas menurut catatan entitas dan menurut catatan bank. Jelaskan mekanisme perbandingan dan pencocokan catatan entitas dengan catatan bank?

Latihan

1. Awal tahun 2011, PT Mitra Ria membentuk dan menetapkan dana kas sebesar Rp 4.500.000, yang akan diisi kembali setiap tanggal 2 dan tanggal 17 setiap bulannya. Transaksi kasir kas kecil selama bulan Desember 2011 adalah sebagai berikut:

2011				
Des	5	Membeli kertas dan tinta print	Rp	175,000
	7	Membayar listrik dan telepon	Rp	1,350,000
	11	Membayar perbaikan kendaraan	Rp	450,000
	12	Membayar biaya konsumsi rapat	Rp	350,000
	14	Membayar biaya kirim penjualan	Rp	1,250,000
	20	Membayar biaya cetak	Rp	650,000
	25	Membayar tagihan	Rp	1,750,000
	27	Membeli perlengkapan kantor	Rp	1,005,000

Instruksi:

- a. Kalkulasi saldo kas kecil sesaat setelah pengisian kembali (sistem *imprest* dan sistem fluktuasi)?
- b. Sajikan jurnal yang dibutuhkan untuk mencatat transaksi kas kecil tersebut (sistem *imprest* dan sistem fluktuasi)?
- c. Untuk sistem *imprest*, sajikan pencatatan kas kecil pada akhir tahun 2011 dan awal tahun berikutnya?

Pada tanggal 31 Desember 2010, berdasarkan catatan PT Gaya Santai saldo giro di bank berjumlah Rp. 15.708.000,- sedangkan berdasarkan pada rekening koran/laporan bank yang diterima saldonya berjumlah Rp. 21.277.000,-. Adapun perbedaan-perbedaan yang terjadi disebabkan sebagai berikut:

- a. Penagihan piutang melalui bank dengan rincian: jumlah piutang Rp. 7.000.000,- dan biaya penagihan Rp. 42.000,- selisihnya ditambahkan dalam rekening bank.
- b. Perusahaan mengeluarkan *check* untuk pelunasan utangnya kepada CVRasa Nyaman sebesar Rp. 3.400.000,- oleh petugas pembukuan salah dicatat menjadi Rp. 4.300.000,- *check* itu telah diuangkan.
- c. Perusahaan telah menarik *check* (membuat *check*) sebesar Rp. 1.050.000,- sampai tanggal penutupan buku belum diuangkan oleh penerimanya.
- d. Diterima pembayaran dari pelanggan Rp. 2.625.000,- dan telah disetor ke bank, tetapi bank belum melakukan pencatatan.
- e. Perusahaan telah menerima pelunasan dari langganan Rp. 1.400.000,- dan disetor ke bank, *check*

tersebut ditolak oleh bank dan penolakan belum diketahui oleh perusahaan.

- f. Bank telah memberikan bunga Rp. 63.000,- kepada perusahaan sehubungan dengan rekening simpanannya, perhitungan bunga belum dilaporkan kepada perusahaan.
- g. Pembebanan biaya buku *check*, giro dan lain-lain sebesar Rp. 7.000,- telah dilakukan oleh bank untuk debit rekening perusahaan, pembebanan ini belum tercatat pada perusahaan.
- h. Petugas bank telah membuat kesalahan dalam mencatat *check-check* yang bernilai Rp. 700.000,- hanya dicatat Rp. 70.000,-

Instruksi:

- a. Susunlah laporan rekonsiliasi saldo bank dan saldo kas untuk menunjukkan saldo yang benar?
- b. Sajikan pencatatan (jurnal) yang diperlukan?

Pengertian dan Jenis-jenis Piutang

Salah satu konsekuensi penerapan basis akrual dalam akuntansi adalah pencatatan transaksi tidak secara tunai. Piutang usaha (dagang) menunjukkan sejumlah klaim suatu perusahaan kepada pihak lain atas penjualan barang-barang atau jasa-jasa secara kredit. Piutang yang timbul tidak berasal dari penjualan barang-barang atau jasa-jasa yang dihasilkan perusahaan tidak termasuk kategori piutang usaha. Dengan demikian, istilah piutang didefinisikan klaim suatu perusahaan kepada pihak lain, atau sejumlah uang (tunai) yang dapat ditagih dari pihak-pihak tertentu.

Piutang sudah menjadi bagian dari kegiatan normal entitas bisnis. Piutang kepada pihak lain atau entitas bisnis lainnya mitra perusahaan timbul dari transaksi penjualan/pendapatan ataupun piutang yang berasal dari transaksi lainnya. Akun piutang merupakan bagian dari aset lancar, sehingga piutang dagang atau piutang lainnya yang termasuk kategori ini akan memperoleh pelunasan dalam jangka waktu kurang dari satu tahun, atau satu siklus operasi perusahaan. Piutang yang pelunasannya atau jatuh temponya lebih dari satu tahun diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar, atau disajikan setelah aset tetap.

Jenis-jenis piutang sangat tergantung dari klasifikasi usaha entitas bisnis. Jenis piutang yang timbul dari aktivitas bisnis perusahaan dagang atau manufaktur disebut piutang usaha. Entitas perbankan yang menyalurkan pinjaman atau kredit kepada pihak lain juga dikenal dengan piutang. Pembiayaan oleh perusahaan selain entitas perbankan juga mengklasifikasikan piutang berdasarkan jenis pembiayaan,

seperti piutang pembiayaan sewa, piutang pembiayaan kartu kredit, pembiayaan produk tertentu, dan sebagainya.

Selain itu, bentuk klaim kepada pihak lain dapat menentukan jenis piutang. Klaim yang didasarkan perjanjian utang-piutang tidak secara tertulis, biasanya hanya didasarkan faktur (*invoice*) transaksi penjualan disebut piutang dagang (*account receivable*). Sedangkan, klaim yang didasarkan perjanjian utang-piutang secara tertulis disebut wesel tagih (*promissory notes*). Secara umum jenis-jenis piutang diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu: 1) piutang usaha, 2) wesel tagih, dan 3) piutang-piutang lain.

Piutang dagang merupakan piutang yang terbesar dimiliki perusahaan. Jenis piutang ini, yang timbul akibat penjualan barang dan jasa biasanya akan tertagih dalam jangka waktu 30 sampai 60 hari. Piutang dagang biasanya tidak mensyaratkan pembebanan bunga, karena pertimbangan jangka waktu pelunasannya yang singkat. Selain itu, bebas pembebanan bunga karena kelaziman kebijakan kredit perusahaan.

Wesel tagih merupakan klaim perusahaan kepada pihak ketiga yang didukung janji tertulis untuk membayar dalam jangka waktu tertentu. Biasanya, wesel tagih memiliki waktu tagih antara 60 sampai 90 hari, atau lebih lama, serta mewajibkan pihak terutang untuk membayar bunga. Piutang usaha yang sudah jatuh tempo, dan pihak terutang tidak mampu melunasinya biasanya dialihkan menjadi wesel tagih. Wesel tagih yang diakibatkan dari penjualan biasanya diklasifikasikan sebagai piutang usaha.

Piutang yang tidak terkait dengan penjualan atau pendapatan disebut piutang-piutang lain atau piutang lainnya (*other receivables*). Contohnya, piutang karyawan, piutang bunga, piutang dividen, piutang pajak, piutang klaim asuransi, piutang jaminan pelanggan, dan piutang-

piutang yang tidak berasal dari operasional perusahaan. Biasanya, porsi piutang ini tidak signifikan dibandingkan jumlah piutang usaha.

Pengakuan Piutang

Piutang usaha jarang sekali memperhitungkan bunga dari piutang. Jarak waktu antara piutang dan pembayaran (pelunasan) relatif pendek, sehingga bunga yang diperhitungkan tidak signifikan (relatif kecil). Dengan kata lain, nilai kini dari piutang tersebut semakin mendekati nilai piutang saat terjadinya transaksi piutang. Sementara itu, PSAK 55 mensyaratkan piutang diakui oleh entitas bisnis sebesar nilai wajar. Nilai wajar adalah harga perolehan atau harga pertukaran antara debitur dan kreditur pada tanggal transaksi.

Nilai pertukaran (nilai wajar) dipengaruhi oleh hubungan relasi kedua belah pihak, yang tentunya piutang pihak yang terlibat relasi perlu diungkapkan secara khusus. Debitur seharusnya mengukur piutang sebesar nilai kini dari kas yang akan diterima di masa datang (*present value/discounted of future cash flow*). Piutang yang jatuh temponya dalam jangka panjang, maka perusahaan mencatat piutang sebesar nilai kini dari kas masa datang. Piutang jangka panjang yang tidak berbunga, maka penghitungannya menggunakan tingkat suku bunga *risk free* ditambah *risk premium*. Asumsinya, jika entitas berutang harapannya adalah menambah modal kerja, perolehan utang tersebut disertai dengan tingkat suku bunga. Sehingga, jika terjadi pelunasan piutang, maka tidak perlu menambah utang untuk modal kerja.

Wesel tagih merupakan jenis utang yang memiliki nilai wajar. Penentuan nilai wajar dilakukan saat pengukuran awal transaksi, dan pengukurannya pun harus

dilakukan secara konsisten, dengan menggunakan nilai wajar tersebut. Sebaliknya, jika saat awal transaksi tidak menggunakan nilai wajar, maka selanjutnya tidak boleh menggunakan nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat perubahan nilai wajar piutang disajikan pada laporan laba-rugi.

Biaya Transaksi Perolehan Piutang

Biaya transaksi merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh piutang. Perolehan piutang usaha tidak menimbulkan biaya transaksi. Piutang usaha hanya terkait dengan penjualan atau pendapatan yang diperoleh perusahaan. Beda dengan piutang pemberian pinjaman (kredit) yang disalurkan perbankan atau lembaga keuangan, akan menimbulkan biaya transaksi untuk perolehan piutang. Nilai biaya transaksi akan menambah piutang, dan mempengaruhi tingkat suku bunga efektif yang dikenakan.

Contoh biaya transaksi mengurangi pinjaman, Bank Diana memberikan pinjaman kepada PT Jujur sebesar Rp 1.543.261.200 dengan tingkat bunga 9%. Bunga dibayarkan setiap akhir tahun sebesar bunga berdasarkan saldo kredit dalam kontrak. Pelunasan kredit dilakukan pada akhir tahun ke lima. Bank Diana membebankan biaya administrasi sebesar Rp 73.261.500. Biaya administrasi tersebut disepakati mengurangi jumlah pinjaman yang akan diterima PT Jujur. Tingkat suku bunga efektif dihitung sebesar 10%.

Pinjaman yang diberikan	1.470.000.000	
Kas		1.470.000.000

Pinjaman yang diberikan berkurang sebesar Rp 1.543.261.200 – Rp 73.261.500 = Rp 1.470.000.000. Angsuran bunga sebesar $8\% \times \text{Rp } 1.543.261.200 = \text{Rp } 135.000.000$.

Bunga sebesar $10\% \times \text{Rp } 1.470.000.000 = \text{Rp } 147.000.000$. Pokok pinjaman sebesar $\text{Rp } 135.000.000 - \text{Rp } 147.000.000 = \text{Rp } 12.000.000$. Nilai akhir pinjaman sebesar $\text{Rp } 147.000.000 + \text{Rp } 12.000.000 = \text{Rp } 1.482.000.000$. Nilai akhir pinjaman tahun tertentu akan menjadi nilai awal pinjaman tahun berikutnya. Dan seterusnya, perhitungannya dilakukan sampai akhir tahun ke lima, seperti ditunjukkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.1 Nilai Pinjaman

Tahun	Nilai Awal Pinjaman	Angsuran Bunga	Bunga	Pokok Pinjaman	Nilai akhir Pinjaman
1	1.470.000.000	135.000.000	147.000.000	12.000.000	1.482.000.000
2	1.482.000.000	135.000.000	148.200.000	13.200.000	1.495.200.000
3	1.495.200.000	135.000.000	149.520.000	14.520.000	1.509.720.000
4	1.509.720.000	135.000.000	150.972.000	15.972.000	1.525.692.000
5	1.525.692.000	135.000.000	152.569.200	17.569.200	1.543.261.200

Jurnal pembayaran bunga akhir tahun pertama dan amortisasi biaya transaksi disajikan sebagai berikut:

Kas	135.000.000	
Pinjaman yang diberikan	12.000.000	
Kas		147.000.000

Contoh biaya transaksi menambah pinjaman, Bank Diana memberikan pinjaman kepada PT Jaya sebesar Rp 150.000.000 dengan tingkat bunga 10%. Bunga dibayarkan setiap akhir tahun, dan pinjaman dilunasi setiap akhir tahun sebesar Rp 50.000.000. Bunga dihitung berdasarkan saldo kredit. Bank Diana membebankan biaya langsung sebesar Rp 3.861.643. Biaya tersebut dibayarkan langsung oleh Bank

Diana, PT Jaya menerima pinjaman (kredit) tersebut tanpa pemotongan biaya administrasi tersebut. Tingkat suku bunga efektif dihitung sebesar 9%.

Pinjaman yang diberikan	53,861,643
Kas	53,861,643

Pinjaman yang diberikan bertambah sebesar Rp 150.000.000 + Rp 3.861.643 = Rp 153.861.643. Angsuran bunga sebesar Rp 50.000.000 + (10% x Rp 150.000.000) = Rp 65.000.000. Bunga sebesar 9% x Rp 153.861.643 = Rp 13.847.548. Pokok pinjaman sebesar Rp 65.000.000 - Rp 13.847.548 = Rp 51.152.452. Nilai akhir pinjaman sebesar Rp 153.861.643 - Rp 51.152.452 = Rp 102.709.191. Nilai akhir pinjaman tahun tertentu akan menjadi nilai awal pinjaman tahun berikutnya. Dan seterusnya, perhitungannya dilakukan sampai akhir tahun ke tiga, seperti ditunjukkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.2 Nilai Pinjaman Biaya Transaksi

Tahun	Nilai Awal Pinjaman	Angsuran Bunga	Bunga	Pokok Pinjaman	Nilai akhir Pinjaman
1	153,861,643	65,000,000	13,847,548	51,152,452	102,709,191
2	102,709,191	60,000,000	9,216,735	51,793,265	50,925,926
3	50,925,926	55,000,000	4,074,074	50,925,926	0

Jurnal pembayaran bunga akhir tahun pertama, pembayaran bunga, dan angsuran pertama disajikan sebagai berikut:

Kas	65,000,000
Pinjaman yang diberikan	51,152,452
Pendapatan bunga	13,847,548

Jurnal seperti itu dilakukan setiap akhir tahun sampai pelunasan sesuai tabel yang disajikan sebelumnya. Adapun jurnal pembayaran bunga akhir tahun ketiga, pembayaran bunga, dan pelunasan disajikan sebagai berikut

Kas	55,000,000
Pinjaman yang diberikan	50,925,926
Pendapatan bunga	4,074,074

Diskon Penjualan

Selain biaya transaksi, perusahaan juga memberikan diskon atau potongan harga ataupun kuantitas. Potongan penjualan dalam bentuk harga dan kuantitas akan mempengaruhi pencatatan pendapatan. Namun, tidak mempengaruhi pencatatan piutang. Piutang dicatat sebesar nilai setelah dikurangi dengan diskon, atau nilai tersebut merupakan harga wajar perolehan piutang. Sementara itu, pendapatan diakui sebesar nilai setelah diskon atau potongan harga (kuantitas).

Diskon dapat saja dalam bentuk potongan penjualan karena pembayaran dari pelanggan lebih cepat dari waktu jatuh temponya piutang. Hal tersebut ditandai dengan termin penjualan yang dinyatakan dalam kontrak penjualan. Termin tersebut dalam bentuk 2/10, n/45, artinya piutang berjangka waktu (jatuh tempo) 45 hari dari tanggal transaksi, dan jika pelanggan melunasi/membayar dalam jangka

waktu 10 hari dari tanggal transaksi, maka akan memperoleh diskon penjualan sebesar 2%.

Pencatatan diskon penjualan dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode piutang neto (*net method*) dan metode piutang bruto (*gross method*). Metode neto mengasumsikan diskon dimanfaatkan oleh pembeli, sehingga penjualan dan piutang dicatat sebesar jumlah yang telah dikurangi dengan diskon. Jika pembayaran piutang yang dilakukan dalam periode diskon, maka piutang tersebut dilunasi sebesar nilai setelah diskon. Sebaliknya, piutang yang dilunasi di luar periode diskon, maka diskon yang telah diperkurangkan sebelumnya menjadi hangus (tidak dimanfaatkan). Diskon yang hangus dikelompokkan sebagai pendapatan-pendapatan lain.

Contoh, penjualan sebesar Rp 10.000.000 dengan termin 2/10, n/45.

Piutang dagang	10,000,000	
Penjualan		10,000,000

Pembayaran dalam periode diskon:

Kas	9,800,000	
Diskon penjualan	200,000	
Piutang dagang		10,000,000

Pembayaran di luar periode diskon:

Kas	10,080,000	
Piutang dagang		10,000,000

Sedangkan, metode piutang bruto, mencatat piutang dagang pada saat penjualan sebesar nilai penjualan tanpa pengurangan diskon. Nilai diskon dicatat saat pelanggan membayar pada periode diskon. Pelanggan yang membayar di luar periode diskon tidak akan melakukan pencatatan diskon. Nilai penjualan disajikan sebesar nilai penjualan bruto dikurangi nilai diskon yang terealisasi. Berbeda dengan metode netto, penjualan akan disajikan sebesar nilai setelah diskon, baik terealisasi maupun yang tidak terealisasi.

Contoh, penjualan sebesar Rp 10.000.000 dengan termin 2/10, n/45.

Piutang dagang	9,800,000	
Penjualan		9,800,000

Pembayaran dalam periode diskon:

Kas	9,800,000	
Piutang dagang		9,800,000

Pembayaran di luar periode diskon:

Kas	10,000,000	
Diskon tidak dimanfaatkan		200,000
Piutang dagang		9,800,000

Pengukuran setelah tanggal perolehan membutuhkan perhitungan amortisasi diskon dan premium setiap tanggal pelaporan. Amortisasi dimaksudkan untuk menyesuaikan nilai tercatat piutang, yang menunjukkan biaya perolehan yang diamortisasi. Pinjaman dengan pembebanan bunga biasanya dilakukan oleh lembaga perbankan atau lembaga keuangan. Sementara untuk entitas yang bukan perbankan atau lembaga keuangan, biasanya dalam bentuk wesel tagih jangka panjang.

Contoh, PT Jujur memberikan pinjaman kepada PT Jaya sebesar Rp 150.000.000 berbunga 10% per tahun yang akan dibayarkan setiap akhir tahun. Pinjaman tersebut akan diangsur selama 3 tahun masing-masing Rp 50.000.000. Biaya transaksi yang dibebankan langsung sebesar Rp 2.603.650. Biaya tersebut dikeluarkan PT Jujur, dan tidak mengurangi kredit yang disalurkan.

Pinjaman yang diberikan	152,603,650
Kas	152,603,650

Perusahaan harus menghitung tingkat suku bunga efektif dari pinjaman tersebut. Tingkat suku bunga efektif yang dihitung sebesar 9%. PT Jaya membayar bunga berdasarkan tingkat suku bunga yang ditetapkan sebelumnya sebesar 10%. Tabel angsuran dan pembayaran bunga ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.3 Angsuran dan Pembayaran Bunga

Tahun	Nilai Pokok	Bunga	Angsuran	Total Pembayaran	PV i=9%
	152,603,650				
1		15,000,000	50,000,000	65,000,000	59,632,950
2		10,000,000	50,000,000	60,000,000	50,500,800
3		5,000,000	50,000,000	55,000,000	42,469,900
					152,603,650

Tabel amortisasi pinjaman setelah memperhitungkan biaya transaksi sebagai berikut:

Tabel 4.4 Amortisasi Pinjaman

Tahun	Pokok Utang	Bunga Dibayar	Angsuran dibayar	Bunga Efektif	Amortisasi
	152,603,650				
1	141,337,979	15,000,000	50,000,000	13,734,329	1,265,672
2	50,458,397	10,000,000	50,000,000	9,120,418	879,582
3	0	5,000,000	50,000,000	4,541,256	458,744

Jurnal saat membayar bunga pada akhir tahun pertama:

Kas	65,000,000
Pendapatan bunga	13,734,329
Pinjaman yang diberikan	51,265,672

Jurnal saat membayar bunga pada akhir tahun kedua:

Kas	60,000,000	
Pendapatan bunga		9,120,418
Pinjaman yang diberikan		50,879,582

Wesel Tagih

Wesel tagih (*notes receivables*) merupakan klaim perusahaan kepada pihak ketiga yang disertai dengan janji tertulis untuk membayar dalam jangka waktu tertentu. Wesel tagih dibuat oleh pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak lainnya, ditandatangani oleh pihak pembuatnya, untuk membayar sejumlah uang atas permintaan pada tanggal yang ditetapkan di masa yang datang kepada pihak yang memerintahkan. Janji tertulis dalam lembar surat berharga tersebut memuat tanggal penerbitan, tanggal pembayaran, jumlah nominal, tingkat bunga, pihak yang akan membayar, dan bank yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran.

Wesel tagih diklasifikasikan menjadi dua, yaitu wesel tagih dengan bunga dan wesel tagih tidak bunga. Wesel tagih dengan bunga, pencatatan akan dilakukan pada saat penerimaan wesel, pengakuan bunga, dan pelunasan wesel. Wesel ini harus memperhitungkan bunga pendapatan bunga yang seharusnya diterima, dan akan menambah kas. Saat pembayaran bunga, pihak penerima akan menerima pendapatan bunga penuh sesuai jangka waktu wesel tagih. Sedangkan, wesel tagih tanpa bunga biasanya dijual dengan lebih rendah dari nilai nominal (diskon), pihak penerbit akan menerima uang lebih kecil dari jumlah yang akan dibayarkan di masa datang.

Contoh, Tanggal 2 Oktober 2012, PT Jujur menerima wesel tagih dari PT Adi untuk melunasi piutang dagang yang telah jatuh tempo. Wesel tagih tersebut memiliki nilai nominal Rp 10.000.000, bunga 10%. Wesel tagih tersebut berjangka waktu 120 hari. Wesel tagih tersebut jatuh tempo tanggal 30 Januari 2012.

Tabel 4.5 Jangka Waktu Wesel

Bulan	Jumlah Hari	Jangka Waktu
Oktober	31	29
Nopember	30	30
Desember	31	31
Januari	31	30
Jumlah		120

Jurnal yang disajikan PT Jujur sebagai berikut:

Wesel tagih	10,000,000	
Piutang wesel		10,000,000

Jurnal penyesuaian bunga berjalan (2 Oktober - 31 Desember 2012) sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Bunga berjalan} &= \text{Rp } 10.000.000 \times 10\% \times 90/360 \\ &= \text{Rp } 250.000\end{aligned}$$

Piutang bunga	250,000	
Pendapatan bunga		250,000

Jurnal yang disajikan saat pelunasan wesel tagih sebagai berikut:

Bunga 1 Januari – 30 Januari 2012

$$= \text{Rp } 10.000.000 \times 10\% \times 30/360 = \text{Rp } 83.333$$

Pokok wesel tagih = Rp 10.000.000

Bunga, $\text{Rp } 10.000.000 \times 10\% \times 120/360 = \text{Rp } 333.333$

Jumlah kas yang diterima = Rp 10.333.333

Kas	10.333.333	
Pendapatan bunga		83.333
Piutang bunga		250.000
Wesel tagih		10.000.000

Wesel tagih jangka panjang digunakan untuk membayar penjualan, maka nilai penjualan tidak dicatat sebesar nilai nominalnya tetapi dicatat sebesar nilai kini pembayaran kas di masa datang. Pelunasan atas pendapatan ditangguhkan harus memisahkan komponen pendapatan dan bunga.

Contoh, tanggal 2 Januari 2012, PT Jujur menjual tanah kepada PT Alam dengan menerbitkan wesel tagih dengan nominal Rp 1.000.000.000, wesel tersebut jatuh tempo 3 tahun di masa datang. Nilai nominal tersebut telah memperhitungkan jangka waktu pembayaran yang akan dilakukan 3 tahun yang akan datang. Bunga pasar yang berlaku sebesar 12%. Nilai tanah yang tercatat oleh PT Jujur sebesar Rp 550.000.000.

Nilai kini wesel tagih (nilai wajar tanah) sebesar:

$$\text{Rp } 1.000.000.000 \times 0,71178 \text{ (Pv r=3, i=12\%)} = \text{Rp } 711.780.000$$

Diskon atas wesel tersebut sebesar:

$$\text{Rp } 1.000.000.000 - \text{Rp } 711.780.000 = \text{Rp } 288.220.000$$

Keuntungan penjualan tanah sebesar:

$$\text{Rp } 711.780.000 - \text{Rp } 550.000.000 = \text{Rp } 161.780.000$$

Jurnal yang disajikan saat penjualan tanah adalah:

Wesel tagih	1.000.000.000	
Tanah		550.000.000
Diskon		288.220.000
Keuntungan penjualan tanah		161.780.000

Untuk penjurnalan berikutnya dapat memperhatikan tabel amortisasi diskon berikut ini.

Tabel 4.6 Amortisasi Diskon

Tahun	Nilai wesel Awal	Amortisasi 10%	Nilai Wesel Akhir	Saldo Diskon
				288.220.000
1	711.780.000	85.413.600	797.193.600	202.806.400
2	797.193.600	95.663.232	892.856.832	107.143.168
3	892.856.832	107.142.820	999.999.652	-
Pembulatan				

Jurnal penyesuaian amortisasi diskon pada 31 Desember 2012 sebagai berikut:

Diskon	85,413.600	
Pendapatan bunga		85,413.600

Jurnal penyesuaian tersebut disajikan setiap akhir tahun, sampai akhir tahun ketiga. Saat akhir tahun ketiga nilai diskon akan menjadi nol (0). Adapun jurnal akhir tahun ketiga disajikan sebagai berikut:

Diskon	107,142,820	
Pendapatan bunga		107,142,820
Kas	1,000,000,000	
Wesel tagih		1,000,000,000

Penilaian Piutang

Berdasarkan PSAK yang berlaku, piutang dicatat dan diakui sebesar jumlah bruto atau nilai jatuh tempo dikurangi dengan taksiran jumlah yang tidak akan diterima. Dengan demikian, setiap akhir tahun untuk penyajian piutang pada laporan posisi keuangan memerlukan penghitungan jumlah kerugian dari piutang piutang tersebut. Kerugian piutang piutang dibebankan pada periode yang bersangkutan, sehingga dapat dihubungkan dengan penjualan yang mengakibatkan piutang-piutang tersebut.

Kerugian piutang dikreditkan ke akun cadangan kerugian piutang, sehingga tidak diperlukan perubahan buku pembantu piutang. Piutang yang sudah tidak dapat ditagih (ada kejelasan/bukti-bukti debitur bangkrut, dan

sebagainya), diperlakukan dengan mendebit akun cadangan kerugian piutang, dan piutangnya dihapuskan. Dengan demikian, buku piutang debitur yang bersangkutan dikreditkan.

Metode lainnya, yaitu metode penghapusan langsung. Metode ini mengakui kerugian piutang pada waktu penghapusan piutang. Metode penghapusan langsung tidak menunjukkan jumlah piutang yang diharapkan bisa ditagih, tetapi laporan posisi keuangan hanya menunjukkan jumlah bruto piutang, sehingga tidak sesuai dengan standar akuntansi.

Kerugian Piutang Berdasarkan Penjualan dan Piutang

Metode pencadangan piutang (piutang tidak tertagih) mensyaratkan setiap akhir periode untuk melakukan penaksiran jumlah kerugian piutang yang akan dibebankan ke periode yang bersangkutan. Dua dasar utama yang dapat digunakan untuk penaksiran kerugian piutang, yaitu:

1. Kerugian Piutang Atas Dasar Jumlah Penjualan

Cadangan kerugian piutang dihitung dengan mengalikan persentase tertentu dengan saldo akun penjualan periode tertentu. Angka persentase yang digunakan berdasarkan angka-angka persentase tahun-tahun sebelumnya, yaitu membandingkan piutang yang dihapus dengan jumlah penjualan, yang disesuaikan dengan keadaan tahun yang bersangkutan. Taksiran kerugian piutang dibebankan ke akun kerugian piutang, dan akun cadangan kerugian piutang di kredit. Alasan utama menggunakan asumsi ini adalah kerugian piutang timbul dari penjualan kredit, dan kerugian piutang berhubungan dengan proses pengukuran laba.

Pemisahan jumlah penjualan kredit dengan jumlah penjualan tunai membutuhkan tambahan pekerjaan, maka lazimnya digunakan total penjualan periode yang bersangkutan. Contoh, pada akhir tahun 2012, PT Pesona Agung menyajikan akun penjualan sebesar Rp 750.000.000. Taksiran kerugian piutang untuk tahun yang bersangkutan sebesar 2%. Jadi jumlah kerugian piutang untuk tahun 2012 adalah $2\% \times \text{Rp } 750.000.000 = \text{Rp } 15.000.000$.

Kerugian Piutang	15.000.000	
Cadangan Kerugian Piutang		15.000.000

2. Kerugian Piutang Atas Dasar Saldo Piutang

Penghitungan kerugian piutang atas dasar saldo piutang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: 1) persentase tertentu dari saldo piutang, dan 2) analisis umur piutang.

a. Persentase tertentu dari saldo piutang

Penghitungan kerugian piutang didasarkan persentase tertentu yang dikalikan dengan saldo akun piutang pada saat piutang tersebut ditetapkan, ataupun didasarkan taksiran penjualan kredit periode yang bersangkutan. Taksiran persentase tersebut dapat didasarkan pengalaman-pengalaman periode sebelumnya, yang disesuaikan dengan periode yang bersangkutan.

Contoh, PT Pesona Agung menyajikan akun piutang sebesar Rp 250.000.000. Taksiran kerugian piutang untuk tahun yang bersangkutan sebesar 8%. Jadi jumlah kerugian piutang untuk tahun 2012 adalah $8\% \times \text{Rp } 250.000.000 = \text{Rp } 20.000.000$.

Kerugian Piutang	20.000.000	
Cadangan Kerugian Piutang		20.000.000

Misalkan, akhir tahun 2012 tersebut akun cadangan kerugian piutang menunjukkan saldo kredit sebesar Rp 4.000.000, maka perhitungannya sebagai berikut:

Persentase kerugian 2% x Rp 750.000.000	Rp	20.000.000
Saldo kredit akun Cadangan Kerugian Piutang	Rp	4.000.000
Jumlah yang ditambahkan		16.000.000

Dengan demikian, sesudah ada jurnal penyesuaian yang disajikan, maka akun cadangan kerugian piutang menaiksaldo sebesar Rp 15.000.000. Adapun jurnal penyesuaian yang disajikan sebagai berikut:

Kerugian Piutang	16.000.000	
Cadangan Kerugian Piutang		16.000.000

Metode ini menghubungkan cadangan kerugian piutang dengan piutang, sehingga menunjukkan jumlah piutang yang diharapkan dapat ditagih. Dari contoh di atas, piutang yang diharapkan dapat ditagih sebesar $\text{Rp } 250.000.000 - \text{Rp } 20.000.000 = \text{Rp } 230.000.000$. Namun, metode ini dalam lingkup pandangan laporan laba-rugi, metode ini tidak menunjukkan kerugian sebenarnya pada periode yang bersangkutan. Hal tersebut disebabkan penghitungan metode ini dipengaruhi cadangan kerugian piutang tahun sebelumnya.

b. Analisis umur piutang

Penghitungan kerugian piutang didasarkan besarnya resiko atau kemungkinan tidak tertagihnya piutang perusahaan. Metode ini lebih mendetail dibandingkan metode sebelumnya. Penghitungan kerugian piutang

dilakukan dengan estimasi resiko ketidaktagihan piutang debitur (langganan), dengan ukuran persentase tertentu dari saldo piutang debitur masing-masing. Piutang setiap debitur diklasifikasikan menjadi dua, yaitu belum menunggak dan menunggak.

Piutang dengan klasifikasi menunggak adalah piutang yang telah melebihi jangka waktu kredit (jatuh tempo). Piutang yang menunggak dikelompok-kelompokkan lagi lamanya waktu menunggaknya. Dari masing-masing kelompok berdasarkan lamanya waktu tunggakan ditetapkan persentase kerugian piutangnya. Kelompok lama waktu tunggakan dan penetapan persentase kerugian piutangnya juga didasarkan pengalaman perusahaan tahun-tahun sebelumnya.

Contoh analisis umur piutang, tanggal 31 Desember 2012 saldo akun piutang PT Pesona Agung menunjukkan sebesar Rp 350.000.000 yang dapat dirinci berdasarkan umur piutangnya sebagai berikut:

Tabel 4.7 Analisis Umur Piutang

Debitur	Jumlah	Belum	Menunggak (Hari)				
		Menunggak	1-30	31-90	91-180	181-360	> 360
PT Jaya	35.000.000	30.000.000		5.000.000			
PT Alam	65.000.000	25.000.000	15.000.000		25.000.000		
UD Maju	25.000.000	20.000.000				5.000.000	
UD Alami	115.000.000	50.000.000		50.000.000			15.000.000
Toko Sehat	85.000.000	45.000.000			10.000.000	30.000.000	
CV Jujur	25.000.000	5.000.000	5.000.000				15.000.000
Jumlah	330.000.000	175.000.000	20.000.000	55.000.000	35.000.000	35.000.000	30.000.000

Penentuan kelompok-kelompok piutang belum menunggak maupun menunggak dengan dengan jangka waktu harinya (umur piutang) masing-masing didasarkan

data yang ada pada buku pembantu piutang. Langkah berikutnya adalah menentukan besarnya persentase kerugian piutang untuk setiap kelompok umur piutang. Perhitungan taksiran kerugian piutang untuk setiap kelompok umur piutang dengan persentase kerugian piutangnya disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.8 Taksiran Kerugian Piutang

Kelompok Umur	Jumlah	Persentase Kerugian	Taksiran Kerugian Piutang
Belum Menunggak	175.000.000	0,50%	875.000
Menunggak 1-30 Hari	20.000.000	1,00%	200.000
Menunggak 31-90 Hari	55.000.000	5,00%	2.750.000
Menunggak 91-180 Hari	35.000.000	10,00%	3.500.000
Menunggak 181-360 Hari	35.000.000	25,00%	8.750.000
Menunggak > 360 Hari	30.000.000	50,00%	15.000.000
Jumlah	350.000.000		31.075.000

Hasil penghitungan di atas menunjukkan taksiran kerugian piutang sebesar Rp 31.075.000. Jumlah kerugian piutang yang dibebankan untuk akhir tahun 2012 bukan sebesar Rp 31.075.000 ketika terdapat saldo debit atau saldo kredit cadangan kerugian piutang tahun yang bersangkutan. Contoh, Tanggal 31 Desember 2012 akun cadangan kerugian piutang menunjukkan saldo kredit sebesar Rp 15.000.000, maka kerugian piutang sebesar Rp 31.075.000 - Rp 15.000.000 = Rp 16.075.000. Jurnal yang disajikan untuk mencatat akun cadangan kerugian piutang akhir tahun 2012 sebagai berikut:

Kerugian Piutang	15,075,000	
Cadangan Kerugian Piutang		15,075,000

Penurunan Nilai Piutang

Setiap akhir periode atau pelaporan keuangan, piutang harus dievaluasi kondisi penurunan nilainya. Ketersediaan bukti objektif adanya penurunan nilai piutang mengharuskan dilakukannya penurunan nilai. Bukti tersebut merupakan akumulasi satu atau lebih peristiwa setelah pengakuan awal yang merugikan atau berdampak pada arus kas masa datang, dan peristiwa itu pun dapat diobservasi. Beberapa contoh peristiwa yang menyebabkan penurunan nilai piutang, diantaranya: 1) peminjam dinyatakan pailit oleh pengadilan; 2) piutang tidak dilunasi pada saat jatuh tempo; 3) bunga dan pokok sudah tertunggak beberapa kali; 4) kelonggaran kepada peminjam dengan perpanjangan waktu pelunasan dan penurunan tingkat suku bunga.

Penurunan nilai piutang diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat piutang dengan nilai kini estimasi arus kas datang. Dengan demikian, tingkat diskonto yang digunakan adalah suku bunga efektif yang berlaku saat pengakuan awal piutang. Penurunan nilai tercatat piutang tersebut dapat dilakukan secara langsung atau menggunakan pos cadangan, jumlah kerugiannya diakui pada laporan keuangan. Penurunan nilai piutang dapat dievaluasi secara individual maupun secara kolektif, dengan memperhatikan jangka waktu pelunasannya yang melunasi lebih satu periode akuntansi. Ketika pelunasan dengan kondisi tersebut maka penurunan nilainya piutang tercatat dihitung berdasarkan nilai piutang kini, atau nilai sekarang dari piutang yang tidak tertagih.

Contoh, pada tanggal 1 Juli 2012, PT Jujur melakukan penjualan kredit kepada PT Jaya sebesar Rp 10.000.000. Piutang tersebut jatuh tempo sebulan setelah penjualan direalisasikan. Saat pelaporan keuangan 31 Desember 2012, piutang tersebut belum dibayarkan. PT Jaya berjanji akan melunasi piutang tersebut pada awal Juli 2013, dan bunga pasar sebesar 10%. Penurunan nilai piutang atas piutang tercatat tersebut sebesar:

$$\text{Rp } 10.000.000 \times 0.95238 \text{ (PV 8\%, n=0.5)} = \text{Rp } 9.523.800$$

Jumlah penurunan dihitung sebagai berikut:

Piutang sebelum penurunan nilai	:	Rp	10,000,000
Piutang setelah penurunan nilai	:	Rp	9,523,800
Penurunan nilai		Rp	476,200

Jurnal penurunan nilai tercatat piutang disajikan sebagai berikut:

Penurunan nilai piutang	476,200	
Cadangan Kerugian Piutang		476,200

Jumlah penurunan nilai tersebut di atas dilakukan secara individu. Pencatatan serupa dapat juga dilakukan secara kolektif, dengan menggabungkan berbagai penurunan nilai individu. Selain itu, kegagalan pelunasan kredit biasanya diikuti dengan perjanjian restrukturisasi. Restrukturisasi utang menghasilkan kesepakatan mekanisme pembayaran baru dari utang tersebut. Restrukturisasi tidak selamanya menghasilkan penurunan nilai piutang, tetapi juga dapat menghasilkan arus kas masa datang yang lebih besar dari nilai tercatat piutang. Kondisi

demikian terjadi ketika restrukturisasi mensyaratkan finalti atau denda bagi peminjam, dan bahkan peningkatan suku bunga pinjaman. Selisih lebih kecil nilai kini arus kas datang dengan nilai piutang tercatat akan menghasilkan penurunan nilai piutang.

Contoh, pada tanggal 30 Desember 2010, PT Jujur memberikan pinjaman kepada PT Jaya sebesar Rp 100.000.000 berjangka waktu 2 tahun, dan diangsur selama jangka waktu tersebut setiap akhir tahun dengan suku bunga 8%. Tanggal 30 Desember 2011, PT Jaya mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak dapat membayar angsuran dan bunga. Kondisi tersebut memungkinkan untuk melakukan kesepakatan atau negosiasi atas utang-piutang kedua belah pihak.

Kondisi 1, pinjaman tersebut akan mulai diangsur pada tahun 2012, dan tidak ada penambahan bunga maupun perubahan pokok *skedule* tersebut, atau PT Jaya mendapat *grace period* satu tahun untuk tidak mengansur pokok pinjaman dan membayar bunga. Penurunan nilai piutang sebesar Rp 7.407.458, seperti ditunjukkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.9 Penurunan Nilai Piutang

Tahun	Skedul Awal	PV Lama	Perubahan	PV baru
1	58,000,000	53,703,704		
2	54,000,000	46,296,296	58,000,000	49,725,604
3			54,000,000	42,866,939
		100,000,000		92,592,543
Kerugian/penurunan nilai piutang			7,407,458	

Kondisi 2, pinjaman tersebut akan mulai diangsur pada tahun 2012, dan angsuran pertama akan memperhitungkan bunga tertunggak selama 2 tahun berdasarkan suku bunga majemuk. Nilai utang akhir tahun kedua $Rp\ 100.000.000 \times (1.08)^2 = Rp\ 116.640.000$. Bunga majemuk tahun kedua sebesar $Rp\ 16.640.000$, pembayaran pertama adalah $Rp\ 90.000.000 + Rp\ 16.640.000 = Rp\ 66.640.000$. Kondisi tersebut tidak terjadi penurunan nilai, walaupun terjadi keterlambatan pembayaran. Bunga majemuk merupakan kompensasi pembayaran bunga. *Skedule* pembayaran dan angsuran bunga ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.10 Pembayaran dan Angsuran Bunga

Tahun	skedul Awal	PV Lama	Perubahan	PV baru
1	58,000,000	53,703,704		
2	54,000,000	46,296,296	66,640,000	57,133,061
3			54,000,000	42,866,939
		100,000,000		100,000,000

Kondisi 3, pinjaman akan diangsur tahun 2012, dan sisanya tahun berikutnya. PT Jaya dikenakan penalti kenaikan suku bunga menjadi menjadi 10%. Pembayaran angsuran pertama bersamaan pembayaran angsuran bunga tertunggak, dan pembayaran bunga periode tersebut dihitung berdasarkan *rate* baru secara *flat*, yaitu $Rp\ 100.000.000 \times 0.10 \times 2 = Rp\ 20.000.000$. Dengan demikian, kondisi tersebut tidak terjadi penurunan nilai, karena kenaikan suku bunga menyebabkan arus kas mendatang lebih besar dari nilai kini arus kas berdasarkan *skedule* lama. Kondisi tidak terjadi penurunan nilai piutang ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.11 Penurunan Piutang Tidak Terjadi

Tahun	skedul Awal	PV Lama	Perubahan	PV baru
1	58,000,000	53,703,704		
2	54,000,000	46,296,296		
3			70,000,000	55,568,100
4			65,000,000	47,776,950
		100,000,000		103,345,050
Tidak terjadi penurunan nilai			(3,345,050)	

Penghapusan Piutang

Cadangan kerugian piutang atau cadangan penurunan piutang merupakan taksiran besarnya piutang yang tidak dapat ditagih pada suatu periode akuntansi. Setelah periode akuntansi berjalan, sejumlah piutang akan benar-benar sudah tidak dapat ditagih, yang dibuktikan alasan-alasannya secara objektif. Beberapa alasan diantaranya debitur meninggal dunia, kesulitan keuangan, bangkrut, dan sebab lainnya yang memungkinkan dihapuskan dari saldo piutangnya.

Ada dua metode yang digunakan untuk mencatat penurunan nilai atau penghapusan piutang, yaitu metode penghapusan langsung (*direct write off method*) dan metode pencadangan (*allowance method*). Metode penghapusan langsung piutang mengharuskan piutang yang diturunkan nilainya langsung dihapuskan tanpa mengakui akun cadangan penurunan (kerugian) piutang. Sedangkan, metode pencadangan piutang mengharuskan terlebih dahulu mengakui akun cadangan penurunan piutang (debit) pada saat perusahaan mengakui biaya penurunan nilai piutang.

Standar akuntansi memberikan toleransi dapat menggunakan kedua metode tersebut. Metode penghapusan langsung memiliki pengendalian yang kurang baik, karena kesulitan memonitor jumlah piutang telah diturunkan sebelumnya. Metode tersebut juga sulit diterapkan untuk penurunan nilai piutang yang dilakukan secara kolektif, disebabkan nilai piutang merupakan penjumlahan dari piutang semua debitur. Sebaliknya, metode cadangan menunjukkan rekonsiliasi nilai cadangan penurunan nilai piutang akhir periode dengan cadangan penurunan nilai piutang awal periode akuntansi. Selain itu, metode tersebut menunjukkan koreksi cadangan penurunan nilai piutang periode sebelumnya, penambahan penurunan nilai periode berjalan, pengurangan penghapusan piutang, dan *recovery* pelunasan piutang dari piutang yang telah dihapuskan.

Contoh metode penghapusan langsung, Tanggal 1 Februari 2012, PT Sopan melakukan penghapusan piutang seorang pelanggan sebesar Rp 15.000.000. tanggal 1 Oktober 2012, piutang yang sebelumnya telah diturunkan nilainya, dilunasi kembali sebesar nilai tercatatnya Rp 45.000.000. Tanggal 1 Desember 2012, perusahaan menerima pelunasan piutang sebesar Rp 12.000.000 dari piutang sebelumnya yang telah dihapuskan. Akhir tahun tersebut, perusahaan menghitung penurunan nilai piutang yang mengalami penurunan sebesar Rp 10.000.000.

1 Februari 2012, penghapusan piutang:

Beban penghapusan piutang	15,000,000	
Piutang dagang		15,000,000

1 Oktober 2012, pelunasan piutang:

Kas	45,000,000	
Piutang dagang		45,000,000

1 Desember 2012, pelunasan piutang yang sebelumnya telah dihapuskan:

Kas	12,000,000	
Pendapatan lain		12,000,000

31 Desember 2012, penyesuaian penurunan nilai:

Beban penghapusan piutang	16,000,000	
Piutang dagang		16,000,000

Contoh metode cadangan, Tanggal 1 Februari 2012, PT Sopan melakukan penghapusan piutang seorang pelanggan sebesar Rp 15.000.000. Tanggal 1 Oktober 2012, piutang yang sebelumnya telah diturunkan nilainya, dilunasi kembali sebesar nilai tercatatnya Rp 45.000.000, yang terdiri dari nilai piutang bruto sebesar Rp 50.000.000, dan cadangan penurunan nilai piutang sebesar Rp 5.000.000. Tanggal 1 Desember 2012, perusahaan menerima pelunasan piutang sebesar Rp 12.000.000 dari piutang sebelumnya yang telah dihapuskan. Akhir tahun tersebut, perusahaan menghitung penurunan nilai yang terdiri dari: penurunan nilai piutang untuk piutang individual sebesar Rp 7.000.000, penurunan nilai piutang untuk piutang kolektif sebesar Rp 9.000.000, dan cadangan penurunan nilai sebesar Rp 16.000.000.

1 Februari 2012, penghapusan piutang:

Cadangan penurunan nilai piutang	15,000,000	
Piutang dagang		15,000,000

1 Oktober 2012, pelunasan piutang:

Kas	45,000,000	
Cadangan penurunan nilai piutang	5,000,000	
Piutang dagang		50,000,000

1 Desember 2012, pelunasan piutang yang sebelumnya telah dihapuskan:

Piutang dagang	12,000,000	
Cadangan penurunan nilai piutang		12,000,000

Kas	12,000,000	
Piutang dagang		12,000,000

31 Desember 2012, penyesuaian penurunan nilai:

Beban penghapusan piutang	16,000,000	
Cadangan penurunan nilai piutang		16,000,000

Dengan demikian, rekonsiliasi cadangan penurunan nilai piutang (rincian cadangan penurunan) yang disajikan pada catatan atas laporan keuangan sebagai berikut:

Saldo awal periode	16,000,000
Penghapusan piutang	(20,000,000)
<i>Recovery</i> piutang yang dihapus	12,000,000
Tambahan penurunan nilai periode tersebut	16,000,000
Saldo akhir periode	24,000,000

Pertanyaan

Jawablah setiap pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas untuk membuktikan pemahaman teoritis pembahasan bab ini.

1. Piutang harus dicatat sebesar jumlah yang diharapkan dapat ditagih. Jelaskan maksud pernyataan tersebut?
2. Kerugian atau penurunan nilai tercatat piutang harus disesuaikan setiap akhir periode akuntansi. Sebutkan dan jelaskan cara kerja kedua metode pencatatan kerugian atau penurunan piutang?
3. Standar akuntansi mengatur penurunan nilai piutang. Jelaskan proses evaluasi terhadap penurunan nilai tercatat piutang berdasarkan PSAK?
4. Piutang atau pemberian pinjaman melibatkan jangka waktu beberapa tahun sehingga memerlukan perhitungan nilai kini (sekarang). Jelaskan maksud penggunaan bunga efektif? Bagaimana perlakuan akuntansinya ketika tingkat suku bunga efektif tidak sama dengan tingkat suku bunga nominal?

Latihan

1. Akhir tahun 2012, PT Jujur melaporkan saldo beberapa akun seperti berikut ini.
 Piutang usaha : Rp 667.050.000
 Penjualan : Rp 1.162.500.000

Penjualan kredit : Rp 1.132.750.000

Buku pembantu piutang untuk setiap debitor menunjukkan saldo sebagai berikut:

Tanggal		Debitor	Jumlah (Rp)
2012			
Januari	05	PT Alam	115,000,000
Pebruai	15	UD sopan	50,750,000
April	02	Toko senang	17,500,000
Juni	22	UD Wati	35,850,000
Juli	10	PT Sehat	23,700,000
Agustus	15	PT Akar	208,500,000
September	01	Toko Bahagia	8,500,000
Oktober	09	UD Manis	100,500,000
Desember	01	Toko Serba	98,000,000
	22	UD Kekoh	8,750,000
Total			667,050,000

Berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, semakin lama umur piutang, semakin besar kemungkinan tidak tertagihnya.

Instruksi:

- a. Kalkulasi dan sajikan jurnal mengakui piutang tidak tertagih dengan cadangan kerugian piutang berdasarkan:
 6% dari total penjualan kredit
 9% dari total piutang usaha
- b. Kalkulasi umur piutang dan persentase piutang tidak tertagihnya dengan menggunakan estimasi Anda? Sajikan jurnal yang dibutuhkan?

2. Tanggal 2 Januari 2009, PT Perkreditan Reski memberikan pinjaman kepada UD Sehati sebesar Rp 750.000.000, bunga 12%, dengan pembayaran angsuran pokok sebesar 150.000.000, tambah bunga berdasarkan saldo utang pokoknya. Sejak Januari 2009, peminjam tidak dapat lagi membayar angsuran pokok dan bunganya, sehingga akhir tahun tersebut dilakukan restrukturisasi dengan kesepakatan penangguhan angsuran 2009, namun bunga tetap diperhitungkan dan akan dibayar tahun 2010. Tahun 2010 membayar bunga saja, meliputi bunga tahun berjalan dan bunga tertunggak, yang dihitung secara *fiat* berdasarkan pokok utang tersisa. Mulai 2011, peminjam sudah dapat membayar angsuran dan bunga (*fiat*) berdasarkan saldo pokok pinjaman yang belum dilunasi.

Instruksi:

- Susunlah estimasi arus kas masa datang piutang tersebut?
- Hitunglah penurunan nilai yang terjadi?
- Sajikan jurnal penyesuaiannya?

Pengertian Persediaan

PSAK 14 (Revisi 2008) mendefinisikan persediaan yang meliputi: 1) aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa; 2) aset yang dalam proses produksi untuk penjualan tersebut; 3) aset yang dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Dengan demikian, persediaan merupakan aset yang sangat penting bagi entitas bisnis, perusahaan ritel, manufaktur, jasa, maupun entitas lainnya. Aset dalam bentuk persediaan ini berpengaruh langsung terhadap kemampuan perusahaan untuk memperoleh pendapatan.

Definisi persediaan di atas menunjukkan bahwa suatu aset diklasifikasikan sebagai persediaan tergantung *nature* bisnis entitas bisnis yang bersangkutan. Misalnya, apartemen, *property*, gedung, perumahan, dapat diklasifikasikan sebagai persediaan bagi perusahaan *property*. Sedangkan, bagi entitas bisnis lainnya yang usahanya tidak memproduksi/menjual apartemen, *property*, gedung, dan perumahan tidak diklasifikasikan sebagai persediaan, tetapi sebagai aset tetap (tidak lancar), dan tergantung dari tujuan kepemilikannya.

Entitas bisnis yang bergerak sektor perdagangan, seperti perusahaan ritel atau perusahaan grosir mengakui dan mencatat persediaan sebagai persediaan barang dagangan (*merchandise inventory*), yaitu perusahaan melakukan pembelian barang dagangan untuk dijual kembali dalam kegiatan normal usaha perusahaan. Sedangkan, entitas bisnis kategori perusahaan manufaktur mengklasifikasi persediaan lebih beragam. Klasifikasi persediaan bagi perusahaan manufaktur meliputi:

1) persediaan bahan baku (*raw material inventory*); 2) persediaan barang dalam proses/penyelesaian (*work in process inventory*); 3) persediaan barang jadi (*finished goods inventory*).

Selain itu, persediaan untuk entitas bisnis sektor jasa dapat merujuk pada PSAK 14 (revisi 2008) paragraf 18, biaya persediaan pemberi jasa meliputi biaya tenaga kerja dan biaya personalia lainnya yang secara langsung menangani pemberian jasa, termasuk personalia penyelia, dan *overhead* yang dapat diatribusikan. Biaya jasa yang belum diakui sebagai pendapatan jasa dapat diklasifikasikan sebagai persediaan. Biaya tenaga kerja yang berasal dari bagian personalia penjualan dan administrasi umum tetap diakui sebagai beban periode terjadinya, atau tidak dapat diklasifikasikan sebagai biaya persediaan.

Persediaan diperhadapkan permasalahan pengakuan kepemilikan atas persediaan tersebut. Asumsinya, saat pembelian atau penjualan barang persediaan berhubungan dengan penentuan atas perpindahan hak kepemilikan, mendapatkan atau melepaskan hak kepemilikan. Namun, realistiknya tidak semudah yang kita bayangkan. Kesulitan menentukan klasifikasi barang dalam persediaan ketika diperhadapkan pada barang yang ada di suatu entitas tetapi bukan milik entitas tersebut (konsinyasi), dan barang milik entitas tetapi barangnya tidak ada di entitas tersebut (barang dalam transit).

Barang konsinyasi tetap menjadi pemilik barang (*consignor*), dan pemilik barang tetap mencatat barang tersebut sebagai persediaan barang dagangannya. Pihak penjual atau yang dititipkan barang tersebut (*consignee*) tidak boleh mengakui barang konsinyasi tersebut sebagai persediaannya. Sedangkan, barang dalam transit, atau barang yang telah dikirim oleh penjual tetapi belum

diterima oleh pembeli ditentukan oleh pihak pemegang tanggung jawab finansial, yang diistilahkan FOB (*free on board*). Pengiriman barang dengan FOB *Destination Point*, mensyaratkan biaya transportasi dibayar oleh penjual dan hak kepemilikannya tidak beralih sampai pembeli menerima barang tersebut. Dengan demikian, pengakuan persediaan berada pada pihak penjual selama masa transit. Sebaliknya, FOB *Shipping Point* mensyaratkan pembeli menanggung biaya transport, dan hak kepemilikan persediaan beralih ke pihak pembeli pada saat barang persediaan tersebut dikirim.

Pengukuran Persediaan

Pengukuran persediaan merujuk pada PSAK 14 (revisi 2008), bahwa persediaan diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi neto, mana yang lebih rendah. Biaya persediaan meliputi semua biaya pembelian, biaya konversi dan biaya-biaya lainnya yang timbul sampai persediaan tersebut berada dalam kondisi yang sesuai dan lokasi yang ditentukan. Biaya pembelian persediaan meliputi harga beli, bea impor, pajak lainnya, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang dapat diatribusikan pada bahan baku, barang jadi, dan jasa. Diskon yang terkait dengan pembelian, rabat, dan lainnya yang serupa dapat dikurangkan pada saat menentukan biaya pembelian. Biaya konversi meliputi biaya yang secara langsung terkait dengan unit yang diproduksi, termasuk biaya produksi tetap dan variabel yang timbul dalam mengonversi bahan menjadi barang jadi. Biaya-biaya lainnya meliputi biaya desain dan biaya produksi yang ditujukan untuk konsumen.

Entitas bisnis dapat menggunakan sistem pencatatan persediaan dengan menggunakan dua metode persediaan, yaitu: 1) sistem persediaan periodik (*periodic inventory system*); 2) sistem persediaan perpetual (*perpetual inventory system*). Sistem persediaan periodik biasa juga disebut sistem

persediaan fisik adalah sistem persediaan yang tidak mencatat arus keluar masuknya secara rinci, sehingga untuk mengetahui nilai persediaan pada saat tertentu harus melakukan penghitungan barang secara fisik (*stock opname*) di gudang. Atau ketika akhir periode akuntansi, untuk penyusunan laporan keuangan maka mengharuskan penghitungan fisik barang/persediaan di gudang. Sebaliknya, sistem persediaan perpetual mencatat arus masuk dan arus keluar barang di gudang secara rinci. Sistem persediaan perpetual ini mengharuskan pencatatan barang persediaan dilakukan setiap terjadi perubahan nilai persediaan.

Perbedaan penerapan dan pencatatan sistem persediaan periodik dengan sistem persediaan perpetual ditunjukkan berikut ini. Adapun perbedaan penerapan kedua sistem tersebut:

Tabel 5.1 Sistem Periodik Versus Sistem Perpetual

Sistem Periodik	Sistem perpetual
1 Diterapkan untuk barang yang tidak mahal	1 Diterapkan untuk semua jenis barang
2 Tidak menyimpan catatan semua barang yang dibeli, dijual, dan di tangan	2 Menyimpan catatan semua barang yang dibeli, dijual, dan di tangan
3 Persediaan dihitung setidaknya setahun sekali	3 Menghitung persediaan kapan saja dibutuhkan

Sedangkan perbedaan teknis pencatatan atau penjurnalannya ditunjukkan berikut ini. Saat terjadi pembelian barang dagangan, sistem persediaan periodik menyajikan pencatatan dengan debit akun pembelian dan kredit akun kontraknya utang dagang atau kas. Sistem persediaan perpetual menyajikan pencatatan dengan debit

akun persediaan, dan akun yang dikredit sama dengan yang dicatat pada sistem persediaan periodik. Saat penjualan, baik sistem persediaan periodik maupun sistem persediaan perpetual mencatat debit akun piutang dagang atau kas dan kredit akun penjualan. Hanya saja, sistem persediaan perpetual menyajikan tambahan jurnal, dengan mencatat debit akun harga pokok penjualan dan kredit akun persediaan. Akhir periode, sistem persediaan periodik menyajikan jurnal penyesuaian dengan mencatat akun persediaan (debit atau kredit), debit akun harga pokok penjualan, dan kredit akun pembelian. Sedangkan, sistem persediaan perpetual hanya melakukan perhitungan saldo akhir persediaan (persediaan akhir).

Ilustrasi 5.1 Sistem Persediaan Periodik

Sistem Persediaan Periodik		
Persediaan awal 200 unit @ Rp 10.000		
Saldo akun persediaan Rp 2.000.000		
Pembelian 800 unit @ Rp 10.000		
Pembelian	8,000,000	
Utang dagang		8,000,000
Penjualan 700 unit @ 12.000		
Piutang dagang	8,400,000	
Penjualan		8,400,000
Akhir periode, saldo 300 unit @ Rp 10.000		
Persediaan akhir	3,000,000	
Harga pokok penjualan	7,000,000	
Pembelian		8,000,000
Persediaan awal		2,000,000

Ilustrasi 5.2 Sistem Persediaan Perpetual

Sistem Persediaan Perpetual		
Persediaan awal 200 unit @ Rp 10.000		
Saldo akun persediaan Rp 2.000.000		
Perbelian 800 unit @ Rp 10.000		
Pembelian	8,000,000	
Utang dagang		8,000,000
Penjualan 700 unit @ 12.000		
Piutang dagang	8,400,000	
Penjualan		8,400,000
Harga pokok penjualan	7,000,000	
Persediaan		7,000,000
Akhir periode, saldo 300 unit @ Rp 10.000		
Akun persediaan menunjukkan saldo akhir:		
Persediaan awal	2,000,000	
Pembelian	8,000,000	
Penjualan	(7,000,000)	
Persediaan awal		3,000,000

Sistem persediaan periodik maupun sistem persediaan perpetual seperti di atas dapat dilakukan dengan metode identifikasi khusus, metode masuk pertama keluar pertama (*First In First Out/FIFO*), dan metode rata-rata tertimbang. PSAK 14 (revisi 2008) tidak membolehkan menggunakan metode masuk terakhir keluar pertama (*Last In First Out/LIFO*).

Metode Identifikasi Khusus

Metode identifikasi khusus menghasilkan hasil perhitungan persediaan (nilai) yang sama, baik untuk perhitungan sistem persediaan periodik maupun sistem persediaan perpetual. Metode ini mengatribusikan biaya-biaya persediaan ke unit persediaan masing-masing. Entitas bisnis mengidentifikasi barang-barang yang dijual dengan tiap-tiap jenis dalam persediaan yang spesifik. Metode ini biasanya diterapkan pada entitas bisnis yang memiliki persediaan tidak banyak, nilai (harga) tinggi, dan barang yang mudah dibedakan satu dengan lainnya. Entitas bisnis yang biasanya menggunakan metode ini adalah entitas yang melakukan penjualan permata, mobil mewah, televisi, kulkas, barang seni, dan sebagainya.

Contoh, PT Bahagia merupakan perusahaan ritel yang memiliki transaksi pembelian dan penjualan sebagai berikut:

Tabel 5.2 Transaksi Persediaan

Tanggal		Pembelian		Penjualan	Saldo	
		Unit	Harga/Unit		Unit	Harga/Unit
2012						
Juli	01				200	10,000
	05	800	12,000		1,000	
	17	1,000	15,000		2,000	
	22			1,200	8,000	
	25	400	16,000		1,200	
	28	100	17,000		1,300	

Dengan menerapkan metode identifikasi khusus, saat melakukan penjualan harus mengidentifikasi unit barang yang terjual yang sebanyak 1.200 unit dengan harganya

masing-masing. Persediaan akhir sebanyak 1.300 unit, yang tersisa digudang juga diidentifikasi, terdiri: 300 unit @ Rp 12.000, 700 unit @ Rp 15.000, 250 unit @ Rp 16.000, dan 50 unit @ Rp 17.000. Sistem persediaan periodik maupun sistem persediaan perpetual dengan metode identifikasi khusus menghasilkan nilai yang sama untuk persediaan akhir sebesar Rp 18.950.000, dan harga pokok penjualan sebesar Rp 15.750.000. Metode identifikasi khusus ditunjukkan berikut ini.

Barang tersedia dijual					34.700.000
Persediaan akhir					
2012					
Juli	05	300 unit	@	12.000	3.600.000
	17	700 unit	@	15.000	10.500.000
	25	250 unit	@	16.000	4.000.000
	28	50 unit	@	17.000	850.000
Jumlah					18.950.000
Harga pokok penjualan					15.750.000

Metode First In First Out (FIFO)

Metode FIFO dikenal juga dengan istilah Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP). Metode ini mengasumsikan unit persediaan yang pertama kali dibeli (masuk gudang) akan di jual (keluar gudang) atau digunakan terlebih dahulu, sehingga unit persediaan akhir adalah barang yang dibeli atau diproduksi paling terakhir. Persediaan akhir yang ditunjukkan metode MPKP adalah nilai persediaan yang didasarkan pada harga sekarang (kini). Metode ini menunjukkan laporan posisi keuangan yang sesuai dengan nilai kini perusahaan. Tingginya perputaran persediaan dan harga barang mengalami inflasi

tinggi, maka laba yang dicatat perusahaan dapat menjadi lebih besar dari yang sesungguhnya (*overstated*). Metode ini pun dianggap tidak merefleksikan nilai laba yang paling akurat, karena persediaan mengacu pada harga pembelian terdahulu, yang kurang *matching* dengan pendapatan perusahaan.

Metode MPKP dengan sistem persediaan periodik. Contoh sebelumnya PT Bahagia, dengan saldo awal, pembelian, dan penjualan yang sama menghasilkan jumlah persediaan akhir sebesar Rp Rp 20.100.000 dan harga pokok penjualan sebesar Rp 14.600.000. sebagai berikut:

Barang tersedia dijual					34.700.000
Persediaan akhir					
2012					
Juli	17	800 unit	@	15.000	12.000.000
	25	400 unit	@	16.000	6.400.000
	28	100 unit	@	17.000	1.700.000
Jumlah					20.100.000
Harga pokok penjualan					14.600.000

Metode MPKP dengan sistem persediaan perpetual. Contoh sebelumnya PT Bahagia, dengan saldo awal, pembelian, dan penjualan yang sama menghasilkan jumlah persediaan akhir sebesar Rp 20.100.000, dan harga pokok penjualan sebesar Rp 14.600.000. Metode MPKP berdasarkan metode persediaan periodik dan metode persediaan perpetual menghasilkan nilai yang sama. Hal tersebut disebabkan kecocokan harga yang sama yang digunakan sebagai biaya barang yang dibeli pertama dan harga tersebut

digunakan untuk barang yang dijual pertama. Perhitungan metode MPKP dengan sistem persediaan perpetual ditunjukkan berikut ini.

Tabel 5.3 MPKP Sistem Perpetual

Tanggal	Pembelian			Penjualan			Saldo		
	Unit	Harga	Nilai	Unit	Harga	Nilai	Unit	Harga	Nilai
2012									
Juli 01							200	13,000	2,600,000
05	800	12,000	9,600,000				200	13,000	2,600,000
							800	12,000	9,600,000
17	1,000	15,000	15,000,000				200	13,000	2,600,000
							800	12,000	9,600,000
							1,000	15,000	15,000,000
22				200	10,000	2,000,000			
				800	12,000	9,600,000			
				200	15,000	3,000,000	800	13,000	10,400,000
25	400	16,000	6,400,000				800	13,000	10,400,000
							400	16,000	6,400,000
28	100	17,000	1,700,000				800	13,000	10,400,000
							400	16,000	6,400,000
							100	17,000	1,700,000
							1,300		20,700,000

Metode Rata-rata Tertimbang

Metode rata-rata tertimbang menghitung barang yang dibeli (masuk) dan barang yang dijual (keluar), ataupun yang tersisa dengan harga rata-rata. Biaya rata-rata tertimbang meliputi biaya setiap unit berdasarkan biaya rata-rata tertimbang, unit pada awal periode dan biaya unit yang dibeli, atau diproduksi selama satu periode. Nilai persediaan dengan metode rata-rata tertimbang dihitung dengan terlebih dahulu biaya rata-rata per unit. Biaya rata-rata per unit diperoleh dengan cara membagi biaya barang

yang tersedia dijual dengan unit yang tersedia untuk dijual. Persediaan akhir dan harga pokok penjualan dihitung dengan dasar harga rata-rata tersebut.

Contoh sebelumnya PT Bahagia, metode rata-rata tertimbang dengan sistem persediaan periodik menunjukkan nilai persediaan akhir sebesar Rp 18.044.000, dan harga pokok penjualan sebesar Rp 16.656.000. Nilai persediaan dengan metode rata-rata tertimbang sistem persediaan periodik ditunjukkan berikut ini.

Tabel 5.4 Metode Rata-rata Sistem Periodik

Tanggal	Barang Siap Dijual		
	Unit	Harga	Nilai
2012			
Juli 01	200	10,000	2,000,000
05	800	12,000	9,600,000
17	1,000	15,000	15,000,000
25	400	16,000	6,400,000
28	100	17,000	1,700,000
Barang siap di Jual	2,500		34,700,000
Biaya rata-rata per unit		13,880	
Persediaan akhir	1,300	13,880	18,044,000
Harga pokok penjualan			16,656,000

$$\text{Biaya rata-rata per unit} = \frac{\text{Total biaya barang siap dijual}}{\text{Total unit barang siap di jual}}$$

$$\begin{aligned} \text{Biaya rata-rata per unit} &= \frac{34,700,000}{2,500} \\ &= 13,880 \end{aligned}$$

Berbeda dengan metode rata-rata tertimbang dengan sistem persediaan periodik, metode rata-rata tertimbang dengan sistem persediaan perpetual menghitung nilai rata-rata setiap ada barang masuk atau terjadinya pembelian. Ketika terjadi penjualan maka harga pokok penjualan atau biaya persediaan yang digunakan merupakan nilai rata-rata persediaan yang telah dihitung paling akhir. Contoh sebelumnya PT Bahagia, nilai persediaan akhir sebesar Rp 18.740.000 dan harga pokok penjualan sebesar Rp 15.960.000 ditunjukkan berikut ini

Tabel 5.5 Metode Rata-rata Tertimbang Sistem Perpetual

Tanggal	Pembelian			Penjualan			Saldo		
	Unit	Harga	Nilai	Unit	Harga	Nilai	Unit	Harga	Nilai
2012									
Juli 01							200	10,000	2,000,000
05	800	12,000	9,600,000				2,000	11,600	23,600,000
17	1,000	15,000	15,000,000				2,000	15,300	30,900,000
22				1,200	13,300	15,960,000	800	15,300	12,240,000
25	400	16,000	6,400,000				1,200	14,200	17,040,000
28	100	17,000	1,700,000				1,300	14,415	18,740,000

Penurunan Nilai Persediaan

Persediaan diukur berdasarkan nilai terendah antara nilai biaya atau harga persediaan dan nilai realisasi bersih (neto). Nilai realisasi netto (*net realizable value*) adalah nilai estimasi harga jual dalam kegiatan usaha normal dikurangi nilai estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya persediaan untuk keperluan penjualan. Dengan menggunakan ketiga metode penilaian persediaan sebelumnya, identifikasi khusus, MPKP, dan rata-rata tertimbang dengan nilai persediaan yang lebih tinggi dari

estimasi nilai yang akan diperoleh kembali, sehingga mengharuskan menggunakan nilai realisasi netto. Penurunan nilai persediaan ke nilai realisasi netto dilakukan secara terpisah untuk setiap unit dalam persediaan, dan sebaiknya dilakukan berdasarkan kelompok unit persediaan yang serupa.

Penurunan nilai persediaan terjadi disebabkan barang persediaan mengalami kerusakan, usang, atau memang harga jualnya mengalami penurunan. Nilai persediaan yang mengalami penurunan tidak akan diperoleh kembali ketika estimasi biaya penyelesaian (penjualan) telah meningkat. Penurunan nilai persediaan berdasarkan nilai realisasi netto konsisten dengan penyajian nilai persediaan sebagai aset seharusnya, tidak melebihi jumlah yang dapat direalisasikan (penjualan). Kerugian penurunan nilai persediaan diakui sebagai beban pada periode terjadinya (laporan laba-rugi), dan nilai persediaan disajikan pada laporan posisi keuangan. Ketika terjadi pemulihan kembali atas penurunan nilai persediaan, atau peningkatan kembali nilai realisasi netto, maka harus diakui sebagai pengurangan jumlah beban persediaan pada periode terjadi pemulihan tersebut.

Contoh, PT Menanti mempunyai persediaan barang belum selesai dengan nilai biaya persediaan sebesar Rp 22.750.000, dan harga jual sebesar Rp 25.000.000. Untuk keperluan penjualan (penyelesaian) barang dagangan tersebut dibutuhkan biaya sebesar Rp 1.500.000, dan biaya penjualan sebesar Rp 2.500.000. Penurunan nilai persediaan barang dagangan berdasarkan nilai realisasi netto ditunjukkan berikut ini.

Nilai jual persediaan	25,000,000	
Estimasi biaya penyelesaian	1,500,000	
Estimasi biaya penjualan	<u>2,500,000</u>	4,000,000
Nilai realisasi neto	21,000,000	
Nilai biaya persediaan	<u>22,500,000</u>	
Penurunan nilai persediaan	(1,500,000)	

Contoh lainnya, PT Menanti menentukan nilai persediaan, nilai terendah antara biaya persediaan dengan nilai realisasi neto. PT Menanti menghitung nilai persediaan realisasi neto secara kolektif. Adapun cara kerja penentuan persediaan ini diistilahkan *lower of cost or net realizable value* atau LCNRV (IAS 2 dan PSAK 14) sebagai berikut:

Tabel 5.6 *Lower of Cost or Net Realizable Value*

Jenis Barang	Biaya Perolehan	Nilai Realisasi Neto	LOCOM
Barang A	10,250,000	10,150,000	10,150,000
Barang B	27,250,000	27,000,000	27,000,000
Barang C	8,525,000	8,750,000	8,525,000
Barang D	<u>16,700,000</u>	<u>16,500,000</u>	<u>16,500,000</u>
	62,725,000		62,175,000
Penurunan nilai persediaan			550,000

Jurnal untuk mencatat kerugian penurunan persediaan dapat disajikan sebagai berikut:

Kerugian penurunan nilai persediaan	550,000	
Persediaan		550,000

Selain mengkredit akun persediaan, entitas juga dapat mengganti dengan mengkredit akun cadangan penurunan nilai persediaan. Akun cadangan penurunan nilai persediaan akan menunjukkan nilai persediaan berdasarkan nilai realisasi neto, karena akun persediaan dikurangi akun cadangan penurunan nilai persediaan. Penilaian persediaan berdasarkan nilai realisasi neto harus dilakukan secara berkala. Kondisi lainnya, ketika entitas telah melakukan penurunan nilai persediaan, dan periode selanjutnya terjadi peningkatan nilai realisasi neto, maka jumlah penurunan nilai persediaan yang telah dilakukan sebelumnya harus dipulihkan sebatas jumlah penurunan nilai persediaan tersebut. Dengan demikian, periode penilaian terakhir tersebut tetap menunjukkan nilai terendah antara biaya persediaan dengan nilai realisasi neto.

Contoh sebelumnya, PT Menanti pada periode berikutnya menunjukkan peningkatan nilai realisasi neto sebesar Rp 63.000.000, maka jurnal yang disajikan adalah sebagai berikut:

Cadangan kerugian penurunan nilai persediaan	550,000	
Pembalikan kerugian persediaan		550,000

Metode Lain Estimasi Nilai Persediaan

Metode estimasi persediaan harus dilakukan bila data akuntansi atau fisik persediaan hilang, musnah, rusak, karena bencana alam, dan sebab-sebab lainnya.

Metode Ritel (*Retail Method*)

Metode ritel banyak digunakan oleh entitas bisnis yang memiliki banyak jenis barang dengan nilai per unit barang tersebut tidak besar, seperti supermarket dan

department store. Metode ritel melakukan pengukuran nilai persediaan dengan menggunakan rasio biaya untuk menurunkan nilai persediaan akhir yang dinilai berdasarkan nilai ritelnya. Metode ini memberikan nilai pada persediaan barang dagangan dengan menambahkan laba untuk setiap departemen atau bagian penjualan. Barang yang rusak atau usang diturunkan nilainya berdasarkan nilai wajarnya. Secara teknis, metode ini menentukan persentase laba kotor (rasio biaya) terhadap harga ritel atau *cost to retail ratio* (CRR). CRR merupakan rasio yang mencerminkan hubungan antara biaya barang siap dijual dengan harga ritel barang tersebut. Rasio ini digunakan untuk mengonversi nilai persediaan harga ritel menjadi harga perolehan.

Contoh penggunaan metode ritel untuk mengestimasi nilai persediaan sebagai berikut:

Tabel 5.7 Metode Ritel

	Biaya Barang Siap Jual	Harga Ritel
Persediaan awal	875,000	950,000
Pembelian neto	12,750,000	16,500,000
Total	13,625,000	17,450,000
Markup		500,000
Total	13,625,000	17,950,000
Mardown		150,000
Penjualan		17,150,000
Persediaan akhir (harga ritel)		650,000

		Biaya barang siap dijual
CRR	=	$\frac{\text{Harga Ritel} + \text{Net Markup} + \text{Net Mardown}}{\text{Net Markup}}$
CRR	=	$\frac{13,625,000}{17,800,000}$
	=	76.54%
Persediaan akhir (biaya perolehan)	=	76.54% X 650,000
	=	497,510

Berdasarkan metode ritel tersebut menghasilkan nilai persediaan barang dagangan sebesar Rp 497.510.

Metode Laba Bruto

Metode ini lazim digunakan untuk mengestimasi nilai persediaan untuk pelaporan keuangan interim, atau kepentingan internal perusahaan, dan atau perusahaan dalam keadaan kehilangan data persediaan, karena entitas mengalami bencana alam, kebakaran, dan sebagainya. Metode ini mengestimasi jumlah persediaan akhir berdasarkan nilai barang yang tersedia untuk dijual, penjualan, dan persentase laba kotor. Contoh, PT Meranti mempunyai persediaan awal sebesar Rp 20.000.000, pembelian sebesar Rp 80.000.000. Nilai persediaan dan pembelian tersebut merupakan nilai biaya (harga perolehan). Margin penjualan dihitung berdasarkan persentase laba bruto terhadap harga penjualan atau biaya. Diumpamakan margin perusahaan sebesar 25% dari harga penjualan. Adapun penggunaan metode laba bruto sebagai berikut:

Persediaan awal	20,000,000	
Pembelian	80,000,000	
Barang siap dijual	100,000,000	
Penjualan (harga penjualan)	125,000,000	
Laba netto (25% x Rp 125.000.000)	31,250,000	95,750,000
Estimasi nilai persediaan (nilai biaya)	6,250,000	

Berdasarkan metode laba bruto tersebut menghasilkan nilai persediaan barang dagangan sebesar Rp 6.250.000.

Pertanyaan

Jawablah setiap pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas untuk membuktikan pemahaman teoretis pembahasan bab ini.

1. Klasifikasikan persediaan tergantung *nature* bisnis entitas bisnis yang bersangkutan. Uraikan klasifikasi persediaan tersebut?
2. PSAK 14 (Revisi 2008) menyatakan persediaan diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi neto. Uraikan secara singkat cara kerja yang sebagaimana dimaksudkan PSAK tersebut?
3. Sistem pencatatan persediaan terbagi atas dua, yaitu sistem persediaan periodik dan sistem persediaan perpetual. Jelaskan perbedaan kedua sistem pencatatan persediaan tersebut?
4. Pengukuran persediaan dilakukan dengan tiga metode, yaitu identifikasi khusus, MPKP, dan rata-rata tertimbang. Uraikan secara singkat cara kerja ketiga metode pengukuran persediaan tersebut?

Latihan

1. Berikut transaksi pembelian dan penjualan PT Remaja selama tahun 2011:

Tanggal		Pembelian (Unit)	Penjualan (Unit)	Harga/ Per unit
2011				
Januari	04	1,500		10,500
Februari	12	700		11,000
Maret	22		1,600	22,000
April	02	400		11,150
Mei	25	800		12,500
Juni	28	700		13,000
Juli	10		1,200	25,500
Agustus	16	600		13,100
Oktober	10	1,000		13,050
Nopember	15	450		14,000
Desember	02		1,600	33,000

PT Remaja mempunyai persediaan awal sebanyak 250 unit dengan harga Rp 10.000 per unit.

Instruksi:

Hitunglah harga pokok penjualan selama tahun 2011 dan nilai persediaan akhir per 31 Desember 2011 berdasarkan sistem pencatatan persediaan periodik dan sistem pencatatan persediaan perpetual dengan metode atau arus biaya sebagai berikut:

- a. FIFO
- b. Rata-rata tertimbang

2. PT Putri menggunakan metode *Lower Cost of Cost or Net Value* (LCNRV) dalam penilaian persediaanya. Adapun daftar perediaan perusahaan disajikan sebagai berikut:

Jenis Barang	Kuantitas	Biaya Per unit	Estimasi Harga Jual Per unit	Biaya Penyelesaian Per unit
A	450	1250	1850	750
B	800	1350	2100	1000
C	150	1150	1700	850
D	750	1050	1000	450
E	900	1550	1600	250
F	650	1700	2550	1100
G	85	1800	2600	1200
H	120	1650	2100	1400
I	330	1400	2050	1250
J	250	1450	2150	950

Instruksi:

- Lakukan penilaian atas persediaan tersebut, tentukan nilai persediaan perusahaan?
- Sajikan jurnal yang diperlukan?
- Akhir periode 2012, diketahui persediaan barang dagangan tersebut mengalami peningkatan nilai realisasi neto sebesar 10% dari nilai yang dicatat pada poin (b). Sajikan jurnal yang diperlukan?

AKUN INVESTASI JANGKA PENDEK

6

Pengertian dan Klasifikasi Investasi

Tidak semua dana entitas bisnis dipergunakan untuk proses produksi atau peruntukannya untuk operasional perusahaan dengan tujuan menghasilkan laba operasi perusahaan. Bahkan, dana sudah tersedia untuk operasional perusahaan namun terkadang perusahaan diperhadapkan pada kondisi kesulitan untuk menghasilkan peningkatan pendapatan atas penjualan produksinya. Dengan demikian, perusahaan memiliki kelebihan dana atau kelebihan kas, baik yang tersedia dalam jangka pendek, atau waktu tidak terpakainya kas relatif pendek maupun yang keleresediaannyadalam jangka panjang.

Kondisi entitas berkelebihan dana mengakibatkan perusahaan kehilangan peluang manfaat (pendapatan) dari dana yang tidak dimanfaatkan tersebut. Dalam situasi demikian, manajemen perusahaan dapat memanfaatkan kelebihan dana yang bersifat sementara (uang menganggur) tersebut untuk melakukan investasi jangka pendek. Akun investasi jangka pendek tersebut disajikan sebagai bagian kelompok aset lancar. Selain itu, ketika tujuan investasi bukan memanfaatkan uang yang menganggur (tidak bersifat sementara), maka investasi tersebut merupakan investasi jangka panjang. Akun investasi jangka panjang seperti itu disajikan sebagai bagian kelompok aset tidak lancar.

Dengan demikian, investasi dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Kedua klasifikasi investasi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pembelian berbagai aset, seperti surat-surat berharga, tanah, dan aset-aset lainnya, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Surat-

surat berharga yang dibeli untuk tujuan investasi jangka pendek minimal memenuhi syarat berikut, diantaranya surat-surat berharga dapat segera dijual dengan harga yang berlaku pada saat penjualannya, dan penjualan surat-surat berharga tersebut untuk memenuhi kebutuhan uang. Surat-surat berharga yang tidak memenuhi kedua persyaratan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai investasi jangka panjang.

Surat-surat berharga yang memenuhi syarat tersebut mungkin saja dimiliki dalam jangka waktu yang singkat atau mungkin juga agak lama, namun karena surat-surat berharga tersebut merupakan sumber uang (dana) yang segera, maka dalam laporan posisi keuangan dikelompokkan sebagai aset lancar. Aset yang dibeli baik peruntukannya dalam jangka pendek maupun jangka panjang mempunyai tujuan yang sama, yaitu memperoleh pendapatan dari investasi berbagai aset tersebut. Lazimnya, perusahaan melakukan investasi jangka pendek pada berbagai aset yang diprediksi tidak sulit diperjual-belikan.

Penilaian dan Penyajian

Investasi memperlakukan aset yang dibeli bersifat sementara, dan biasanya nilai aset tersebut cukup material. IFRS merekomendasikan penggunaan salah satu diantara kedua metode penilaian dan penyajian aset entitas pada laporan keuangan perusahaan, yaitu:

1. Metode Biaya (Berdasarkan Harga Perolehan)

Metode biaya didasarkan pada jumlah pengorbanan ekonomis untuk memperoleh aset tetap tertentu, sampai aset tetap tersebut siap untuk digunakan. Metode penilaian ini berbasis harga perolehan, yaitu berdasarkan jumlah rupiah historis yang dikeluarkan pada saat memperoleh aset tetap.

2. Metode Nilai Pasar (Berdasarkan Revaluasi)

Metode nilai pasar untuk aset tetap didasarkan pada harga pasar pada saat penyajian laporan keuangan. Implementasi metode ini dianggap memberikan gambaran yang lebih akurat tentang nilai aset entitas bisnis pada waktu tertentu. Metode ini menutupi kekurangan metode biaya yang tidak lagi menggambarkan kondisi relevan nilai aset pada saat penyajian laporan keuangan.

Dengan demikian, khusus terkait dengan investasi jangka pendek, penilaian dan penyajian aset tersebut dikelompokkan menjadi dua tingkatan, yaitu: 1) aset yang harganya selalu tersedia setiap saat (harganya mudah diketahui); 2) aset yang harganya tidak selalu tersedia setiap saat (harganya tidak mudah diketahui). Aset dengan kelompok tingkatan pertama sangat mudah menggunakan nilai pasar untuk penilaian dan penyajian aset pada laporan keuangan. Contohnya, harga surat-surat berharga, saham dan obligasi yang diperdagangkan atau terdaftar di bursa efek, siapa pun dan kapan pun dengan mudah dapat mengakses harga terbaru (pasar) surat-surat berharga tersebut. Ketersediaan data dan nilainya yang cukup objektif memungkinkan penggunaan nilai pasar sebagai dasar penilaian dan penyajian aset pada laporan keuangan.

Tingkatan kedua penilaian dan penyajian aset sangat memungkinkan aset yang dimiliki perusahaan harganya selalu berbeda-beda berdasarkan penilaian pihak yang berkepentingan terhadap aset yang dinilai. Aset yang dimaksudkan selalu memiliki nilai pasar, hanya saja nilai pasarnya selalu berbeda-beda berdasarkan individu penilaiannya, dan datanya tidak selalu tersedia setiap saat. Contohnya, bangunan, tanah, dan aset berwujud lainnya, yang lazimnya menggunakan nilai jual objek pajak (NJOP)

yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak. Untuk aset yang memiliki tingkat kesulitan memperoleh nilai pasarnya, sebaiknya menggunakan jasa perusahaan penaksir, agar nilai aset yang disajikan pada laporan keuangan sesuai dengan nilai pasar yang objektif.

IFRS banyak mengadopsi nilai wajar dengan menggunakan nilai realisasi dan nilai kini. Salah satu langkah yang digunakan untuk menentukan nilai wajar tersebut adalah harga pasar, yang juga relevan sebagai pengukuran berbasis revaluasi. Peralihan dasar penilaian nilai perolehan ke penggunaan dasar penilaian nilai wajar membawa dampak perubahan besar dalam penerapan standar akuntansi dan praktik penyajian laporan keuangan. Salah satu implementasinya, selama ini amortisasi premium atau diskon dibolehkan menggunakan metode garis lurus, tetapi dengan implementasi IFRS harus menggunakan metode bunga, yang didasarkan pada tingkat suku bunga efektif (bukan suku bunga nominal), karena menyamakan nilai wajar aset keuangan dengan nilai kini aset keuangan di masa datang.

Sekuritas yang diperdagangkan

Standar akuntansi mengatur instrumen keuangan sebagai suatu kontrak yang menambah nilai aset atau liabilitas keuangan. Salah satu elemen instrumen keuangan aset keuangan adalah investasi jangka pendek. Selain itu, kas dan piutang merupakan instrumen keuangan atau disebut aset keuangan. Standar akuntansi yang mengatur instrumen keuangan, yaitu: 1) PSAK 50 (revisi 2010), penyajian adopsi dari IAS 32 *Financial Instrument: Presentation*; 2) PSAK 55 (revisi 2011), pengakuan dan penilaian adopsi dari IAS 39 *Financial Instrument: Recognition and Valuation*; 3) PSAK 60 (revisi 2010), Pengungkapan adopsi dari IFRS 7 *Financial Instrument: Disclosure*.

PSAK 32 mendefinisikan aset keuangan sebagai setiap aset yang berupa kas, instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain, dan hak kontraktual untuk menerima kas atau aset keuangan dari entitas lain, dan kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh entitas itu sendiri. Selanjutnya, PSAK 55 mengklasifikasikan aset keuangan ke dalam sekuritas (surat-surat berharga) yang diperdagangkan, pinjaman dan piutang, sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo, aset atau investasi yang tersedia untuk dijual. Kategori aset keuangan tersebut sebagian besar merupakan investasi jangka pendek (*Short-term investments*). Investasi jangka yang dibahas pada bab ini adalah sekuritas yang diperdagangkan (*trading securities*).

Sekuritas yang dapat dipasarkan (*marketable securities*) dapat berupa saham atau obligasi. Tujuan investasi pada sekuritas yang dapat dipasarkan adalah untuk menyimpan dalam waktu tidak lama, dan selanjutnya dijual pada harga yang melebihi harga perolehannya. Selisih harga jual dengan harga perolehan dari sekuritas tersebut merupakan laba jangka pendek. Kas yang menganggur yang diinvestasikan perusahaan memungkinkan menghasilkan pengembalian (keuntungan) sampai kas tersebut diperlukan. Hal demikian itu menunjukkan bahwa investasi jangka pendek tersebut merupakan aset yang paling likuid.

PSAK 55 (revisi 2011) menyatakan sekuritas yang diperdagangkan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba-rugi (*Fair Value through Profit or Loss*), atau disingkat dengan istilah FVPL. Aset keuangan yang diukur dengan FVPL dimaksudkan untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Bagi entitas yang melakukan jual-beli sekuritas (*securities*

company), aset keuangan merupakan komponen utama aset perusahaan, sedangkan bagi entitas lainnya memperlakukan sebagai investasi sementara untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas.

PSAK 55 (revisi 2011) mengklasifikasikan aset keuangan sebagai FVPL jika memenuhi salah satu diantara dua kondisi berikut: 1) diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, dan 2) saat pengakuan awal telah diukur pada nilai wajar melalui laba-rugi. FVPL dinilai pada pengakuan awal sebesar nilai wajar, yaitu nilai perolehan investasi tersebut. Biaya transaksi yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan investasi tersebut dibebankan sebagai beban periodik. Maksud pemisahan harga perolehan dengan biaya transaksi tersebut adalah kemudahan perbandingan nilai wajar saat transaksi dengan nilai wajar saat pengukuran setelah pengakuan awal.

misal Misalnya, PT Garuda pada tanggal 1 Nopember 2010 membeli saham PT Merpati secara tunai dengan harga perolehan sebesar Rp 100.000.000, dengan biaya transaksi untuk memperoleh investasi tersebut sebesar Rp 750.000, dan dividen dibayarkan setiap akhir tahun. Adapun jurnal yang disajikan sebagai berikut:

1 Nop. 10	Investasi - Saham PT Merpati	100.000.000	
	Kas		100.000.000

Biaya transaksi sebesar Rp 750.000 tidak menambah harga perolehan investasi. Biaya transaksi tersebut langsung dibebankan sebagai beban periode berjalan. Akhir tahun tersebut, PT Garuda menerima dividen dari PT Merpati sebesar Rp 4.000.000. Jurnal yang disajikan saat menerima pendapatan dividen:

31 Des. 10	Kas	4.000.000	
	Pendapatan Dividen		4.000.000

Pada akhir tahun tersebut, 31 Desember 2010, PT Garuda menyusun laporan keuangan. Nilai saham PT Merpati mempunyai nilai pasar sebesar Rp 106.000.000. Nilai pasar tersebut merupakan jumlah atau harga ketika pemilik menjual sekuritas tersebut. Dengan demikian, PT Garuda memiliki keuntungan yang belum direalisasi (*unrealized gains*) atas investasi itu. Keuntungan tersebut memiliki dampak meningkatkan ekuitas, seperti pendapatan. Keuntungan yang belum direalisasi, karena PT Garuda belum menjual sekuritas tersebut. Jurnal yang disajikan atas investasi yang disesuaikan dengan nilai pasar yang lebih besar berikut ini.

31 Des. 10	Investasi - Saham PT Merpati	6.000.000	
	Keuntungan yang belum direalisasi atas investasi		6.000.000

Jika investasi jangka pendek PT Garuda menurun nilainya pada akhir tahun tersebut menjadi Rp 98.000.000, maka PT Garuda akan menyajikan kerugian yang belum direalisasi (*unrealized loss*). Kerugian ini memiliki dampak menurunkan atau mengurangi ekuitas, seperti halnya beban. Jurnal yang disajikan atas investasi yang disesuaikan dengan nilai pasar yang lebih rendah:

31 Des. 10	Kerugian yang belum direalisasi atas investasi	2.000.000	
	Investasi - Saham PT Merpati		2.000.000

Keuntungan dan kerugian seperti digambarkan di atas adalah kasus setelah pengakuan awal. PVPL diukur dengan nilai wajar pada saat tanggal penyajian laporan keuangan, tanpa harus diperkurangkan dengan biaya transaksi. Keuntungan atau kerugian akibat selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajar saat pelaporan disajikan pada laporan laba-rugi komprehensif. Selisih perubahan nilai wajar disajikan pada laporan laba-rugi komprehensif. Dengan demikian, investasi ini dapat disebut pula dengan nilai wajar melalui laba-rugi komprehensif. Laba-rugi perubahan nilai wajar selama aset yang terkait belum terjual harus diakui sebagai laba atau rugi yang belum direalisasikan. Perubahan harga atau nilai wajar yang sebaliknya pada periode berikutnya mengakibatkan pengakuan keuntungan atau kerugian tidak dapat terrealisasikan.

Lain halnya, keuntungan atau kerugian yang direalisasikan terjadi ketika aset terjual setelah pengakuan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan. Keuntungan atau kerugian yang direalisasi dimungkinkan dengan dua kondisi, yaitu: 1) keuntungan yang direalisasi ketika harga jual lebih besar dari jumlah investasi yang tercatat, dan 2) kerugian yang direalisasi ketika harga jual lebih kecil dari jumlah investasi tercatat. Misalnya, PT Garuda menjual saham PT Merpati pada tahun 2011 dengan harga Rp 94.000.000, nilai investasi tersebut tercatat akhir tahun 2010 sebesar Rp 106.000.000 (kenaikan nilai wajar dari investasi sebelumnya Rp 100.000.000). Jurnal yang disajikan PT Garuda saat menjual investasi dengan mengalami kerugian sebagai berikut:

02 Feb. 11	Kas	94,000,000	
	Kerugian penjualan investasi	12,000,000	
	Investasi - Saham PT Merpati		106,000,000

Dengan contoh yang sama di atas, namun penjualan saham PT Merpati dilakukan dengan harga Rp 108.000.000, maka PT Garuda menjual investasi dengan memperoleh keuntungan. Jurnal yang disajikan sebagai berikut:

02 Feb. 11	Kas	108,000,000	
	Keuntungan penjualan investasi		2,000,000
	Investasi - Saham PT Merpati		106,000,000

Penurunan Nilai

Aset keuangan yang dinilai dengan nilai wajar melalui laba-rugi komprehensif secara otomatis menurun nilainya berdasarkan harga pasarnya, dengan demikian tidak memerlukan evaluasi penurunan nilai. Penurunan nilai aset atau kelompok aset keuangan terjadi ketika nilai tercatat atau biaya perolehan diamortisasi lebih tinggi daripada nilai yang dapat diperoleh kembali. Setiap tanggal pelaporan posisi keuangan, penurunan nilai harus dievaluasi dan terdapat bukti yang objektif yang mendukung penurunan nilai tersebut. Beberapa bukti objektif indikasi penurunan nilai sebagai berikut:

1. Kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami penerbit atau peminjam.

2. Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga.
3. Restrukturisasi atau keringanan (konsesi) akibat pihak peminjam mengalami kesulitan.
4. Peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya.
5. Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan.
6. Kemungkinan besar bangkrut.

Penurunan nilai aset keuangan dapat diidentifikasi secara individual maupun kolektif (kelompok aset). Penurunan nilai tidak diakui berdasarkan kerugian yang diestimasikan timbul akibat peristiwa masa datang. Kerugian penurunan nilai diakui sebesar selisih nilai tercatat dengan nilai diperoleh kembali. Nilai diperoleh kembali diukur dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan. Nilai tercatat aset keuangan dapat diperlakukan atau dikurangi secara langsung (*direct write off*) ataupun menggunakan akun cadangan (*allowance method*).

Aset keuangan yang dinilai berdasarkan nilai amortisasi, dengan kondisi penurunan jumlah kerugian pada periode berikutnya, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan kembali. Pemulihan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada saat pemulihan. Jumlah pemulihan tersebut disajikan sebagai bagian laporan laba-rugi. Sebaliknya, kerugian penurunan nilai aset keuangan yang dinilai dengan harga perolehan tidak dapat dipulihkan kembali. Aset keuangan yang dinilai dengan harga perolehan diukur berdasarkan selisih antara nilai aset tercatat dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang

yang didiskontokan pada tingkat pengembalian yang berlaku di pasar.

Aset keuangan yang tersedia untuk dijual, diakui secara langsung dalam ekuitas. Penurunan nilai yang mengakibatkan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui secara langsung dalam ekuitas harus dikeluarkan dari ekuitas dan diakui pada laporan laba-rugi. Kerugian penurunan nilai yang diakui pada laporan laba-rugi instrumen ekuitas tidak boleh dipulihkan melalui laporan laba-rugi. Selanjutnya, entitas menghentikan pengakuan aset keuangan dengan kriteria, yaitu: 1) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan telah berakhir, dan 2) entitas mentransfer aset keuangan yang memenuhi kriteria penghentian pengakuan. Entitas akan menghentikan pengakuan aset keuangan jika tidak lagi menahan risiko dan *reward*, tidak memiliki pengendalian terhadap aset keuangan, dan terjadinya penghapusbukuan (*derecognition*) aset keuangan.

Pertanyaan

Jawablah setiap pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas untuk membuktikan pemahaman teoretis pembahasan bab ini.

5. Investasi diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Jelaskan perbedaan keduanya?
6. Biaya transaksi untuk memperoleh investasi tidak menambah harga perolehan investasi? Jelaskan keterkaitannya dengan konsep nilai wajar?
7. IFRS mengizinkan penilaian investasi dengan menggunakan metode berbasis harga perolehan dan metode berbasis revaluasi. Jelaskan perbedaan implementasi kedua metode tersebut?

8. Investasi jangka pendek merupakan aset keuangan yang diukur dengan *fair value to profit and loss* (FVPL). Jelaskan metode pengukuran nilai wajar tersebut?

Latihan

1. Tanggal 1 April 2011, PT Cendrawasih membeli 1.200 lembar obligasi PT Merpati di Bursa Efek Indonesia. Obligasi tersebut bernilai nominal Rp 10.000 per lembar, dan dibeli dengan harga Rp 9.800 perlembar. Obligasi berbunga 16% dibayarkan setiap tanggal 1 Februari dan 1 Agustus. Biaya transaksi investasi tersebut sebesar Rp 450.000. Akhir tahun 2011, nilai pasar obligasi PT Merpati sebesar Rp 10.800 perlembar, dan awal tahun berikutnya 2 Januari 2012, obligasi tersebut dijual seluruhnya dengan harga Rp 11.500.

Instruksi:

- Hitunglah dan sajikan jurnal yang diperlukan pada saat perolehan obligasi tersebut?
 - Hitunglah dan sajikan jurnal yang diperlukan pada saat penerimaan bunga obligasi?
 - Sajikan jurnal penyesuaian yang perlukan pada akhir tahun 2011 (saat penyajian laporan keuangan)?
 - Sajikan jurnal penjualan obligasi tersebut?
2. PT Rajawali selama tahun 2011 memanfaatkan kas yang berlebih untuk investasi jangka pendek dalam bentuk surat-surat berharga. Manajer perusahaan membeli surat-surat berharga (saham) dari beberapa perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Portofolio saham-saham yang dimiliki perusahaan pada akhir Desember 2011 adalah sebagai berikut:

Daftar Saham	Harga Beli	Harga Pasar
PT Sentosa	36,250,000	32,600,000
PT Tiara	40,750,000	42,500,000
PT Selamat	115,700,000	135,000,000
PT Abadi	45,600,000	44,900,000
PT Sehati	78,150,000	82,000,000
PT Bagus	102,500,000	110,000,000

Instruksi:

- Sajikan jurnal untuk mencatat penilaian investasi tersebut pada saat penyajian laporan keuangan?
- Sajikan akun-akun yang terkait dengan penilaian investasi tersebut pada laporan keuangan PT Rajawali?
- Diumpamakan, awal tahun berikutnya keseluruhan saham tersebut dijual dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar akhir tahun 2011 (berikan nilai sendiri). Sajikan jurnal yang diperlukan saat penjualan saham-saham tersebut?

Pengertian dan Kriteria Aset Tetap

Akhir-akhir ini nama akun aset tetap (*fixed assets*) lebih sering digunakan untuk menggantikan istilah lama dari akun aktiva tetap. Kata *aset* (bahasa Inggris) telah tersadur menjadi kata aset dalam bahasa Indonesia. Untuk pembahasan selanjutnya, buku ini menggunakan istilah aset, baik untuk aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya. Aset tetap merupakan salah satu aset utama entitas bisnis. Entitas bisnis bidang utilitas (jasa), manufaktur, pertambangan, dan beberapa industri lainnya memposisikan aset tetap sebagai bagian vital perusahaan. Tanpa aset tetap, entitas bisnis tersebut tidak akan menghasilkan produk untuk dijual, atau mencapai tujuan perusahaan.

PSAK 16 mengatur aset tetap, dan PSAK ini telah direvisi sejak tahun 2007 yang berlaku efektif 1 Januari 2008, dan tahun 2011 DSAK melakukan revisi terbatas untuk menyesuaikan dengan IAS 16. Dengan demikian, PSAK 16 tersebut merupakan konvergensi dari IAS 16 tentang *Property, Plant, and Equipment* (PPH). Aset tetap perusahaan dikelompokkan berdasarkan kriteria yang dimilikinya, yaitu aset lancar, aset berwujud, dan aset tidak berwujud. Walaupun demikian, setiap perusahaan memiliki jenis dan bentuk aset tetap yang berbeda satu dengan lainnya. Bidang usaha yang sama belum tentu mempunyai aset tetap yang sama, apalagi perusahaan yang sudah jelas berbeda bidang usahanya. Aset berwujud biasanya dapat berupa mesin, kendaraan, gedung, bangunan, tanah, peralatan pabrik, dan sebagainya. Untuk mengelompokkan aset ke dalam kelompok aset tetap harus memenuhi definisi dan kriteria yang telah disyaratkan regulasi.

Definisi dan kriteria aset tetap dijelaskan berikut ini. Aset tetap adalah aset (barang) berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atas penyediaan barang dan jasa, untuk direntalkan (disewakan) kepada pihak lain, atau tujuan administratif, dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Beberapa hal penting dari definisi tersebut sebagai berikut:

- a. Aset tetap adalah aset berwujud dalam bentuk fisik yang dapat dilihat dan disentuh.
- b. Aset tetap bertujuan khusus, yaitu digunakan dalam proses produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif. Aset yang tujuan untuk dijual kembali (diperjualbelikan) bukan merupakan aset tetap.
- c. Aset tetap bukan kelompok aset-aset lancar, tetapi digunakan untuk waktu yang panjang, lebih dari satu periode akuntansi, atau 1 (satu) tahun.
- d. Aset tetap dimiliki perusahaan, aset yang digunakan dalam operasi perusahaan, tetapi disewa dari pihak lain, bukan merupakan kelompok aset tetap.

Aset tetap seperti dimaksudkan di atas, dapat diperoleh dengan beberapa cara, diantaranya pembelian aset tetap, aset dibangun sendiri, pertukaran aset, transaksi aset dalam kombinasi bisnis, sewa, ataupun hibah pemerintah. Perbedaan perolehan aset tetap tersebut diatur dalam standar akuntansinya masing-masing, terutama pengakuan, pengukuran, dan pengungkapannya. Cara-cara perolehan aset tetap tersebut diatur dalam standar akuntansi, seperti ditunjukkan berikut ini.

- a. PSAK 16 perolehan aset tetap dengan cara pembelian, dibangun sendiri, dan pertukaran dengan aset non-moneter.

- b. PSAK 22 perolehan aset tetap dengan cara transaksi dalam kombinasi bisnis.
- c. PSAK 30 perolehan aset tetap dengan cara sewa pembiayaan.
- d. PSAK 61 perolehan aset tetap dengan cara hibah pembiayaan.

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Seperti halnya pengakuan aset-aset lainnya, biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

- a. Besar kemungkinan manfaat ekonomi di masa datang berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas; dan
- b. Biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal.

Kedua poin di atas merupakan prinsip umum pengakuan awal aset, dan pada saat bagian tertentu dari aset ada yang diganti, dan jika ada pengeluaran terjadi terkait aset tersebut selama masa manfaatnya. Hal yang terpenting dari prinsip pengakuan tersebut adalah manfaat ekonomis yang ditimbulkan di masa datang, sehingga harus mengakui sebagai aset tetap. Selain itu, pertimbangan hati-hati (*prudent*) harus digunakan untuk menentukan biaya perolehan aset berwujud atau bagian dari aset berwujud dapat dikategorikan sebagai aset tetap. Beberapa pertimbangan kehati-hatian adalah sebagai berikut:

- a. Pengeluaran modal versus pengeluaran beban
Entitas biasanya memiliki kebijakan kapitalisasi biaya perolehan aset berwujud. Perolehan aset yang melebihi batasan kapitalisasi merupakan pengeluaran modal, atau dicatat sebagai aset tetap. Sebaliknya, pembelian aset berwujud yang biaya perolehannya tidak melebihi

batasan kapitalisasi merupakan pengeluaran beban, atau dicatat sebagai beban pada periode berjalan.

b. Suku cadang dan pemeliharaan

Suku cadang dan pemeliharaan (*service equipment*) memenuhi kriteria aset tetap ketika entitas memperkirakan aset tetap tertentu digunakan selama lebih dari satu tahun dan nilainya cukup material. Dengan demikian, perlakuannya dicatat sebagai aset tetap dan disusutkan seperti aset tetap lainnya.

c. Aset tetap diperoleh dengan alasan lingkungan

Aset tetap yang tidak secara langsung memberikan dan meningkatkan manfaat ekonomis masa datang bagi entitas. Keberadaan aset tersebut diperlukan agar entitas memperoleh manfaat ekonomis masa datang dari aset tetap lainnya. Misalnya, entitas industri kimia yang harus memiliki pengolahan limbah kimia, sehingga tidak merusak lingkungan. Biaya yang berhubungan dengan pembangunan pengolahan limbah memenuhi kualifikasi aset tetap, memungkinkan entitas memperoleh manfaat ekonomi masa depan aset tetap lainnya yang digunakan entitas tersebut.

d. Biaya perolehan

Biaya perolehan aset tetap atau nilai moneter dari suatu aset tetap terdiri dari dua bagian, yaitu: 1) biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset tetap yang pertama kalinya, dan 2) biaya-biaya yang dikeluarkan setelah peroleh aset tetap, seperti biaya perawatan, biaya perbaikan, biaya penggantian, dan sebagainya.

Pertimbangan kehati-hatian-kehati-hatian tersebut mempengaruhi pemenuhan kualifikasi pengakuan awal aset tetap, dan pada saat yang sama aset tetap tersebut akan

diukur sebesar biaya perolehannya. Adapun biaya perolehan aset tetap dapat meliputi sebagai berikut:

a. Harga perolehan, meliputi bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan-potongan lain.

b. Biaya-biaya yang diatribusikan langsung membawa aset ke lokasi dengan kondisi yang diinginkan aset tersebut siap digunakan. Contohnya, biaya imbalan kerja, penyiapan lahan pabrik, penagangan (*huading*) atau penyerahan awal, perakitan dan instalasi, pengujian aset, dan komisi profesional. Biaya-biaya yang diatribusikan langsung tersebut merupakan biaya-biaya yang diperlukan sebelum aset tetap dapat digunakan sesuai dengan tujuannya. Selain itu, ada biaya-biaya yang sebenarnya tidak diperlukan, seperti kecelakaan kerja, kesalahan pemasangan sehingga harus mengganti peralatannya, biaya akibat tidak mematuhi regulasi pemerintah, dan sebagainya. Biaya-biaya yang seharusnya tidak diperlukan tersebut harus langsung dibebankan pada periode berjalan (tidak dikapitalisasi).

c. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan mempunyai kewajiban membongkar atau memindahkan, atau merestorasi aset tetap pada akhir masa manfaatnya.

Harga pembelian

Harga pembelian aset tetap adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset tetap saat konstruksi atau perolehan. Seperti diungkapkan sebelumnya, harga pembelian aset tetap meliputi jumlah yang dibayarkan untuk mendapatkan aset, termasuk bea impor dan pajak

pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan-potongan lain. Dengan demikian, pembelian aset tetap secara tunai dapat dengan mudah menentukan harga pembeliannya, yaitu harga pembeliannya.

Contoh, PT Putri membeli sebidang tanah dengan peruntukan pengeringan produk setengah jadi. Manajer perusahaan menandatangani wesel bayar senilai Rp 350.000.000, dan membayar tunai komisi real estate sebesar Rp 6.000.000, perobohan bangunan lama di atas tanah tersebut sebesar Rp 4.500.000, pajak properti sebesar Rp 12.500.000, dan *fee survey* sebesar Rp 2.000.000. Harga perolehan tanah tersebut dan jurnal yang disajikan sebagai berikut:

Harga beli tanah	350.000.000
Ditambah biaya terkait:	
Komisi <i>real estate</i>	6.000.000
Perobohan bangunan	4.500.000
Pajak properti	12.500.000
<i>Fee survey</i>	2.000.000
Total biaya terkait	25.000.000
Total perolehan tanah	375.000.000

Jurnal yang disajikan sebagai berikut:

Tanah	375.000.000
Wesel Bayar	350.000.000
Kas	25.000.000

Pembayaran kas ditangguhkan

Berbeda pembelian aset tetap dengan pembayaran kasnya ditangguhkan, maka harga perolehannya adalah sebesar harga tunai aset tetap pada saat pembeliannya. Saat pembayaran aset dilakukan, perbedaan nilai tunai dengan pembayarannya diakui sebagai beban bunga, kecuali biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi berdasarkan PSAK 26 (biaya pinjaman). Contoh, PT Putri membeli kendaraan seharga Rp 300.000.000, dengan pembayaran tangguhan atau cicilan sebanyak 3 kali, dan bunga yang dikenakan sebesar 5% per bulan. Dengan demikian bulan kedua, entitas membayar pokok pinjaman plus bunga berdasarkan saldo pinjaman bulan tersebut. Adapun jurnal yang disajikan sebagai berikut:

Jurnal pembelian kendaraan-truk:

Kendaraan-truk	300.000.000
Kas/Bank	100.000.000
Utang kendaraan-truk	200.000.000

Jurnal pembayaran cicilan kedua:

Utang kendaraan-Truk	100.000.000
Biaya bunga	10.000.000
Kas/Bank	110.000.000

Jurnal pembayaran cicilan ketiga:

Utang kendaraan-Truk	100.000.000
Biaya bunga	5.000.000
Kas/Bank	105.000.000

Biaya yang dapat diatribusikan langsung

PSAK 26 mengatur biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau produksi aset kualifikasian merupakan bagian dari biaya perolehan aset tetap. Aset kualifikasian (*qualifying assets*) merupakan aset yang membutuhkan suatu periode waktu yang substansi agar aset siap untuk digunakan atau dijual sesuai peruntukannya, seperti persediaan, pabrik, aset tak berwujud, dan *property* investasi. Biaya pinjaman tersebut dikapitalisasi menjadi bagian biaya perolehan aset tetap. Tingkat kapitalisasi menggunakan rata-rata tertimbang biaya pinjaman atau saldo pinjaman periode berjalan dari dana secara umum. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tersebut (suatu periode) tidak boleh lebih besar dari jumlah biaya pinjaman yang terjadi.

Sumber pinjaman dapat berupa pinjaman secara umum dan pinjaman spesifik untuk tujuan pembangunan aset tetap. Pinjaman secara umum dikapitalisasi dengan menggunakan tingkat kapitalisasi untuk pengeluaran atas aset. Sedangkan, pinjaman spesifik dikapitalisasi sebesar biaya pinjaman aktual atas pinjaman selama periode berjalan. Apabila terjadi penghasilan investasi atas pinjaman tersebut, maka diperkurangkan biaya pinjaman yang dikapitalisasi.

Contohnya, 1 Desember 2010, PT Putri mengikat kontrak dengan PT Putra untuk membangun pabrik pengolahan kopi. Kontrak tersebut bernilai Rp 1.025.000.000, Pabrik kopi tersebut dibangun di atas tanah milik PT Putri. PT Putri memperoleh dua sumber pinjaman, yaitu pinjaman umum dan pinjaman spesifik. Klasifikasi pinjaman tersebut sebagai berikut:

Tabel 7.1 Distribusi Biaya Pinjaman

Jenis Pinjaman	Bunga	Jumlah
Pinjaman umum		
Wesel Bayar	12%	600,000,000
Obligasi	8%	800,000,000
Pinjaman Spesifik		
Utang Bank	10%	400,000,000
Penghasilan Investasi (bunga)		10,000,000

Pembayaran PT Putri selama tahun 2012, yang selesai pengerjaannya 31 Desember 2012:

1	Januari	2011	Pembayaran 1	175,000,000
1	Maret	2011	Pembayaran 2	250,000,000
1	September	2011	Pembayaran 3	300,000,000
1	Desember	2011	Pembayaran 4	300,000,000
Total				1,025,000,000

Pengeluaran dialokasikan pertama kali untuk pengeluaran spesifik, dan selanjutnya dialokasikan untuk pinjaman secara umum. Adapun alokasinya ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 7.2 Alokasi Pengeluaran Spesifik

Tanggal	Pengeluaran	Pinjaman Khusus	Pinjaman Umum	Rata-rata Tertimbang				
2011								
Jan	1	175,000,000	175,300,000					
Mar	1	250,000,000	225,300,000	25,000,000	25,000,000	X	10/12	20,833,333
Sep	1	300,000,000		300,000,000	300,000,000	X	4/12	100,000,000
Des	1	300,000,000		300,000,000	300,000,000	X	1/12	25,000,000
								145,833,333

Rata-rata tertimbang biaya pinjaman (umum):

Wesel bayar	600,000,000	x	12%	72,000,000
Obligasi	800,000,000	x	8%	64,000,000
	<u>1,400,000,000</u>			<u>136,000,000</u>
Rata-rata tertimbang				9,71%

Biaya pinjaman yang di kapitalisasi:

Pinjaman spesifik	400,000,000	x	10%	40,000,000
Pinjaman umum	145,833,333	x	9,71%	14,160,417
Total				<u>54,160,417</u>
Penghasilan investasi				<u>10,000,000</u>
Total biaya pinjaman (dikapitalisasi)				<u>44,160,417</u>

Jurnal yang disajikan atas pembangunan pabrik tersebut sebagai berikut:

1 Jan 2011	Bangunan	175,000,000	
	Kas		175,000,000
1 Mar 2011	Bangunan	250,000,000	
	Kas		250,000,000
1 Sep 2011	Bangunan	300,000,000	
	Kas		300,000,000
1 Des 2011	Bangunan	300,000,000	
	Kas		300,000,000

1 Des 2011	Kas	10,000,000	
	Bangunan	44,160,417	
	Beban bunga	121,839,583	
	Kas		176,000,000

Penghitungan beban bunga sebagai berikut:

Biaya pinjaman spesifik	40,000,000
Biaya pinjaman umum (rata-rata tertimbang)	136,000,000
Total biaya pinjaman	<u>176,000,000</u>
Biaya pinjaman dikapitalisasi (bruto)	<u>54,160,417</u>
Beban bunga	<u>121,839,583</u>

Perolehan aset tetap gabungan

Aset tetap dapat saja diperoleh dengan secara gabungan, atau beberapa aset tetap dengan harga gabungan pula. Biaya perolehan aset tetap harus dialokasikan ke tiap-tiap aset tersebut. Alasannya, tiap-tiap aset tersebut memiliki masa manfaat yang berbeda-beda untuk keperluan penyusutannya. Pemisahan aset perolehan secara gabungan dengan cara proporsi nilai wajar dari aset-aset tersebut. Contohnya, PT Remaja membeli aset secara gabungan seharga Rp 1.750.000.000. Aset-aset tersebut terdiri dari tanah, bangunan, mesin, dan kendaraan (truk) dengan rincian nilai wajar masing-masing sebagai berikut:

Tanah	Rp	350,000,000
Bangunan	Rp	950,000,000
Mesin	Rp	450,000,000
Kendaraan (Truk)	Rp	<u>250,000,000</u>
Total		2,000,000,000

Harga perolehan aset tetap senilai Rp 1.750.000.000 dapat dialokasikan ke tiap-tiap aset sebagai berikut:

Tanah	350	: 2.000	1.750.000.000	= Rp	306.250.000
Bangunan	950	: 2.000	1.750.000.000	= Rp	831.250.000
Mesin	450	: 2.000	1.750.000.000	= Rp	393.750.000
Kendaraan (Truk)	250	: 2.000	1.750.000.000	= Rp	218.750.000
					<hr/> 1.750.000.000

Jurnal yang disajikan atas perolehan aset tetap gabungan di atas sebagai berikut:

Tanah	306.250.000
Bangunan	831.250.000
Mesin	393.750.000
Kendaraan (Truk)	218.750.000
Kas	<hr/> 1.750.000.000

Pembongkaran, pemindahan, dan Restorasi

Biasanya kepemilikan aset tetap diikuti kewajiban untuk membongkar atau memindahkan aset tetap pada akhir umur manfaatnya, atau relokasi aset tetap tersebut. Dengan kata lain, kewajiban pembongkaran aset tetap sudah ada pada saat perolehan aset, dan telah menjadi kewajiban pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Pengukuran awal atas aset tetap seperti itu, mengharuskan untuk mengestimasi dan menghitung nilai tunai (*present value*) aset tetap yang berhubungan dengan pembongkaran dan pemindahan aset tetap, dan biaya restorasi aset tetap tersebut, ditambahkan dengan biaya perolehan aset tetap.

Kapitalisasi biaya perolehan tersebut plus estimasi biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap, dan restorasi aset tetap, akan disusutkan selama masa manfaatnya. Estimasi biaya pembongkaran disajikan sebagai provisi yang disesuaikan dengan berjalannya waktu, dan pada akhir umur manfaat, nilai provisi akan sama dengan nilai yang diharapkan dikeluarkan untuk mengeksekusi pembongkaran aset tetap tersebut. Estimasi biaya pembongkaran (diakui sebagai aset tetap) yang disusutkan, akan menjadi nihil pada akhir umur manfaatnya.

Contoh, PT Kapita perusahaan telekomunikasi dengan memasang kabel jaringan di bawah tanah yang melewati jalan-jalan milik pemerintah (negara). Biaya perolehan dan pemasangan kabel jaringan bawah tanah sebesar Rp 6.000.000.000, dan akan dibongkar pada akhir tahun ke 5, dengan perjanjian akan mengembalikan kondisi jalanan seperti semula. Estimasi biaya pembongkaran sampai mengembalikan kondisi jalan sebesar Rp 500.000.000, dengan tingkat diskonto sebesar 9%. Dengan demikian total biaya perolehan aset tetap tersebut adalah:

Biaya perolehan dan pemasangan instalasi	R	P	6.000.000.000
Nilai tunai estimasi pembongkaran	R	P	500.000.000
	P		0 : $(1 + 9\%)^5$
Total biaya perolehan aset tetap	R	P	<hr/> 6.324.965.693

Jurnal yang disajikan sebagai berikut:

Kabel bawah tanah	6,324,965,69 3	
Kas		6,000,000,00 0
Provisi		324,965,693

Jurnal penyesuaian penyusutan akhir tahun:

Kabel bawah tanah	1,264,993,13 9	
Akumulasi penyusutan		1,264,993,13 9

Pertukaran aset tetap

Aset tetap dapat saja diperoleh dengan pertukaran aset nonmoneter, atau kombinasi moneter dan nonmoneter. Aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran dengan aset nonmoneter dinilai dengan nilai wajarnya, kecuali:

1. Transaksi pertukaran tidak memiliki nilai substansi, atau;
2. Nilai wajar dari aset yang diterima dan diserahkan tidak dapat diukur secara andal.

Transaksi pertukaran aset mempertimbangkan substansi komersial untuk pengukuran biaya perolehan. Aset dikatakan tidak (kurang) memiliki substansi komersial, jika arus kas aset yang diterima berbeda dengan arus kas aset yang diserahkan, nilai khusus entitas (kegiatan operasional) terpengaruhi akibat pertukaran aset, dan selisih antara perbedaan arus kas dengan signifikansi nilai wajar aset yang dipertukarkan. Sedangkan, nilai wajar yang tersedia yang digunakan dalam pertukaran aset tetap ditunjukkan berikut ini.

Tabel 7.3 Nilai Wajar Pertukaran Aset

Nilai wajar yang dapat diandalkan		Pengukuran
Aset diserahkan	Aset diterima	
√	√	Nilai wajar (aset diserahkan)
*	√	Nilai wajar (aset diterima)
*	*	Nilai tercatat (aset diserahkan)

Contoh, PT Remaja menukar aset tetap dalam bentuk tanah dengan nilai tercatat sebesar Rp 500.000.000, dengan mesin dengan nilai Rp 1.200.000.000, dan diterima tunai kas sebesar Rp 300.000.000. Nilai wajar tanah diestimasi dengan nilai sebesar Rp 1.700.000.000. Selisih nilai wajar tanah dengan kas yang diterima, yaitu sebesar Rp 1.400.000.000 dicatat sebagai harga perolehan mesin. Adapun jurnal yang disajikan untuk pertukaran aset tetap yang memiliki substansi komersial sebagai berikut:

Kas	300,000,000	
Mesin	1,400,000,00 0	
Tanah		500,000,000
Keuntungan pelepasan tanah		1,200,000,00 0

Contoh pertukaran aset tetap yang tidak memiliki substansi komersial, PT Remaja memiliki mesin penggilingan padi tipe BX5 dengan nilai buku Rp 150.000.000, awalnya mesin tersebut diperoleh dengan

dengan harga perolehan Rp 200.000.000 dan sudah disusutkan sebesar Rp 50.000.000. Mesin tersebut ditukar dengan mesin penggilingan padi tipe BY5, yang mempunyai nilai wajar sebesar Rp 155.000.000, dan penerimaan kas sebesar Rp 10.000.000. Mesin penggilingan padi tipe BX5 dan tipe BY5 mempunyai fungsi yang sama. Transaksi ini tidak memiliki substansi komersial, karena mesin penggilingan padi tersebut memiliki fungsi yang sama, dan arus kas mendatang diestimasikan tidak mengalami perubahan yang signifikan. Dengan demikian, mesin penggilingan padi tipe BY5 dicatat sebesar pengurangan nilai buku mesin penggilingan padi tipe BX5 sebesar Rp 150.000.000 dengan kas yang diterima Rp 10.000.000. Nilai aset tetap mesin penggilingan padi BY5 tersebut dicatat sebesar Rp 140.000.000. Adapun jurnal yang disajikan sebagai berikut:

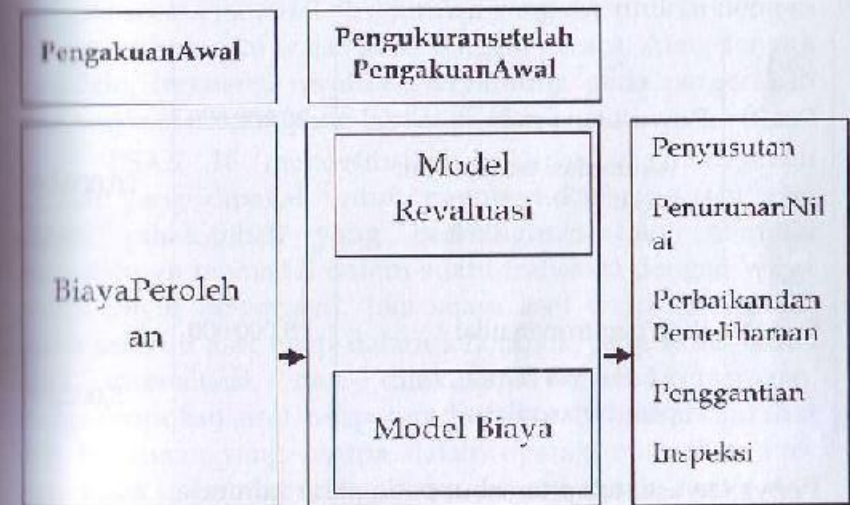
Kas	10.000.000	
Mesin penggilingan padi BY5	140.000.000	
Akumulasi penyusutan	50.000.000	
Mesin penggilingan padi BX5		200.000.000

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Pengukuran aset tetap pada awal pengakuannya dilakukan berdasarkan harga perolehan, yang terdiri dari biaya pembelian, biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung, dan estimasi biaya pembongkaran dan pemindahan, serta biaya restorasi lokasi aset tetap tersebut. Dengan berjalannya waktu, atau setelah entitas bisnis melakukan pengukuran awal seperti yang telah disebutkan, maka entitas memiliki pilihan metode pengukuran aset tetap, yaitu model biaya (*cost model*) atau model revaluasi (*valuation model*). Kedua model pengukuran tersebut

memperlakukan sama atas biaya penyusutan, penurunan nilai, dan biaya-biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap. Hal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 7.1 Model Pengukuran Aset Tetap



Model Biaya

Model biaya adalah model yang lazim digunakan selama ini. Setelah pengakuan awal aset tetap, model ini mencatat aset tetap sebesar harga perolehannya dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset tetap. Contoh, tanggal 2 Januari 2011, PT Daya Jaya membeli mesin dengan biaya perolehan Rp 100.000.000. Entitas mengestimasi mesin tersebut mempunyai masa manfaat 5 tahun tanpa nilai residu (sisa). Entitas menggunakan metode garis lurus untuk penyusutan aset tetapnya. Kondisi mesin pada akhir tahun diestimasi

mengalami penurunan nilai sebesar Rp 5.000.000. Jurnal yang disajikan sebagai berikut:

2011			
Jan, 2	Mesin	100,000,000	
	Kas		100,000,000
2011			
Des,31	Penyusutan mesin	20,000,000	
	Akumulasi penyusutan mesin		20,000,000
2011			
Des,31	Rugi penurunan nilai	5,000,000	
	Akumulasi rugi penurunan nilai		5,000,000

Penyajian aset tetap tersebut pada akhir tahun:

Aset Tetap - Mesin

Biaya perolehan		100,000,000
Akumulasi penyusutan	20,000,000	
Akumulasi rugi penurunan nilai	5,000,000	25,000,000
Aset tetap (netto)		<u>75,000,000</u>

Model Revaluasi

Model revaluasi mengukur aset tetap berdasarkan nilai wajarnya. Pengukuran ini harus dilakukan secara andal, dan dicatat sebesar nilai revaluasiannya. Nilai

revaluasi adalah nilai wajar pada tanggal dilakukannya revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Standar akuntansi tidak mengharuskan revaluasi setiap tahun, tetapi revaluasi dilakukan dengan teratur cukup regular, untuk memastikan jumlah tercatat aset tetap tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal neraca. Atau dengan kata lain, frekuensi revaluasi tergantung pada pergerakan nilai wajar aset tetap yang bersangkutan.

PSAK 16 mendefinisikan nilai wajar merupakan jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar (*arm's length transaction*). Jika suatu aset tetap direvaluasi maka seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama harus pula direvaluasi, dan dilakukan secara bersamaan. Pengelompokan aset tetap tersebut dapat didasarkan sifat dan kegunaan yang serupa dalam operasi normal entitas. Kelompok aset tetap yang lazim, seperti tanah, tanah dan bangunan, mesin, peralatan pabrik, dan kendaraan. Nilai wajar biasanya ditentukan oleh penilai. Namun, entitas dapat mengestimasi nilai wajar dengan pendekatan penghasilan atau biaya pengganti yang telah disusutkan (*depreciated replacement cost approach*).

Ketika suatu aset tetap direvaluasi, maka akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi diperlakukan dengan salah satu cara berikut ini.

1. Disajikan kembali secara proporsional dengan perubahan dalam jumlah tercatat bruto dari aset sehingga jumlah tercatat aset setelah revaluasi sama dengan jumlah revaluasi.

2. Dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto dari aset dan jumlah tercatat neto setelah eliminasi disajikan kembali sebesar jumlah revaluasian dari aset tersebut.

Metode kedua di atas adalah metode yang paling sering digunakan. Adapun contoh-contoh berikut ini menggunakan metode kedua tersebut. Contohnya, PT Daya Jaya memiliki mesin dengan biaya perolehan Rp 600.000.000 yang diperoleh pada awal tahun 2011. Masa manfaat mesin tersebut adalah 6 tahun, tanpa nilai sisa. PT memilih metode revaluasi untuk kelompok aset tetap tersebut. Nilai wajar pada akhir tahun 2012 (tahun kedua) tersebut sebesar Rp 650.000.000. Adapun jurnal yang disajikan pada akhir tahun tahun dan revaluasian aset tetap sebagai berikut:

2011			
Jan, 2	Mesin	600,000,000	
	Kas		600,000,000
2011			
Des, 31	Penyusutan mesin	100,000,000	
	Akumulasi penyusutan mesin		100,000,000
2012			
Des, 31	Penyusutan mesin	100,000,000	
	Akumulasi penyusutan mesin		100,000,000

Nilai buku mesin per 31 Desember 2012:

Nilai buku mesin	
Biaya perolehan	600.000.000
Akumulasi penyusutan tahun 1	100.000.000

Akumulasi penyusutan tahun 2	100,000,000	200,000,000
Jumlah		400,000,000

Selisih *surplus* aset tetap mesin:

Selisih <i>surplus</i> revaluasi	
Nilai wajar mesin (revaluasi)	650,000,000
Nilai buku mesin	400,000,000
Jumlah	250,000,000

Selisih lebih nilai wajar dari nilai tercatat aset tetap disajikan pada akun *surplus* revaluasi, yang merupakan bagian dari komponen pendapatan komprehensif lainnya. Berdasarkan contoh sebelumnya, jurnal yang disajikan atas revaluasi aset tetap tersebut sebagai berikut:

Metode proporsional:

2012			
Des, 31	Aset tetap - Mesin	375,000,000	
	Akumulasi penyusutan mesin		125,000,000
	Surplus revaluasi		250,000,000

Nilai peralatan (<i>Gross Up</i>)	650,000,000	x	6/4	975,000,000
Harga perolehan				600,000,000
Tambahan nilai mesin				375,000,000
Surplus revaluasi				250,000,000
Tambahan akumulasi penyusutan				125,000,000

Metode eliminasi:

2012			
Des,31	Akumulasi penyusutan mesin	200,000,000	
	Aset tetap - Mesin		200,000,000
2012			
Des,31	Aset tetap - Mesin	250,000,000	
	Surplus revaluasi		250,000,000

Kenaikan aset tetap yang diakibatkan revaluasi dapat langsung disajikan keakun *surplus* revaluasi (kredit). Namun, apabila sebelumnya terjadi penurunan nilai yang telah diakui dalam laporan laba-rugi komprehensif, maka kenaikan tersebut harus diakui dalam laporan laba-rugi sampai sebesar nilai jumlah penurunan nilai yang telah disajikan. Kondisi lainnya, jika jumlah aset tetap mengalami penurunan akibat revaluasi, maka penurunan tersebut harus diakui dalam laporan laba-rugi komprehensif. Penurunan nilai akibat revaluasi yang langsung di debit ke akun *surplus* revaluasi, dengan catatan selama penurunan nilai tersebut tidak melebihi saldo kredit *surplus* revaluasi aset tetap tersebut.

Penurunan nilai dan peningkatan nilai akibat revaluasi aset tetap periode berjalan, dengan kondisi penurunan nilai dan peningkatan nilai pada periode-periode sebelumnya akan memengaruhi penyajian jurnal untuk pelaporan keuangan. Contoh, PT Daya Jaya mempunyai aset tetap mesin dengan biaya perolehan sebesar Rp 250.000.000 dan akumulasi penyusutan sebesar Rp 50.000.000. Dengan berbagai kondisi revaluasian, jurnal yang disajikan sebagai berikut:

1. Entitas melakukan revaluasi dengan nilai sebesar Rp 220.000.000:

Akumulasi penyusutan - Mesin	50,000,000	
Aset tetap - Mesin		50,000,000
Aset tetap - Mesin	20,000,000	
Surplus revaluasi		20,000,000
2. Entitas melakukan revaluasi dengan nilai sebesar Rp 190.000.000:		

Akumulasi penyusutan - Mesin	50,000,000	
Aset tetap - Mesin		50,000,000
Kerugian penurunan nilai	10,000,000	
Aset tetap - Mesin		10,000,000

3. Entitas melakukan revaluasi dengan nilai sebesar Rp 220.000.000, periode sebelumnya pernah dilakukan revaluasi dengan penurunan sebesar Rp 5.000.000.

Akumulasi penyusutan - Mesin	50,000,000	
Aset tetap - Mesin		50,000,000
Aset tetap - Mesin	20,000,000	
Keuntungan investasi		5,000,000
Surplus revaluasi		15,000,000

4. Entitas melakukan revaluasi dengan nilai sebesar Rp 190.000.000, periode sebelumnya pernah dilakukan revaluasi dengan *surplus* sebesar Rp 7.000.000:

Akumulasi penyusutan - Mesin	50.000.000	
Aset tetap - Mesin		50.000.000
Surplus revaluasi	7.000.000	
Keuntungan investasi		3.000.000
Surplus revaluasi		10.000.000

Perlakuan Saldo Revaluasi

Pemindahan saldo *surplus* revaluasi ke saldo laba tidak diatur secara khusus. Namun, pemindahan saldo *surplus* tersebut dimungkinkan dengan dua kondisi sebagai berikut:

1. *Surplus* revaluasi yang disajikan dalam pendapatan komprehensif lainnya dapat dipindahkan langsung ke saldo laba pada saat aset tetap tersebut dihentikan pengakuannya (dihapuskan, dijual, dan sebagainya).
2. *Surplus* revaluasi dipindahkan sejalan dengan penggunaan aset tetap tersebut, dipindahkan ke saldo laba sebesar selisih jumlah penyusutan nilai revaluasian dengan penyusutan berdasarkan harga perolehan aset tetap.

Contoh, PT Daya Jaya memiliki aset tetap mesin dengan harga perolehan sebesar Rp 150.000.000. Aset tersebut direvaluasi dengan nilai revaluasinya sebesar Rp 175.000.000. Umur manfaat diestimasi 10 tahun. Jurnal *surplus* revaluasi, penyusutan setelah revaluasi, dan pemindahan saldo revaluasi disajikan sebagai berikut:

Aset tetap - Mesin	25.000.000	
Surplus revaluasi		25.000.000
Penyusutan mesin	175.000.000	
Akumulasi penyusutan mesin		175.000.000
Surplus revaluasi	2.500.000	
Saldo laba		2.500.000

Perhitungan selisih *surplus* revaluasi:

Penyusutan setelah revaluasi	175.000.000	: 10 tahun	17.500.000
Penyusutan sebelum revaluasi	150.000.000	: 10 tahun	15.000.000
Selisih surplus			2.500.000

Selain itu, berikut ini dijelaskan dampak penggunaan model biaya dan model revaluasi, dan dampak-dampak perubahan dari model biaya ke model revaluasi, atau sebaliknya. Kondisi nilai revaluasi aset tetap lebih besar dari

harga perolehannya ditunjukkan pada tabel perubahan model revaluasi berikut ini.

Tabel 7.4 Perubahan Model Revaluasi

Perubahan ke Model Biaya	Perubahan ke Model Revaluasi
Relevan dan keandalan informasi	
Informasi yang diberikan lebih kurang relevan	Informasi yang diberikan lebih relevan namun lebih kurang dapat diandalkan, karena membutuhkan model estimasi
Laba-rugi	
Laba menjadi lebih besar; penyusutan lebih kecil, dan keuntungan penjualan aset tetap diakui sebagai laba-rugi.	Laba menjadi lebih kecil; penyusutan menjadi lebih kecil, keuntungan penjualan aset tetap tidak material (dicatat mendekati harga pasar)
Laporan posisi keuangan	
Aset dan ekuitas menjadi lebih kecil	Aset dan ekuitas menjadi lebih kecil
Penyusutan	
Penyusutan lebih kecil	Penyusutan lebih besar
Biaya tambahan lainnya	
Tidak ada biaya tambahan untuk penilaian aset tetap	Biaya tambahan yang signifikan untuk menilai wajar aset tetap
Proses pembukuan dan administrasi	
Tetap seperti lazimnya	Menjadi lebih kompleks
Debt to Equity Ratio (DER)	
DER menjadi lebih besar, karena aset menjadi lebih kecil. Kondisi DER tidak menguntungkan	DER menjadi lebih baik, karena nilai aset lebih besar. Kondisi DER lebih menguntungkan

Rasio: ROE dan ROI

Laba lebih besar dengan aset dan ekuitas yang lebih kecil, ROI dan ROE yang lebih tinggi (entitas lebih tinggi)	Laba lebih kecil dengan aset dan ekuitas yang lebih besar, ROI dan ROE yang lebih kecil (entitas tampak tidak menguntungkan)
---	--

Pertanyaan

Jawablah setiap pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas untuk membuktikan pemahaman teoretis pembahasan bab ini.

- Untuk pengakuan suatu aset tetap berwujud harus memenuhi definisi sebagai aset tetap tersebut. Uraikan definisi aset tetap berwujud? Jelaskan beberapa garis penting dari definisi tersebut?
- Untuk menyajikan aset tetap berwujud pada laporan posisi keuangan harus memenuhi persyaratan pengakuan dan pengukuran. Jelaskan kriteria pengakuan aset tetap berwujud? Jelaskan perbedaan pengukuran awal dengan pengukuran selanjutnya setelah pengakuan awal aset tetap tersebut?
- Aset tetap berwujud dapat diperoleh dengan berbagai cara, selain perolehan aset tetap dengan cara pembelian. Uraikan beberapa cara perolehan aset tetap berwujud beserta perlakuan akuntansinya? Jelaskan perlakuan akuntansi atas biaya-biaya yang terjadi setelah perolehan awal aset tetap tersebut?
- Pengukuran setelah pengakuan awal aset tetap dapat dilakukan dengan model biaya dan model revaluasi. Jelaskan perbedaan kedua model tersebut? Jelaskan perlakuan akuntansi atas selisih *surplus* pada metode revaluasi tersebut?

Latihan

3. Tanggal 1 Januari 2011, PT Fantasi membeli sebidang tanah untuk pembangunan pabrik dengan harga sebesar Rp150.000.000 secara tunai. Untuk mendanai konstruksi pabrik tersebut, entitas tersebut meminjam dari bank sebesar Rp 500.000.000, suku bunga 9% dengan jangka waktu 2 tahun. Selain itu, entitas juga memperoleh pinjaman lain pada tanggal 1 Januari 2009 sebesar Rp 300.000.000, dengan tingkat suku bunga 11% jangka waktu 4 tahun. Pembangunan pabrik tersebut selesai dibangun dan siap digunakan pada tanggal 1 Desember 2011. Adapun pengeluaran-pengeluaran yang terjadi selama pembangunan pabrik tersebut sebagai berikut:

Tanggal		Pengeluaran
1 Maret	2011	100.000.000
1 Mei	2011	250.000.000
1 Juli	2011	300.000.000
1 Agustus	2011	400.000.000
1 Nopember	2011	500.000.000

Instruksi:

- Hitunglah biaya bunga yang dapat dikapitalisasi?
 - Hitunglah biaya perolehan aset tetap pembangunan pabrik tersebut?
 - Sajikan jurnal yang diperlukan selama terjadinya pengeluaran-pengeluaran dan saat selesainya pembangunan aset tetap pabrik tersebut?
4. PT Dinasti bergerak di bidang pertambangan emas yang membangun terowongan di bawah tanah untuk

pengangkutan emas ke pabrik. Biaya perolehan dan pembangunan terowongan tersebut seharga Rp 1.250.000.000. Pembangunan terowongan tersebut melewati jalan-jalan protokol pemerintah propinsi. Akhir tahun ke 20, terowongan tersebut akan dibongkar dan meruntuhkan jalan-jalan protokol tersebut. Entitas bisnis mengestimasi biaya pembongkaran dan pengembalian kondisi jalan-jalan protokol seperti semula dengan biaya sebesar Rp 250.000.000.

Instruksi:

- Hitunglah harga perolehan aset tetap bangunan tersebut?
 - Sajikan akun aset tetap terkait pada laporan keuangan entitas tersebut?
5. PT Tegar mempunyai aset tetap mesin dengan biaya perolehan Rp 225.000.000 dengan nilai buku Rp 150.000.000. Entitas tersebut menukar mesin lama itu dengan mesin baru. Saat pertukaran mesin lama mempunyai nilai wajar sebesar Rp 125.000.000, dan entitas menyerahkan kas sebesar Rp 175.000.000.

Instruksi:

- Apakah pertukaran aset tetap tersebut mempunyai substansi komersial? Uraikan alasannya?
- Hitunglah harga perolehan aset tetap tersebut saat transaksi pertukaran?
- Sajikan jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi pertukaran?

Pengertian dan Alokasi Penyusutan

Aset tetap dipergunakan dalam operasional entitas bisnis untuk memperoleh pendapatan. Dalam proses pemanfaat atau pemakaian aset tetap tersebut tentunya akan mengalami penurunan kemampuan potensial, dan pendapatan yang dihasilkan akan semakin berkurang. Dengan demikian, biaya perolehan aset tetap harus dialokasikan sepanjang masa manfaat (umur ekonomis) dari aset tetap tersebut secara sistematis. Proses pengalokasian biaya perolehan aset tetap dengan cara sedemikian rupa sehingga jumlah yang disusutkan dapat dialokasikan secara sistematis selama umur manfaatnya. Lebih mudahnya dipahami, penyusutan adalah pengalokasian harga perolehan aset tetap menjadi beban pada periode akuntansi yang menikmati manfaat dari aset tersebut.

Aset tetap diperoleh dengan mengapitalisasi pengeluaran yang berhubungan dengan aset tersebut, atau biasa disebut pengeluaran modal (*capital expenditure*). Jenis pengeluaran seperti itu tidak langsung dibebankan keseluruhan pengeluaran perolehan aset pada periode akuntansi diperolehnya aset tetap tersebut. Ketika pembebanan seluruhnya dilakukan pada periode berjalan, maka beban periode berjalan akan menanggung terlalu berat. Sedangkan, beban periode berikutnya yang menikmati manfaat ekonomis dari aset tetap tersebut menjadi lebih ringan. Hal demikian tidak sesuai dengan prinsip akuntansi, penandingan (*matching*) secara proporsional antara pendapatan dengan beban.

Untuk menciptakan penandingan yang adil antara pembebanan pengeluaran dengan manfaat dari pengeluaran tersebut maka dilakukan penyusutan. Penyusutan untuk aset tetap biasa juga diistilahkan dengan depresiasi (*depreciation*). Terdapat tiga faktor yang dapat dipertimbangkan untuk mengalokasikan nilai aset tetap sebagai biaya penyusutan (lazim diistilahkan beban), yaitu:

1. Nilai biaya aset yang disusutkan (*depreciable asset*).
2. Taksiran masa manfaat aset tetap.
3. Metode penyusutan yang sesuai.

Alokasi biaya perolehan aset tetap yang akan disusutkan harus diukur dengan sistematis dan rasional, tanpa dipengaruhi penerapan kebijakan akuntansi penilaian aset tetap menggunakan model biaya (*cost model*) ataukah model revaluasi (*recvaluation model*). Nilai biaya aset tetap yang disusutkan dihitung dengan mengurangi nilai biaya perolehan suatu aset tetap (nilai pengukuran awal) dengan estimasi nilai residu atau nilai sisa suatu aset tetap pada akhir masa manfaat aset tersebut. Dasar pertimbangan nilai residu adalah estimasi nilai yang akan diperoleh entitas saat aset tetap tersebut dilakukan penjualan atau penghentian aset tetap dari penggunaannya masa akhir manfaat aset tetap. Entitas berkewajiban menelaah kembali (*review*) nilai residu setiap aset tetap pada setiap akhir tahun buku, sebagaimana disyaratkan PSAK 16. Apabila hasil *review* berbeda dengan estimasi sebelumnya, maka perbedaannya diperlakukan berdasarkan PSAK 25, yaitu perubahan estimasi yang diterapkan secara prospektif.

Contoh, PT Sarina membeli aset tetap berupa pabrik tekstil dengan harga perolehan sebesar Rp 655.000.000. Untuk menggunakan aset tersebut, entitas mengeluarkan biaya pemasangan sebesar Rp 25.000.000. dan biaya

pengiriman sebesar Rp 10.000.000. Estimasi nilai residu dari aset tetap tersebut sebesar Rp 20.000.000. Nilai biaya yang dapat disusutkan adalah sebagai berikut:

Harga perolehan aset tetap		655.000.000
Biaya pemasangan	25.000.000	
Biaya pengiriman	10.000.000	35.000.000
Biaya perolehan aset tetap		620.000.000
Nilai residu		20.000.000
Nilai biaya aset tetap yang disusutkan		600.000.000

Umur ekonomis atau masa manfaat aset tetap merupakan jangka waktu yang ekspektasikan aset tetap tersebut dapat digunakan oleh entitas pemiliknya. Pertimbangan penentuan masa manfaat aset tetap didasarkan jangka waktu penggunaan atau pengonsumsiannya proporsi tertentu umur ekonomis sampai penghentian penggunaan aset tetap tersebut, dan bahkan kebijakan ini juga dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman entitas menggunakan aset tetap yang sejenis. Selain itu, kebijakan entitas terhadap masa manfaat aset tetap dapat didasarkan peraturan pemerintah, seperti regulasi perpajakan, dan lainnya. Dengan variatifnya pertimbangan-pertimbangan estimasi masa manfaat aset tetap, maka memungkinkan perbedaan antara umur ekonomis dengan masa manfaat aset tetap. Namun, pembebanan penyusutan mengacu pada masa manfaat dari aset tetap yang dimiliki entitas.

Seperti pembahasan sebelumnya, estimasi masa manfaat juga mensyaratkan entitas untuk menelaah masa manfaat setiap aset tetap minimum setiap akhir tahun buku. Apabila terjadi perbedaan hasil telaah masa manfaat aset

tetap dengan estimasi sebelumnya, maka selisihnya diperlakukan berdasarkan PSAK 25, perubahan estimasi diterapkan secara prospektif. Pertimbangan dalam menentukan masa manfaat aset tetap, antara lain: 1) ekspektasi penggunaan aset tetap; 2) keusangan teknis dan komersial (perubahan teknologi atau pasar aset); 3) pembatasan penggunaan atau pembatasan legal aset tetap (tanggal kadaluwarsa penggunaan sesuai kontrak).

Selain nilai biaya aset yang disusutkan dan taksiran masa manfaat aset tetap, metode penyusutan juga menentukan jumlah alokasi nilai aset tetap yang disusutkan. Metode penyusutan menentukan cara dalam mengalokasikan penyusutan nilai aset secara sistematis selama periode masa manfaat aset tetap. Pilihan metode penyusutan yang diterapkan entitas harus mencerminkan ekspektasi pola penggunaan aset. Pola penggunaan aset mencerminkan fungsi waktu atau fungsi penggunaan aset tetap secara fisik. Metode penyusutan yang lazim digunakan oleh entitas bisnis, yaitu: 1) metode garis lurus; 2) metode pembebanan menurun; 3) metode unit produksi.

Metode-metode Penyusutan

Standar akuntansi mensyaratkan entitas untuk memilih suatu metode penyusutan yang telah disediakan regulasi tersebut. Metode penyusutan tersebut mengalokasikan biaya perolehan aset atau nilai revaluasi secara sistematis untuk merefleksikan pola manfaat aset tetap yang digunakan. Berikut pembahasan metode-metode penyusutan tersebut sebagai berikut:

1. Metode garis lurus (*straight-line method*)

Metode penyusutan garis lurus merupakan metode yang paling sederhana, yang mengasumsikan penggunaan aset tetap secara konstan selama masa manfaat aset tetap

tersebut, dan mendasarkan alokasi fungsi waktu penggunaan aset tetap. Biaya penyusutan dihitung dengan mengalokasikan nilai aset secara sama (rata) untuk setiap perolehannya selama masa manfaat aset tetap. Adapun biaya penyusutan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Beban penyusutan} &= \frac{\text{Jumlah disusutkan}}{\text{Umur manfaat Aset}} \\ &= \frac{\text{Biaya perolehan} - \text{Nilai residu}}{\text{Umur manfaat Aset}} \end{aligned}$$

Contoh, PT Sampean memiliki aset tetap dengan nilai Rp 110.000.000. Aset tetap tersebut diperoleh pada awal 2011, estimasi umur manfaat 5 tahun dan nilai residu sebesar Rp 10.000.000. Adapun penghitungan beban penyusutan per tahunnya adalah:

$$\begin{aligned} \text{Beban penyusutan} &= \frac{110.000.000 - 10.000.000}{5 \text{ Tahun}} \\ &= 20.000.000 \text{ per tahun} \end{aligned}$$

Pembebanan penyusutan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku aset tetap untuk setiap tahunnya dapat ditunjukkan pada tabel beban penyusutan metode garis lurus berikut ini.

Tabel 8.1 Metode Penyusutan Garis Lurus

Tahun	Nilai Buku	Biaya Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
	Awal Tahun			Akhir Tahun
1	110000000	20,000,000	20,000,000	90,000,000
2	90,000,000	20,000,000	40,000,000	70,000,000
3	70,000,000	20,000,000	60,000,000	50,000,000
4	50,000,000	20,000,000	80,000,000	30,000,000
5	30,000,000	20,000,000	100,000,000	10,000,000

Berdasarkan tabel di atas, jurnal penyesuaian beban penyusutan yang disajikan setiap akhir tahun sebagai berikut:

Biaya penyusutan	20,000,000	
Akumulasi penyusutan		20,000,000

Selama tidak mengalami perubahan nilai revaluasi, nilai residu, dan faktor lainnya, maka beban penyusutan akan sama sampai umur manfaat aset tetap. Nilai buku aset tetap pada akhir masa manfaat adalah sebesar Rp 10.000.000, atau sebesar nilai residu yang telah diestimasi sebelumnya. Nilai buku aset tetap menentukan keuntungan atau kerugian penjualan aset tetap. Apabila harga jual aset tetap di atas nilai bukunya, maka penjualan aset tetap memperoleh keuntungan. Sebaliknya, apabila harga jual aset tetap di bawah nilai bukunya, maka penjualan aset tetap mengalami kerugian. Metode penyusutan garis lurus ini menggambarkan nilai buku aset tetap semakin menurun, sedangkan beban penyusutannya tetap. Hal tersebut

terkadang tidak sesuai dengan pola penggunaan aset tetap dan nilai ekonomisnya.

2. Metode saldo menurun (*double-declining balance method*)

Metode saldo menurun membebaskan penyusutan yang lebih tinggi pada tahun-tahun awal pemanfaatan aset tetap dibandingkan tahun-tahun akhir pemanfaatan aset tetap. Asumsi metode ini adalah pemanfaatan atau produktivitas aset tetap pada tahun-tahun awal lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun akhir, sehingga pembebanan penyusutan yang harus diperkurangkan juga harus lebih besar. Metode saldo menurun yang biasa digunakan entitas bisnis adalah metode saldo menurun dan metode jumlah angka tahun.

a. Metode saldo menurun (*declining balance method*)

Metode ini membebaskan penyusutan dengan mengalikan nilai buku aset tetap dengan tarif penyusutan yang dinyatakan dengan persentase tertentu. Besaran persentase tersebut adalah dua kali lipat dari persentase hasil penghitungan pada metode penyusutan garis lurus. Metode ini menunjukkan beban penyusutan dengan nilai yang lebih tinggi pada tahun-tahun awal, dan akan berkurang pada tahun-tahun selanjutnya. Menghitung persentase penyusutan pada metode garis lurus dengan cara membagi beban penyusutan tahunan dengan harga perolehan yang disusutkan (harga perolehan dikurangkan dengan nilai residu). Contoh sebelumnya, persentase penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase garis lurus} &= \frac{20,000,000}{100,000,000} \\
 &= 20\% \\
 \text{Tarif saldo menurun} &= 20\% \times 2 \\
 &= 40\%
 \end{aligned}$$

Penghitungan biaya penyusutan dengan metode saldo menurun digunakan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Biaya penyusutan} = \text{Nilai buku awal tahun} \times \text{Tarif saldo menurun}$$

Metode ini membebankan penyusutan tidak memperkurangkan nilai perolehan dengan nilai residu aset tetap. Contoh sebelumnya, beban penyusutan dengan menggunakan metode saldo menurun pada akhir tahun pertama sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Beban penyusutan} &= \text{Rp } 120.000.000 \times 40\% \\ &= \text{Rp } 48.000.000 \end{aligned}$$

Pembebanan penyusutan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku aset tetap untuk setiap tahunnya dapat ditunjukkan pada tabel beban penyusutan metode saldo menurun berikut ini.

Tabel 8.2 Metode Penyusutan Saldo Menurun

Tahun	Nilai Buku Awal Tahun	Tarif Saldo Menurun	Biaya Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku Akhir Tahun
1	120.000.000	40%	48.000.000	48.000.000	72.000.000
2	72.000.000	40%	28.800.000	76.800.000	43.200.000
3	43.200.000	40%	17.280.000	94.080.000	25.920.000
4	25.920.000	40%	10.368.000	104.448.000	15.552.000
5	15.552.000	40%	5.552.000	110.000.000	10.000.000

Berdasarkan tabel di atas, jurnal penyesuaian beban penyusutan yang disajikan pada akhir tahun pertama, dan akhir tahun-tahun berikutnya (mengikuti tabel di atas) sebagai berikut:

Biaya penyusutan	48.000.000	
Akumulasi penyusutan		48.000.000

Tabel di atas menunjukkan biaya penyusutan pada tahun-tahun pertama sangat besar, dan nilai buku aset tetap juga sangat besar. Penurunan biaya penyusutan dan nilai buku aset tetap seiringberjalannya waktu tahun ke tahun. Biaya penyusutan pada tahun akhir (tahun ke 5) tidak mengikuti perkalian nilai buku aset awal tahun dengan tariff saldo. Nilai penyusutan tersebut dibatasi sebesar nilai Rp 5.552.000, karena tidak boleh lebih rendah dari estimasi nilai residu sebesar Rp 10.000.000.

b. Metode jumlah angka tahun (*sum of the years' method*)

Metode jumlah angka tahun dikategorikan sebagai pembebanan menurun, seperti halnya metode penyusutan saldo menurun. Penyusutan dengan metode jumlah angka tahun dihasilkan dari penghapusbukuan biaya perolehan aset tetap secara menurun dari periode ke periode. Asumsi yang digunakan adalah penggunaan aset tetap atau produktivitasnya lebih tinggi pada tahun-tahun awal dibandingkan tahun-tahun berikutnya, sehingga pembebanan penyusutan aset tetap tahun-tahun awal lebih besar dibandingkan tahun-tahun berikutnya.

Metode ini membebankan penyusutan aset tetap dengan menggunakan tarif fraksi tahunan. Beban penyusutan dihitung dengan mengalikan nilai perolehan aset tetap (dikurangi estimasi nilai residu) dengan tarif fraksi penyusutan tahun bersangkutan. tarif fraksi

penyusutan tersebut merupakan rasio **denominator** (jumlah tahun penggunaan aset tetap) dengan **numerator** (tahun sisa awal tahun yang belum disusutkan). Contoh, aset tetap dengan masa manfaat 5 tahun, maka **denominator**nya adalah 15, diperoleh dari penjumlahan 5+4+3+2+1. **Numerator** tahun akhir tahun pertama dari lima penggunaan aset tetap tersebut adalah 5, tahun kedua adalah 4, dan seterusnya sampai tahun terakhirnya adalah 1. Dengan demikian, rasio atau tarif fraksi penyusutan untuk tahun pertama adalah 5/15, tahun kedua adalah 4/15, dan seterusnya sampai tahun terakhirnya adalah 1/5. Adapun rumus untuk menghitung biaya penyusutan sebagai berikut:

Biaya penyusutan = Fraksi penyusutan x (Nilai perolehan aset tetap - Nilai residu)

Contoh sebelumnya, penghitungan biaya penyusutan untuk akhir tahun kedua adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Biaya penyusutan} &= \frac{4}{15} \times 100.000,000 \\ &= 26.666,667 \end{aligned}$$

Pembebanan penyusutan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku aset tetap untuk setiap tahunnya dapat ditunjukkan pada tabel beban penyusutan metode jumlah angka tahun berikut ini.

Tabel 8.3 Metode Penyusutan Jumlah Angka Tahun

Tahun	Nilai Buku	Nilai	Tarif	Biaya	Akumulasi	Nilai Buku
	Awal Tahun	Perolehan	Penyusutan	Penyusutan	Penyusutan	Akhir Tahun
1	110.000,000	100.000,000	5/15	33.333,333	33.333,333	76.666,667
2	76.666,667	100.000,000	4/15	26.666,667	60.000,000	50.000,000
3	50.000,000	100.000,000	3/15	20.000,000	80.000,000	30.000,000
4	30.000,000	100.000,000	2/15	13.333,333	93.333,333	16.666,667
5	16.666,667	100.000,000	1/15	6.666,667	100.000,000	10.000,000

Berdasarkan tabel di atas, jurnal penyesuaian beban penyusutan yang disajikan pada akhir tahun pertama, dan akhir tahun-tahun berikutnya (mengikuti tabel di atas) sebagai berikut:

Biaya penyusutan	33,333,333	
Akumulasi penyusutan		33,333,333

c. Metode jumlah unit produksi (*sum of the unit method*)

Metode unit produksi menbebaskan penyusutan berdasarkan fungsi penggunaan atau produktivitas aset tetap, atau *output* yang diharapkan dari suatu aset tetap. Masa manfaat aset tetap akan disusutkan berdasarkan jumlah *output* yang diproduksi, dalam bentuk unit produksi ataupun *input* yang digunakan, seperti jama jasa (kerja). Penggunaan metode ini lebih tepat untuk aset tetap yang berkarakteristik akan menurun kapasitasnya seiring dengan penggunaannya. Biaya penyusutan dengan metode ini dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Biaya penyusutan} = \frac{(\text{Biaya perolehan aset} - \text{Nilai residu})}{\text{Estimasi unit produksi total}} \times \text{Unit produksi}$$

Berdasarkan contoh sebelumnya, PT Sampean menggunakan aset tetap tersebut dengan menghasilkan total produksi 100.000 unit, dan akhir tahun pertama menghasilkan produk sebanyak 25.000 unit, maka biaya penyusutan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Biaya penyusutan} &= \frac{(110.000.000 - 10.000.000)}{100.000} \times 25.000 \\ &= \frac{100.000.000}{100.000} \times 25.000 \\ &= \frac{3.000.000.000.000}{100.000} \\ &= 30.000.000 \end{aligned}$$

Dengan unit produksi yang dihasilkan setiap tahunnya, maka penyusutan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku akhir tahun ditunjukkan pada tabel penyusutan unit produksi sebagai berikut:

Tabel 8.4 Metode Penyusutan Unit Produksi

Tahun	Unit Produksi	Biaya Penyusutan	Akumulasi penyusutan	Nilai Buku Akhir Tahun
1	25.000	30.000.000	30.000.000	80.000.000
2	25.000	25.000.000	55.000.000	55.000.000
3	20.000	20.000.000	75.000.000	35.000.000
4	15.000	15.000.000	90.000.000	20.000.000
5	10.000	10.000.000	100.000.000	10.000.000
	100.000	100.000.000		

Jurnal penyusutan yang disajikan pada akhir tahun pertama, dan tahun-tahun berikutnya sampai selesainya masa manfaat aset tetap tersebut mengikuti tabel penyusutan di atas. Seperti jurnal yang disajikan pada akhir tahun kedua sebagai berikut:

Biaya penyusutan	25.000.000	
Akumulasi penyusutan		25.000.000

Penyusutan untuk komponentisasi aset tetap

Konsep komponentisasi (*componentization*) diatur dalam PSAK 16. Standar akuntansi tersebut menyatakan bahwa setiap bagian dari aset tetap yang memiliki biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh aset harus disusutkan secara terpisah. Dengan kata lain, suatu aset tetap yang signifikan dapat disusutkan dengan metode dan umur manfaat yang berbeda, karena kemungkinan komponen aset yang dimaksudkan mempunyai masa manfaat yang berbeda dengan komponen lain dari aset tetap tersebut. Olehnya itu, perusahaan perlu menyusun daftar aset tetap secara rinci berdasarkan komponen-komponennya yang signifikan.

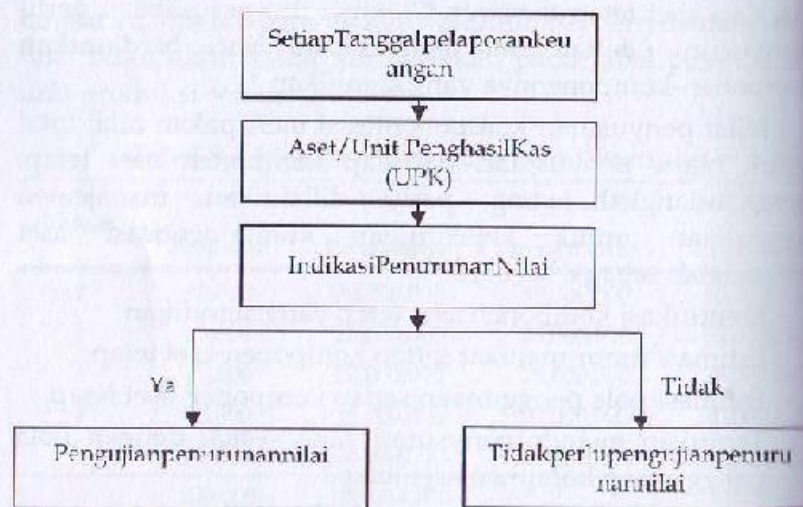
Nilai penyusutan komponentisasi merupakan nilai total untuk biaya penyusutan tiap-tiap komponen aset tetap. Langkah-langkah yang perlu dilakukan manajemen perusahaan untuk kepentingan komponentisasi aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi komponen aset tetap yang signifikan.
2. Estimasi umur manfaat setiap komponen aset tetap.
3. Estimasi pola penggunaan setiap komponen aset tetap.
4. Tentukan metode penyusutan yang sesuai dengan pola penggunaan komponen aset tetap.
5. Hitung biaya penyusutan setiap komponen.

Penurunan Nilai

PSAK 48 (revisi 2009) mengatur penurunan nilai aset, yaitu bagaimana entitas mereview (menelaah) jumlah tercatat asetnya, menentukan nilai yang dapat diperoleh kembali, kapan mengakui rugi penurunan nilai aset, dan kapan nilai rugi penurunan nilai dipulihkan kembali. Penurunan nilai menunjukkan taksiran jumlah aset tetap yang dapat diperoleh kembali dari suatu aset lebih kecil dari nilai tercatat aset tetap. Dengan demikian, entitas mempunyai keharusan melakukan penilaian aset tetap setiap tanggal pelaporan keuangan. Jika terdapat indikasi suatu aset yang dimiliki entitas mengalami penurunan nilai, maka entitas tersebut melakukan pengujian penurunan nilai. Sebaliknya, jika tidak terdapat indikasi penurunan nilai, maka entitas tidak perlu melakukan prosedur lebih lanjut. Rerangka analisis penurunan nilai aset ditunjukkan gambar berikut ini.

Gambar 8.1 Rerangka Penurunan Nilai Aset



Indikasi penurunan nilai mempertimbangkan dua sumber informasi, yaitu informasi dari sumber-sumber internal dan informasi dari sumber-sumber eksternal. Informasi yang bersumber-sumber dari internal sebagai berikut:

1. Ada bukti atas keusangan atau kerusakan fisik fisik.
2. (Akan) terjadi dalam waktu dekat perubahan signifikan berdampak merugikan selubungan seberapa jauh, cara, suatu aset (diharapkan) digunakan. Termasuk suatu aset menjadi tidak digunakan, rencana menghentikan atau merestrukturisasi operasi yang di dalamnya suatu aset digunakan, rencana untuk melepas aset sebelum tanggal yang diharapkan sebelumnya, dan penilaian ulang masa manfaat aset dari tidak terbatas menjadi terbatas.
3. Ada bukti dari pelaporan internal yang mengindikasikan bahwa kinerja ekonomi aset lebih buruk, atau akan menjadi lebih buruk dari yang diharapkan.

Informasi yang bersumber dari eksternal adalah sebagai berikut:

1. Nilai pasar aset tetap selama periode tertentu telah menurun secara signifikan lebih dari yang diharapkan akibat dari berjalannya waktu atau pemakaian normal.
2. Perubahan signifikan dalam hal teknologi, pasar, ekonomi atau lingkup hukum tempat entitas beroperasi atau pasar tempat aset dikaryakan, yang berdampak merugikan terhadap entitas, telah terjadi selama periode tersebut, atau akan terjadi dalam waktu dekat.
3. Suku bunga pasar atau tingkat imbalan pasar dari investasi telah meningkat selama periode tersebut, dan kenaikan tersebut mungkin akan mempengaruhi tingkat diskonto yang digunakan dalam menghitung nilai pakai

aset dan menurunkan nilai terpulihkan aset secara material.

4. Jumlah tercatat aset neto entitas melebihi kapasitas pasarnya.

Informasi-informasi di atas, baik yang bersumber dari internal maupun eksternal tidak mutlak mencakupi secara keseluruhan. Entitas bisnis memungkinkan mengidentifikasi informasi-informasi lainnya yang mengindikasikan suatu aset mengalami penurunan nilai. Selain itu, entitas dipersyaratkan melakukan pengujian-pengujian penurunan nilai. Pengujian penurunan nilai yang dimaksudkan sebagai berikut:

1. Secara tahunan melakukan pengujian penurunan nilai aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas atau aset tidak berwujud yang belum dapat digunakan. Pengujian penurunan nilai ini dapat dilakukan kapan saja dalam periode tertentu, dan dilakukan saat yang sama pada periode-periode berikutnya.
2. Secara tahunan melakukan pengujian penurunan nilai *goodwill* yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis.

Penghitungan terkini jumlah terpulihkan aset yang dilakukan periode terdahulu dapat digunakan dalam menguji penurunan nilai untuk aset tetap pada periode-periode berjalan. Kriteria-kriteria yang harus terpenuhi untuk pengujian penurunan nilai tersebut sebagai berikut:

1. Jika aset tidak berwujud tidak lagi menghasilkan arus kas masuk dari penggunaan secara berkelanjutan, yang terpisah dari aset-aset lainnya.
2. Jumlah terpulihkan terkini menghasilkan suatu jumlah yang melebihi jumlah tercatat aset dengan margin yang substansial.

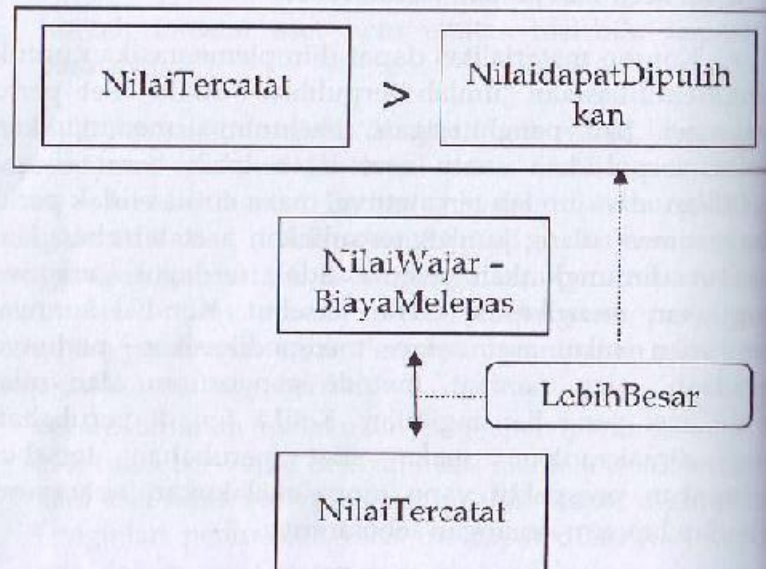
3. Kecil kemungkinan jumlah terpulihkan saat ini akan lebih kecil dari jumlah tercatat aset.

Konsep materialitas dapat diimplementasikan untuk mengidentifikasi jumlah terpulihkan suatu aset perlu diestimasi. Jika penghitungan sebelumnya menunjukkan jumlah terpulihkan suatu aset lebih lebih besar secara signifikan dari jumlah tercatatnya, maka entitas tidak perlu mengestimasi ulang jumlah terpulihkan aset tersebut. Hal tersebut dimungkinkan selama tidak terdapat peristiwa yang akan menghapus selisih tersebut. Kondisi lainnya, penurunan nilai aset tetap mengindikasikan perlunya menelaah sisa manfaat, metode penyusutan, dan nilai residu aset yang bersangkutan. Ketika terjadi perubahan yang dimaksudkan, maka sifat perubahan tersebut merupakan prospektif yang tanpa melakukan *restatement* terhadap laporan keuangan sebelumnya.

Pengukuran Penurunan Nilai

Indikasi penurunan nilai aset tetap mengharuskan entitas untuk melakukan pengujian penurunan nilai. Penurunan nilai terjadi jika nilai aset yang dapat dipulihkan lebih kecil dari nilai tercatatnya. Pengakuan penurunan nilai aset dicatat sebagai rugi penurunan nilai, dan nilai aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan tersebut. Sebaliknya, apabila jumlah tercatatnya lebih rendah dari jumlah terpulihkan, maka kondisi tersebut tidak terdapat penurunan nilai. Indikasi penurunan nilai aset tersebut mempersyaratkan entitas untuk melakukan estimasi formal jumlah yang terpulihkan. Pengujian penurunan dapat memperhatikan gambar berikut ini.

Gambar 8.2 Pengujian Penurunan Nilai



Nilai yang dapat dipulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau unit penghasil kas diperkurangkan biaya penjualan (harga jual bersih) dengan nilai pakainya. Nilai wajar diperkurangkan biaya penjualan atau *net selling prices* adalah jumlah yang dapat dihasilkan dari penjualan aset atau unit penghasil kas dalam transaksi antara pihak-pihak yang mengetahui dan bebas, diperkurangkan biaya pelepasan aset (*fair value less cost to sell*). Nilai pakai (*value in use*) merupakan nilai kini taksiran arus kas yang diharapkan akan diterima suatu aset atau unit penghasil kas, atau mencerminkan nilai kini ekspektasi arus kas penggunaan aset dan nilai penjualan aset tersebut pada akhir masa manfaat aset.

Contoh, PT Sampean pada akhir tahun 2012 melakukan pengujian penurunan aset tetap gedung

(bangunan) akibat krisis ekonomi. Gedung tersebut diperoleh lima tahun yang lalu dengan biaya perolehan Rp 200.000.000. Awal pengakuan aset entitas tersebut, mengestimasi masa manfaat gedung tersebut adalah 10 tahun, dan nilai residunya Rp 20.000.000. Berdasarkan pengujian yang dilakukan diperoleh informasi-informasi sebagai berikut:

Harga jual	Rp	150,000,000
Biaya perolehan	Rp	3,000,000
Nilai pakai	Rp	100,000,000

Adapun nilai tercatat bangunan per 31 desember 2012 sebagai berikut:

Biaya perolehan	=	Rp	200,000,000
Akumulasi penyusutan	=	$\frac{5 \times 180,000,000}{20 \text{ Tahun}}$	- Rp 90,000,000
Nilai tercatat gedung per 31 Des 2012	=	Rp	110,000,000

Kondisi tidak terjadi penurunan nilai, jumlah terpulihkan aset tetap lebih besar daripada jumlah tercatat aset gedung ditunjukkan sebagai berikut:

Tidak terjadi penurunan nilai:

Nilai wajar (UPK)	Rp	150,000,000
Biaya perolehan	Rp	3,000,000
Nilai terpulihkan aset gedung	Rp	147,000,000
Jumlah tercatat aset gedung	Rp	110,000,000

Nilai terpulihkan > Jumlah tercatat

Kondisi terjadi penurunan nilai, jumlah terpulihkan aset tetap lebih rendah daripada jumlah tercatat aset gedung ditunjukkan sebagai berikut:

Tidak terjadi penurunan nilai:

Nilai wajar (UPK)	Rp	111,000,000
Biaya perolehan	Rp	3,000,000
Nilai terpulihkan aset gedung	Rp	108,000,000
Jumlah tercatat aset gedung	Rp	110,000,000

Nilai terpulihkan < Jumlah tercatat

Ketika jumlah terpulihkan, yaitu nilai wajar dikurangi biaya penjualan masih lebih besar dibandingkan dengan jumlah tercatat aset pada laporan keuangan, maka tidak terjadi penurunan nilai. Sebaliknya, jumlah tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkan aset yang bersangkutan, maka terjadi penurunan nilai. Contoh di atas menunjukkan penurunan nilai sebesar Rp 10.000.000, penurunan nilai dihitung sebagai berikut:

Jumlah tercatat aset	Rp	110,000,000
Nilai pakai	Rp	100,000,000
Penurunan nilai	Rp	10,000,000

Adapun jurnal yang disajikan pada akhir tahun tersebut sebagai berikut:

Rugi penurunan nilai - Gedung	2,000,000
Akumulasi penurunan nilai - Gedung	2,000,000

Rugi penurunan nilai aset tetap yang tidak direvaluasi akan diakui dalam laporan laba-rugi komprehensif. Sedangkan, kerugian penurunan nilai aset tetap revaluasian (aset yang direvaluasi) akan diakui dalam pendapatan komprehensif lainnya, sepanjang penurunan nilai aset revaluasian tersebut tidak melebihi jumlah *surplus* revaluasi aset tetap untuk kelompok yang sama. ketika jumlah estimasi rugi penurunan nilai lebih besar dari nilai tercatat aset tetap yang terkait, maka entitas mengakui liabilitas jika dipersyaratkan oleh standar akuntansi lainnya. Setelah mencatatkan rugi penurunan nilai aset tetap, maka beban penyusutan aset tetap akan disesuaikan di masa datang untuk menyesuaikan dan mengalokasikan nilai tercatat aset tetap hasil revisi. Nilai aset tetap yang disesuaikan merupakan hasil pengurangan nilai tercatat hasil revisi dengan nilai residu (jika ada).

Penurunan Nilai Unit Penghasil Kas

Unit penghasil kas (UPK) aset merupakan kelompok terkecil dari aset (yang termasuk aset tersebut) dan menghasilkan arus kas masuk independen dari kelompok aset lain. Entitas harus mengestimasi jumlah terpulihkan atas aset tetap individual. Dengan demikian, entitas menentukan nilai terpulihkan dari UPK yang mana aset tercakup. Jumlah terpulihkan UPK harus dapat diidentifikasi atau ditentukan. Jika jumlah terpulihkan tidak dapat ditentukan untuk aset individual, maka entitas mengidentifikasi agregasi terendah aset yang menghasilkan arus kas masuk yang independen (berdiri sendiri). Hal demikian dapat dilakukan secara konsisten dari periode ke periode untuk aset atau jenis aset yang sama, kecuali perubahan yang dapat dijustifikasi.

Jumlah terpulihkan dari suatu aset individual tidak dapat ditentukan jika nilai pakai aset tidak dapat diestimasi

mendekati nilai wajarnya dikurangi biaya penjualan. Selain itu, aset tidak menghasilkan arus kas masuk yang independen dari kelompok aset lainnya. Estimasi harga masa datang dapat dicapai dalam transaksi wajar, dengan mengestimasi arus kas masa datang yang digunakan untuk menentukan nilai pakai aset atau nilai pakai UPK, dan arus kas keluar masa datang yang digunakan untuk menentukan nilai pakai atau nilai pakai UPK yang dipengaruhi harga transfer internal. Seperti sebelumnya, untuk menentukan perlu-tidaknya mengakui kerugian penurunan nilai aset, maka perlu dibandingkan nilai wajar dikurangi biaya penjualan dengan nilai pakai, dan nilai pakai dibandingkan dengan jumlah tercatat.

Secara spesifik, *goodwill* yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis dialokasikan pada setiap UPK pihak pengakuisisi, atau kelompok UPK yang diharapkan memberikan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis, terlepas apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi yang ditetapkan ke unit-unit atau kelompok unit-unit tersebut. Dalam hal ini, rugi penurunan nilai dialokasikan menurunkan jumlah tercatat dari aset dengan tahapan, yaitu menurunkan jumlah tercatat dari *goodwill* yang telah dialokasikan pada UPK, dan mengalokasikan pada aset lainnya pada UPK secara proporsional dari jumlah tercatat pada setiap aset dalam UPK.

Contoh, PT Sampean melakukan pengujian atas penurunan nilai UPK 'A'. Entitas menemukan bahwa jumlah yang terpulihkan UPK 'A' tersebut adalah Rp 1.500.000.000, dan properti investasi adalah Rp 250.000.000. Informasi nilai tercatat sebagai berikut:

Jumlah tercatat:

<i>Goodwill</i>	Rp	100.000.000
Aset tetap (net)	Rp	500.000.000
Aset tidak berwujud (net)	Rp	200.000.000
Properti investasi (net)	Rp	350.000.000
Aset keuangan (nilai wajar)	Rp	150.000.000
Persediaan	Rp	500.000.000
Piutang dagang	Rp	200.000.000
Total	Rp	2.000.000.000

Berdasarkan kasus di atas, penurunan nilai yang diakui terhadap properti investasi yang memiliki nilai wajar adalah Rp 250.000.000, sehingga diakui penurunan nilai sebesar Rp 100.000.000. Adapun jurnal yang disajikan untuk pengakuan nilai tersebut adalah:

Rugi penurunan nilai - Properti Investasi	100.000,00	
	0	
Properti Investasi		100.000,00
		0

Selanjutnya membandingkan jumlah tercatat dengan jumlah terpulihkan. Nilai tercatat UPK 'A' adalah:

Jumlah tercatat	Rp	2.000.000.000
Penurunan nilai properti investasi	Rp	100.000.000
Nilai tercatat UPK 'A' kini	Rp	1.900.000.000

Jumlah tercatat UPK 'A' kini sebesar Rp 1.900.000.000 lebih besar dari jumlah terpulihkan sebesar Rp 1.500.000.000, sehingga entitas akan mengakui kerugian penurunan nilai pada UPK 'A' sebesar Rp 400.000.000 (Rp 1.900.000.000 - Rp

1.500.000.000). Jumlah sebesar RpRp 400.000.000 dialokasikan pada aset tetap dan aset tidak berwujud, karena properti investasi telah turun nilainya sebesar terpulihkan dan aset selain aset tetap dan aset tidak berwujud di luar lingkup PSAK 48. Adapun alokasi penurunan nilai sebagai berikut:

Tabel 8.5 Alokasi Kerugian Penurunan Nilai

	Jumlah Tercatat	Alokasi Kerugian Penurunan Nilai	Jumlah tercatat Setelah Alokasi
<i>Goodwill</i>	100.000.000	100.000.000	-
Aset tetap	500.000.000	214.285.714	285.714.286
Aset tidak berwujud	200.000.000	85.714.286	114.285.714
Properti investasi	250.000.000		250.000.000
Aset keuangan	150.000.000		150.000.000
Persediaan	500.000.000		500.000.000
Piutang dagang	200.000.000		200.000.000
Total	1.900.000.000	400.000.000	1.500.000.000

Alokasi kerugian penurunan nilai yang pertama dilakukan pada nilai *goodwill* sebesar Rp 100.000.000, dan alokasi yang kedua adalah aset tetap dan aset tidak berwujud. Alokasi terhadap aset tetap dapat dilakukan sebagai berikut:

$$= (400.000.000 - 100.000.000) \times \frac{500.000.000}{(500.000.000 + 200.000.000)}$$

$$= 214.285.714$$

Alokasi terhadap aset tidak berwujud dapat dilakukan sebagai berikut:

$$= (400.000.000 - 100.000.000) \times \frac{200.000.000}{(500.000.000 + 200.000.000)}$$

$$= 85.714.286$$

Adapun jurnal alokasi *goodwill*, aset tetap, dan aset tidak tetap di atas disajikan sebagai berikut:

Rugi penurunan nilai -Aset Tetap	400.000.000	
<i>Goodwill</i>		100.000.000
Aset tetap		214.285.714
Aset tidak berwujud		85.714.286

Selain *goodwill*, aset korporat memiliki karakteristik khusus, yaitu tidak menghasilkan arus kas masuk secara independen dari aset, atau kelompok aset lain, dan jumlah tercatat tidak dapat sepenuhnya diatribusikan ke UPK. Aset korporat meliputi aset kelompok (*divide*), seperti bangunan kantor pusat, atau divisi entitas, perlengkapan EDP, dan pusat penelitian. Jika sebagian jumlah tercatat aset korporat dapat dialokasikan dengan dasar yang layak dan konsisten dengan unit, maka entitas dapat membandingkan jumlah tercatat dari unit dengan jumlah yang terpulihkan. Dengan demikian, entitas harus mengakui setiap rugi penurunan nilai. Jika sebagian dari jumlah tercatat aset korporat tidak dapat dialokasikan pada dasar yang layak dan konsisten terhadap unit, maka entitas harus membandingkan jumlah tercatat unit (di luar aset korporat) dengan jumlah

terpulihkan, dan mengakui setiap penurunan nilai. Selanjutnya, mengidentifikasi kelompok terkecil dari UPK dan yang sebagian dari jumlah yang tercatat aset korporat dapat dialokasikan atas dasar yang layak dan konsisiten. Selanjutnya, membandingkan jumlah tercatat aset korporat yang dialokasikan ke kelompok UPK dengan jumlah terpulihkan dari kelompok UPK, dan entitas melakukan pengakuan penurunan nilai tersebut.

Pemulihan Rugi Penurunan Nilai

Entitas pada periode sebelumnya telah melakukan penurunan nilai aset tetap, dan kemudian periode berjalan selanjutnya mengalami pemulihan nilai aset tetap tersebut. Apakah entitas pada yang bersangkutan dapat menaikkan kembali nilai tercatat aset tetap. PSAK 48 mengungkapkan jika terjadi pemulihan nilai aset tetap yang sebelumnya pernah dilakukan penurunan nilai, maka dapat dilakukan pemulihan nilai, namun jumlah yang dipulihkan tidak boleh melebihi nilai tercatat aset, jika sebelumnya nilainya tidak diturunkan. *Goodwill* tidak dibolehkan adanya pemulihan rugi penurunan nilai. Dengan demikian, entitas melakukan estimasi jumlah terpulihkan aset tetap, kecuali *goodwill*.

Pencatatan yang dilakukan atas terpulihkannya aset tetap dengan membalik rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode-periode sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai untuk aset tetap diakui dan disajikan pada laporan laba-rugi. Atau, setiap pemulihan rugi penurunan nilai aset tetap revaluasian harus diperlakukan sebagai kenaikan penilaian kembali, dasarnya sesuai PSAK yang terkait. Contoh, PT Sampean pada tanggal 1 Januari 2012 melakukan review aset-asetnya. Hasil review menunjukkan terdapat nilai pakai bangunan meningkat sebesar Rp 150.000.000. Adapun nilai tercatat bangunan per 1 Januari 2012 yang seharusnya adalah sebagai berikut:

Biaya perolehan	=	210,000,000
Akumulasi penyusutan	=	$\frac{4 \times (210,000,000 - 10,000,000)}{10}$
		80,000,000
Nilai tercatat per 1 Jan 2012	=	130,000,000

Nilai tercatat bangunan per 1 Januari 2012 setelah penurunan nilai adalah sebagai berikut:

Nilai tercatat 31 Des 2009	=	110,000,000
Akumulasi penyusutan	=	$\frac{2 \times (110,000,000 - 10,000,000)}{5}$
		10,000,000
Nilai tercatat per 1 Jan 2012	=	100,000,000

Dengan nilai yang dapat terpulihkan sebesar Rp 150.000.000 pada tanggal 1 Januari 2012, maka harus dinaikkan kembali sebesar jumlah terpulihkan tersebut. Namun, nilai terpulihkan tersebut lebih besar dari nilai tercatat seharusnya Rp 130.000.000, maka aset tetap yang dapat dinaikkan kembali adalah sebesar Rp 30.000.000 (Rp 130.000.000 - 100.000.000). jurnal yang disajikan untuk pemulihan nilai aset tetap tersbut adalah sebagai berikut:

Akumulasi penurunan nilai bangunan	30,000,000
Laba pemulihan kembali nilai aset tetap	30,000,000

Untuk UPK, pembalikan rugi penurunan nilai dialokasikan kepada aset-aset dari unit (kecuali goodwill) secara proporsi dengan jumlah tercatat aset-asetnya. Jumlah alokasi pembalikan rugi penurunan nilai UPK pada jumlah tercatat aset tidak boleh dinaikkan di atas nilai yang terendah dari jumlah terpulihkan (jika ditentukan), dan juga jumlah tercatat yang telah ditentukan seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset periode terdahulu.

Pertanyaan

Jawablah setiap pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas untuk membuktikan pemahaman teoretis pembahasan bab ini.

1. Nilai buku aset tetap dipengaruhi oleh penyusutan dan penurunan nilai aset tetap itu sendiri? Jelaskan perbedaan penyusutan dengan penurunan nilai dalam akuntansi?
2. Entitas menentukan kebijakan penyusutan aset tetapnya berdasarkan karakteristik aset tetap yang dimilikinya. Kemukakan metode-metode penyusutan aset tetap, dan uraikan asumsi-asumsi dari metode-metode penyusutan aset tetap tersebut?
3. Aset mengalami penurunan nilai, ketika taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset tetap lebih kecil dari nilai tercatat aset tetap. Uraikan cara kerja menganalisis penurunan nilai aset tetap? Jelaskan pengujian penurunan nilai aset tetap?

4. Unit penghasil kas, *goodwill*, dan aset korporat merupakan bagian aset perusahaan. Jelaskan pengakuan rugi penurunan nilai aset-aset tersebut?
5. Aset yang telah diturunkan nilainya pada periode-periode sebelumnya dapat dipulihkan kembali ketika aset tersebut mengalami pemulihan nilai. Jelaskan pengakuan pemulihan rugi penurunan nilai aset tetap? Sajikan contoh pencatatannya?

Latihan

1. Awal tahun 2005, PT 'Grafis' membeli aset tetap berupa Mesin Cetak Otomatis. Data yang berhubungan dengan aset tetap tersebut adalah:

Harga Faktur	250.000.000	Biaya Pemasangan	3.500.000
Bea Balik Nama	12.500.000	PPN	10%
Biaya Angkut & Asuransi	6.500.000	Nilai Residu	15.000.000
Komisi Salesman	4.000.000	Umur Ekonomis	4 tahun

Instruksi:

- a. Kalkulasi harga perolehan aset tetap tersebut?
- b. Susunlah tabel penyusutan dengan menggunakan *straight-line method*, *double-declining balance*, dan *sum of the years' digits*?
- c. Sajikan jurnal penyesuaian (beban penyusutan) setiap akhir tahun berdasarkan salah metode pada poin (b) sebelumnya?
- d. Awal tahun ke 4, aset tetap tersebut dijual dengan harga Rp 95.000.000. Tentukan nilai buku dan laba-rugi atas penjualan aset tetap tersebut?

2. Akhir 2012, PT Budi Jaya melakukan pengujian penurunan aset tetap bangunan. Aset tetap tersebut diperoleh lima tahun yang lalu dengan biaya perolehan Rp 1.200.000.000. Estimasi masa manfaat gedung tersebut adalah 10 tahun, dan nilai residunya Rp 200.000.000. Berdasarkan pengujian yang dilakukan diperoleh informasi-informasi sebagai berikut:

Harga jual	Rp	650.000.000
Biaya perolehan	Rp	15.000.000
Nilai pakai	Rp	400.000.000

Instruksi:

- Tentukan ada-tidaknya rugi penurunan nilai aset tetap bangunan tersebut? Berikan penjelasan terkait jawabannya?
- Sajikan jurnal yang diperlukan atas jawaban poin (a) di atas?
- Berdasarkan kasus tersebut, sajikan kondisi atau alternatif pemulihan nilai aset tetap bangunan tersebut? Berikan penjelasan terkait jawabannya?
- Sajikan jurnal yang diperlukan atas jawaban poin (c) di atas?

AKUN ASET TIDAK BERWUJUD

9

Pengertian Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud (*intangible assets*) merupakan aset tetap yang dapat diidentifikasi tidak memiliki substansi fisik dan diestimasi berumur panjang. Nilai aset tidak berwujud berasal dari hak (keistimewaan) yang akan diperoleh suatu entitas dengan kepemilikan aset yang tanpa substansi fisik tersebut. Kondisi sekarang ini, nilai perusahaan banyak ditentukan atas keberadaan aset tidak berwujud yang dimilikinya. PSAK 19 (revisi 2010) mendefinisikan aset tidak berwujud sebagai aset nonmoneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Dengan demikian, pengakuan atau kriteria utama yang harus dimiliki aset tidak berwujud adalah sebagai berikut:

- Aset tidak berwujud dapat diidentifikasi.
- Penggunaan aset tidak berwujud dikendalikan oleh entitas.
- Terdapat masa manfaat ekonomi di masa mendatang.
- Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Aset tidak berwujud dapat berupa paten, hak cipta, merek produk, piranti lunak komputer, waralaba, dan *goodwill*. Aset tidak berwujud dapat juga berupa aset tersebut tetapi memiliki elemen fisik, seperti *compact disk* (CD) yang di dalamnya memiliki piranti lunak komputer, dan dokumentasi legal yang di dalamnya memuat lisensi atau paten. Elemen berwujud atau tidak tidak berwujud dari suatu aset tetap kriteria tidak berwujud dapat diperlakukan berdasarkan PSAK aset tetap (PSAK 16, revisi 2007) atau aset tidak berwujud (PSAK 19, revisi 2009). Aset tidak berwujud yang dapat diidentifikasi secara terpisah

dari aspek entitas lain diatur dalam PSAK 19, aset yang dimaksudkan dapat diidentifikasi harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Dapat dipisahkan, dimaksudkan dapat dipisahkan dari entitas dan dijual, transfer, dijual hak pakainya, disewakan atau dipertukarkan, baik secara individual maupun bersama-sama dengan kontrak terkaitnya.
2. Timbul dari hak kontraktual atau hak hukum lainnya, tidak bergantung dari hak tersebut dapat ditransfer atau dipisahkan dari entitas atau dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban lainnya.

Aset tidak berwujud harus dapat dikendalikan oleh entitas pemiliknya. Pengendalian (*control*) adalah penguasaan untuk memperoleh manfaat ekonomis di masa mendatang dan membatasi akses pihak lain atas manfaat aset tidak berwujud tersebut. Pengendalian atas aset tidak berwujud timbul karena adanya kekuatan hak legal, dan hak legal tidak diperlukan jika entitas dapat melakukan pengendalian manfaat ekonomis masa mendatang dengan cara lain, seperti menjaga kerahasiaan melalui *employee confidentiality*.

Pengakuan aset tidak berwujud juga didasarkan kemampuan aset tersebut memberikan manfaat ekonomis di masa mendatang, yang mengalir ke dalam entitas. Manfaat ekonomi yang mengalir ke entitas dapat berupa pendapatan dari penjualan produk atau jasa, penghematan biaya, atau manfaat lainnya yang timbul dari penggunaan aset tersebut. Contohnya, entitas menggunakan formulasi tertentu pada produknya untuk memenangkan persaingan pasar dengan para pesaingnya. Formulasi tersebut mendapatkan legalitas hukum, sehingga merupakan aset tidak berwujud yang meningkatkan prospek peningkatan penjualan di masa mendatang. Selain itu, formulasi tersebut mengurangi

pengeluaran biaya promosi (iklan), ekspansi produk, dan sebagainya.

Aset tidak berwujud memiliki umur atau masa manfaat yang panjang. Perlakuan akuntansi aset tidak berwujud juga tergantung klasifikasi umur manfaat aset tidak berwujud tersebut. Pada dasarnya, aset tidak berwujud terbagi atas dua kategori, yaitu:

1. Aset tidak berwujud dengan umur terbatas (*finite lives*). Aset kategori ini diamortisasi, dengan menghasilkan beban amortisasi yang berhubungan dengan aset tidak berwujud. Amortisasi dilakukan seperti penyusutan, dan biasanya dihitung berdasarkan metode garis lurus.
2. Aset tidak berwujud dengan umur tidak terbatas (*indefinite lives*). Kategori kedua untuk aset tidak berwujud ini tidak dilakukan amortisasi (tidak dicatat). Perlakuan akuntansi adalah kerugian atau penurunan nilai aset tidak berwujud setiap tahunnya, dan pencatatan kerugian itu disajikan pada saat terjadinya. *Goodwill* adalah contoh nyata aset tidak berwujud dengan umur yang tidak terbatas ini.

Pengukuran Awal Biaya Perolehan

Awal pengakuan aset tidak berwujud diakui sebesar biaya perolehannya. Pengukuran aset tidak berwujud tergantung pada kondisi aset tidak berwujud tersebut diakuisisi. Ada beberapa cara perolehan aset tidak berwujud sebagai berikut:

1. Perolehan terpisah
2. Akuisisi, bagian kombinasi bisnis
3. Akuisisi hibah pemerintah
4. Pertukaran aset
5. Aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal

Pengukuran aset tidak berwujud yang diperoleh secara terpisah diperlakukan sama seperti aset tetap (berwujud). Elemen-elemen biaya perolehan yang dimaksudkan terdiri atas harga pembelian, termasuk pajak dan bea impor, dikurangi diskon, ditambah semua biaya yang secara langsung dapat diatribusikan yang terkait dengan penyiapan aset tersebut siap untuk digunakan dengan tujuan penggunaannya. Sedangkan, biaya perolehan aset tidak tetap yang diakuisisi akibat kombinasi bisnis usaha adalah berdasarkan PSAK 22, yaitu nilai wajar pada saat (tanggal) akuisisi. Aset tidak berwujud yang diperdagangkan di pasar aktif, maka pengukurannya berdasarkan harga perolehan aset tetap sesuai harga pasar. Kondisi yang berbeda, aset tidak berwujud tidak mempunyai pasar aktif, maka biaya perolehan didasarkan sebesar jumlah yang dibayarkan perusahaan (transaksi normal) pada tanggal akuisisi.

Aset tidak berwujud yang timbul dari kombinasi bisnis harus diakui terpisah dari *goodwill*. Kondisi dengan biaya perolehan aset tidak berwujud diakuisisi dari kombinasi bisnis yang tidak dapat diukur secara andal, maka aset tersebut tidak diakui secara terpisah, tetapi disajikan sebagai *goodwill*. *Goodwill* yang timbul secara internal tidak dapat diakui sebagai aset tidak berwujud. Hal ini dijelaskan pada pembahasan berikutnya.

Aset tidak berwujud yang diakuisisi dengan hibah pemerintah dapat diakui oleh entitas dengan pilihan pengakuan, yaitu: mengakui sebesar nilai wajarnya, dan mengakui aset tidak berwujud dan hibah dengan nilai nominal ditambah dengan segala pengeluaran yang terkait langsung dengan penyiapan aset tersebut sampai siap digunakan sesuai tujuan penggunaannya. Aset hibah pemerintah merupakan pemindahan atau pengalokasian

aset tidak berwujud kepada entitas tertentu. Contohnya, hak quota atau hak untuk mengakses sumber-sumber terbatas yang sebelumnya dikuasai pemerintah, hak impor, hak beroperasi pada stasiun televisi atau radio, hak untuk mendarat di bandar udara, dan sebagainya.

Aset tidak berwujud yang diperoleh dengan pertukaran aset, berupa aset non moneter, sekelompok aset moneter, kombinasi aset moneter dan aset non moneter, diukur sama seperti pertukaran aset tetap. Pengukurannya berdasarkan biaya perolehan aset tidak berwujud dari pertukaran, yaitu sebesar nilai wajarnya. Aset pertukaran tidak dapat diukur dengan nilai wajarnya, bilamana memenuhi kriteria, yaitu transaksi pertukaran kurang memiliki substansi komersial, dan nilai wajar aset baik yang diterima ataupun yang dilepaskan tidak dapat diukur dengan andal. Dengan demikian, aset yang tidak dapat diukur dengan nilai wajar, maka biaya perolehan aset tidak berwujud diukur sesuai dengan jumlah tercatat aset yang dilepaskan. Adapun substansi komersial ditentukan dengan mempertimbangkan arus kas masa mendatang yang diharapkan berubah sebagai akibat transaksi pertukaran, dengan memperhatikan resiko, waktu, dan jumlah (konfigurasi) dari aset yang diterima berbeda dengan arus kas aset yang ditukarkan, nilai spesifik entitas akibat pertukaran aset tersebut, dan perbedaan signifikan kedua hal tersebut dengan nilai wajar aset yang ditukarkan.

Seperti diungkapkan sebelumnya, *goodwill* yang timbul secara internal tidak dapat diakui sebagai aset tidak berwujud, karena tidak memenuhi kriteria pengakuan aset tidak berwujud, yaitu dasar pengukuran biaya perolehan yang andal, identifikasi terpisah dari sumber daya yang lain, dan kendali perusahaan. Untuk menentukan aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal (selain *goodwill*)

diakui sebagai aset tidak berwujud, perlu membedakan tahap penelitian dan tahap pengembangan. Seluruh biaya penelitian dibebankan pada periode yang bersangkutan. Alasannya, penelitian yang orisinal dan terencana dilaksanakan dengan harapan memperoleh pembaharuan pengetahuan dan pemahaman teknis atas ilmu yang baru. Sebaliknya, biaya pengembangan dapat dikapitalisasi dengan persyaratan memberikan manfaat ekonomi masa datang dapat (kemungkinan besar) diperoleh entitas yang bersangkutan. Biaya pengembangan dikapitalisasi karena tahap pengembangan merupakan penerapan temuan penelitian atau pengetahuan lainnya pada suatu rancangan produksi bahan baku, alat, proses, sistem, atau jasa yang sifatnya baru (perbaikan substansial), sebelum mulainya pemakaian atau produksi komersial.

Kriteria pengakuan spesifik yang harus terpenuhi untuk mengkapitalisasi biaya pengembangan (tahap pengembangan proyek internal) sebagai berikut:

1. Kelayakan teknis penyelesaian aset tidak berwujud, sehingga aset tersebut dapat digunakan (dijual).
2. Niat untuk menyelesaikan aset tidak berwujud dan menggunakannya (menjualnya).
3. Kemampuan untuk menggunakan atau menjual aset tidak berwujud.
4. Kemampuan aset tidak berwujud menghasilkan manfaat ekonomis masa datang, adanya pasar bagi keluaran aset tidak berwujud atau pasar dari aset tetap itu sendiri, atau kegunaan aset tidak berwujud itu sendiri.
5. Tersedianya sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya untuk menyelesaikan pengembangan aset tidak berwujud, penggunaan, atau penjualannya.

6. Kemampuan mengukur secara andal pengeluaran yang terkait dengan aset tidak berwujud selama pengembangan.

Berikut ini beberapa contoh kegiatan pada tahap pengembangan, diantaranya: 1) desain, konstruksi, pengujian *prototype* dan model sebelum produksi (digunakan); 2) desain, peralatan, cetakan, dan penawaran yang melibatkan teknologi baru; 3) desain, konstruksi, dan operasi, pabrik percontohan; 4) desain, konstruksi, dan pengujian alternatif bahan baku, peralatan, produk, proses, sistem, jasa yang baru (diperbaiki). Entitas yang diperhadapkan dengan kesulitan memisahkan tahap penelitian dan tahap pengembangan, maka semua pengeluaran terkait kedua tahapan tersebut diasumsikan bagian dari tahap penelitian, sehingga seluruh pengeluaran tersebut dibebankan pada saat terjadinya.

Entitas modern ditandai dengan penggunaan perangkat lunak komputer, dan fasilitas situs *website*. Pertanyaannya adalah bagaimana perlakuan akuntansi kedua fasilitas tersebut. Pengakuan biaya perangkat lunak komputer dengan alternatif: untuk perusahaan pengembang perangkat lunak, biaya-biaya mengembangkan program merupakan biaya penelitian dan pengembangan, sehingga semua biaya pada tahap penelitian harus dibebankan saat terjadinya, dan biaya pada tahap pengembangan dikapitalisasi sesuai kriteria pengakuan aset. Untuk perangkat lunak yang dikembangkan untuk digunakan secara internal, maka biaya internal harus dibebankan, karena kesulitan mengidentifikasi manfaat ekonomi masa datang bagi entitas. Perangkat lunak yang dibeli untuk dijual kembali, maka diakui sebagai persediaan. Perangkat lunak yang dimiliki untuk dijual hak pakainya atau disewakan kepada pihak lain, maka harus diakui sebagai

aset tidak berwujud. Perangkat lunak yang dibeli untuk digunakan sendiri, bagian integral perangkat keras, maka dikapitalisasi bagian perolehan perangkat keras aset tetap.

Biaya pengembangan dan pengoperasian situs web diatur dalam ISAK 14 aset tidak berwujud, yaitu situs web yang timbul dari pengembangan diakui sebagai aset tidak berwujud, jika situs web entitas yang bersangkutan dapat menghasilkan manfaat ekonomi masa datang, dan biaya perolehannya dapat diukur secara andal (PSAK 19). Entitas harus menunjukkan bagaimana situs web tersebut akan menghasilkan manfaat ekonomis masa datang, seperti kemampuannya menghasilkan pendapatan dari pembelian dengan pesanan. Situs web yang dikembangkan entitas hanya untuk promosi produk atau jasa entitas, tidak menunjukkan manfaat ekonomis di masa datang, maka semua pengeluaran untuk pengembangan situs web tersebut langsung diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

Pengeluaran setelah kapitalisasi aset tidak berwujud sangat sulit dijustifikasi sebagai bagian dari aset tidak berwujud. Jarang sekali mengkapitalisasi pengeluaran-pengeluaran yang terkait dengan aset tidak berwujud setelah pengakuan awalnya. Dengan demikian, pengeluaran-pengeluaran pasca pengakuan awal aset tidak berwujud langsung dibebankan pada saat terjadinya. Aset tidak berwujud memiliki karakteristik kesulitan mengidentifikasi adanya tambahan atau peningkatan masa manfaat ekonomis pada aset tidak berwujud tersebut. Pengeluaran-pengeluaran pasca pengakuan awal aset dapat dikapitalisasi, dan diakui sebagai aset tidak berwujud apabila menunjukkan kemungkinan aset menghasilkan manfaat ekonomis masa datang yang lebih tinggi dari kinerja sebelum adanya pengeluaran tersebut, dan biaya

atau pengeluaran dapat diukur dan diatribusikan ke aset secara andal.

Amortisasi, Umur Manfaat, dan Nilai Sisa

Aset tidak berwujud menunjukkan biaya perolehan yang mencakup semua biaya yang diperlukan untuk membawa aset siap digunakan. Aset tidak berwujud dengan umur manfaat yang terbatas harus diamortisasi, sedangkan aset tidak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas tidak diamortisasi tetapi dilakukan dengan uji penurunan nilai secara berkala. Umur manfaat ekonomis dari aset tidak berwujud tersebut menentukan perlu-tidaknya melakukan amortisasi. Faktor yang perlu dipertimbangkan menentukan umur manfaat aset tidak berwujud sebagai berikut:

1. Harapan manfaat aset, dan apakah aset dapat dikelola secara efisien oleh tim manajemen lain.
2. Tipe siklus hidup produk bagi aset dan estimasi umur manfaat aset dari aset yang serupa untuk keperluan yang serupa.
3. Jenis teknis, teknologi, komersial, atau jenis lain dari keuangan.
4. Stabilitas industri dimana aset beroperasi, dan perubahan permintaan pasar atas produk, atau jasa yang dihasilkan aset.
5. Perkiraan atas tindakan pesaing atau pesaing potensial.
6. Tingkat pengeluaran perawatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan manfaat ekonomis masa datang dari aset dan kemampuan entitas serta niat entitas untuk mencapai tingkat tersebut.
7. Periode pengendalian aset dan hukum serupa dalam pemanfaatan aset, seperti masa berlakunya sewa.
8. Apakah masa manfaat aset bergantung dengan masa manfaat aset entitas lainnya.

Aset tidak berwujud yang memiliki umur manfaat yang terbatas harus diamortisasi. Amortisasi untuk aset tidak berwujud sama seperti halnya memperlakukan aset tetap berwujud dengan penyusutan (depresiasi). Amortisasi merupakan alokasi harga perolehan aset tidak berwujud secara sistematis selama umur manfaat aset tersebut. Umur manfaat inilah yang harus mencerminkan periode aset tidak berwujud memberikan manfaat ekonomis bagi entitas yang bersangkutan. Jumlah yang diamortisasi merupakan harga perolehan (harga pasar, menggunakan model revaluasi) dikurangi nilai sisanya. Amortisasi ini dimulai saat aset tersebut siap dipergunakan, dan amortisasi dihentikan saat aset tersebut dihentikan penggunaannya, atau direklasifikasi menjadi aset tidak lancar dimiliki untuk dijual (PSAK 58).

Pola konsumsi entitas terhadap aset tidak berwujud harus disesuaikan dengan metode amortisasi yang digunakan entitas. Jika pola konsumsi tidak dapat diketahui secara andal, maka digunakan metode garis lurus. Perlakuan amortisasi aset tidak berwujud dengan mencatat sebagai beban pada periode terjadinya, yang disajikan pada laporan laba-rugi, dan mengkreditkannya pada aset tidak berwujudkannya pada aset tidak berwujud yang terkait, atau akun akumulasi amortisasi. Masa manfaat aset tidak berwujud harus disestimasi kembali pada setiap akhir periode akuntansi. Perubahan estimasi umur manfaat diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi berdasarkan PSAK 25. Nilai tercatat dari aset tidak berwujud akan diamortisasi selama sisa umur manfaat dari estimasi masa manfaat yang baru. Selain itu, perhitungan amortisasi juga memerlukan estimasi nilai sisa (biasanya estimasi nilai sisa adalah nol), terkhusus adanya komitmen pihak ketiga untuk membeli aset tidak berwujud pada akhir masa manfaatnya, atau terdapat pasar aktif, dan nilainya mengacu pada pasar aktif tersebut. Nilai sisa yang dimaksudkan

tersebut harus ditelaah setiap akhir periode akuntansi, dan apabila terjadi revisi maka diperlakukan secara prospektif, yaitu mengubah nilai amortisasi pada periode-periode mendatang.

Contoh, PT Farmatika perusahaan farmasi memiliki hak paten obat stress. Paten tersebut dibeli dengan harga Rp 100.000.000, dan estimasi umur manfaat ekonomis selama 10 tahun. Akhir tahun kedua, manajemen perusahaan mengestimasi umur manfaat ekonomis tersebut adalah 12 tahun. Metode amortisasi yang digunakan perusahaan adalah metode garis lurus. Jurnal yang disajikan entitas adalah sebagai berikut:

Jurnal saat perolehan aset tetap paten:

Aset tidak berwujud - Paten	100,000,000	
Kas		100,000,000

Jurnal beban amortisasi aset tetap paten tahun 1 dan tahun 2:

Beban amortisasi	10,000,000	
Paten (akumulasi amortisasi)		10,000,000
$\text{Beban amortisasi} = \frac{100,000,000 - 0}{10 \text{ tahun}}$		
= 10,000,000		

Jurnal beban amortisasi setelah tahun kedua (perubahan):

Beban amortisasi	8,000,000	
Paten (akumulasi amortisasi)		8,000,000

Aset tetap – Paten	100,000,000
Akumulasi Amortisasi	20,000,000
Nilai tercatat akhir tahun kedua	80,000,000

$$\text{Beban amortisasi} = \frac{80,000,000 - 0}{10 \text{ tahun}}$$

$$= 8,000,000$$

Aset tidak berwujud yang memiliki masa manfaat tidak terbatas tidak perlu mengamortisasikan aset tersebut selama masa manfaatnya yang tidak terbatas tersebut. Entitas yang memiliki aset tersebut diharuskan untuk melakukan pengujian penurunan nilai secara berkala, pengujian tersebut dilakukan untuk mengetahui nilai wajar dari aset tidak berwujud itu lebih rendah dari nilai tercatatnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masa manfaat tidak terbatas, tidak berarti masa manfaatnya juga tidak terhingga. Masa manfaat ditentukan berdasarkan rencana pengeluaran masa depan yang dibutuhkan untuk merawat aset sesuai standar kinerja yang ditentukan. Dalam periode berjalannya entitas, ada bukti bahwa umur manfaat aset tidak berwujud terbatas, yang awal ditetapkan tidak terbatas, maka perubahan umur manfaat tersebut harus diperlakukan berdasarkan PSAK 25 (revisi 2009), yaitu kebijakan akuntansi, perubahan estimasi dan kesalahan.

Selain umur manfaat untuk kepentingan menghitung besaran amortisasi, estimasi nilai sisa juga sangat berpengaruh menentukan besaran amortisasi. Tidak seperti aset tetap berwujud yang lazim memiliki nilai sisa, karena aset yang dimaksudkan tersebut dapat dijual pada akhir periode pemakaiannya. Namun, aset tidak berwujud pada umumnya tidak mempunyai nilai sisa, sehingga PSAK

19 mengharuskan mengasumsikan tidak ada lagi nilai sisa untuk aset tidak berwujud, kecuali terdapat komitmen dari pihak ketiga untuk membeli aset tersebut pada akhir masa manfaatnya, terdapat pasar aktif untuk aset tidak berwujud tersebut, nilai sisa dapat diukur secara andal yang mengacu pada pasar aktif, dan kemungkinan besar pasar tersebut masih ada pada akhir masa manfaat aset tidak berwujud. Seperti halnya masa amortisasi, nilai sisa juga harus ditelaah setiap akhir periode akuntansi. Apabila terjadi revisi, maka harus diperlakukan secara prospektif, yaitu mengubah nilai amortisasi periode sekarang dan periode mendatang.

Pengukuran Setelah Perolehan

PSAK 19 menyatakan dua dasar pengukuran aset tidak berwujud, yaitu model biaya perolehan dan model revaluasi. Dengan demikian, kedua model tersebut juga disyaratkan (sama) dalam pengukuran aset tetap berdasarkan PSAK 16. Kondisinya, jika entitas memilih menggunakan model revaluasi, maka semua aset dalam kelas yang sama harus diperlakukan sama pula, kecuali tidak ada pasar aktif untuk yang dimaksudkan tersebut. Model biaya perolehan, setelah pengukuran awal aset tidak berwujud, maka selanjutnya akan dinilai berdasarkan biaya perolehannya dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Sedangkan, model revaluasi memperbolehkan dilakukannya revaluasi setelah akuisisi aset tidak berwujud. Nilai aset setelah pengukuran awal pada model revaluasi ini, dinilai berdasarkan nilai wajar dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Nilai wajar aset tidak berwujud mengacu pada pasar aktif. Yang dimaksud pasar aktif adalah pasar tempat aset diperdagangkan (homogen), pembeli dan penjual dapat ditemukan setiap saat, dan juga harganya tersedia setiap

saat untuk publik. Model revaluasi pun tidak mutlak harus diterapkan untuk sebagian aset tidak berwujud. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan untuk revaluasi aset tidak berwujud adalah jika awal pengakuan aset tidak berwujud tidak diakui pada awalnya (tidak dikapitalisasi) atau langsung dibebankan, maka tidak dibolehkan mengakui aset tersebut pada nilai wajarnya di masa datang. Selain itu, perhitungan nilai wajar dapat ditentukan dengan menggunakan konsep nilai wajar atas proyeksi arus kas (PSAK 16). Namun, hal tersebut tidak dapat diterapkan untuk aset tidak berwujud karena dianggap tidak dapat diandalkan. Untuk menentukan nilai wajar aset tidak berwujud hanya dapat ditentukan dengan berdasarkan pasar aktif aset tidak berwujud. Tidak semua jenis aset tidak berwujud memiliki pasar aktif. Lazimnya merek dagang dan paten tidak memiliki pasar aktif, sehingga model revaluasi ini tidak dapat diterapkan untuk keseluruhan aset tidak berwujud. Dengan demikian, model revaluasi sangat bergantung ketersediaan pasar aktif aset tidak berwujud.

Contoh, tanggal 1 Januari 2008, PT Andika membeli paten dengan harga perolehan Rp. 100.000.000. Estimasi umur manfaat 10 tahun, entitas tersebut menggunakan model revaluasi untuk pengukuran aset tidak berwujudnya. Tanggal 31 Desember 2010 nilai wajar paten tersebut Rp 90.000.000, dan estimasi umur manfaat tidak berubah. Perhitungan selisih revaluasi (*surplus*) sebagai berikut:

Harga perolehan	Rp	100.000.000
Akumulasi amortisasi	Rp	30.000.000
Nilai tercatat	Rp	70.000.000
Nilai wajar	Rp	90.000.000
Selisih revaluasi	Rp	20.000.000

Jurnal yang disajikan untuk mencatat revaluasi aset tidak berwujud paten adalah sebagai berikut:

Akumulasi amortisasi - Paten	30.000.000	
Aset tidak berwujud - Paten		30.000.000
Aset tidak berwujud - Paten	20.000.000	
Selisih revaluasi - Paten		20.000.000

Penurunan Nilai

Entitas perlu menilai indikasi-indikasi penurunan nilai aset tidak berwujud setiap akhir periode pelaporan. Ketika terjadi indikasi penurunan nilai, maka entitas melakukan perbandingan antara jumlah tercatat aset tidak berwujud dengan nilai terpulihkan berdasarkan PSAK 48. Penilaian dengan tidak ada indikasi penurunan nilai, maka entitas tidak perlu lagi menghitung nilai terpulihkan. Untuk aset tidak berwujud yang masa manfaatnya tidak terbatas, seperti *goodwill*, maka dilakukan pengujian penurunan nilai setiap akhir periode dengan membandingkan jumlah tercatatnya dengan jumlah terpulihkan.

Besaran jumlah terpulihkan merupakan jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual (*fair value less cost to sell*) merupakan jumlah yang dapat dihasilkan dari penjualan aset dalam transaksi antara pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi wajar (*arm's length transaction*), setelah dikurangi biaya pelepasan. Nilai pakai (*value in use*) aset merupakan nilai sekarang dari taksiran arus kas yang diharapkan diterima atas penggunaan aset dan penghentian penggunaan aset pada akhir umur

manfaatnya. Kerugian penurunan nilai diakui jika jumlah terpulihkan aset lebih rendah daripada nilai tercatatnya. Kerugian ini diakui dan disajikan pada laporan laba-rugi periode berjalan. Jika entitas memilih metode revaluasi dan terdapat saldo kredit *surplus* revaluasi, maka kerugian penurunan nilai mengurangi saldo kredit *surplus* revaluasi aset tidak berwujud sebelumnya.

Entitas perlu menelaah sisa umur manfaat, metode amortisasi, atau nilai sisa aset tidak berwujud jika ada. Setiap akhir periode pelaporan, entitas perlu menilai apakah terdapat indikasi terjadinya rugi penurunan nilai yang telah diakui pada periode sebelumnya, mungkin saja tidak ada lagi penurunan nilai, atau mungkin telah menurun nilainya. Jika ada indikasi penurunan nilai, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan atas aset tidak berwujud. Jika jumlah terpulihkan lebih tinggi dibandingkan nilai tercatatnya, maka rugi penurunan nilai yang telah diakui sebelumnya harus dibalik, yaitu dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Peningkatan tersebut (pembalikan rugi penurunan nilai) tidak boleh melebihi jumlah tercatat (neto), seandainya aset tidak berwujud tidak mengalami penurunan nilai pada periode sebelumnya. PSAK 48 tidak memperbolehkan pembalikan rugi penurunan nilai untuk *goodwill*. Pembalikan tersebut hanya dapat dilakukan jika terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tidak berwujud sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui.

Contoh, PT Andika memiliki aset tidak berwujud dalam bentuk paten. Tanggal 31 Desember 2010, nilai tercatat paten tersebut sebesar Rp 100.000.000. Entitas melakukan uji penurunan nilai, dan menemukan bahwa jumlah yang terpulihkan aset tidak berwujud paten tersebut mengalami penurunan yang signifikan menjadi Rp

90.000.000. kerugian penurunan nilai aset tidak berwujud (*impairment loss*) ditunjukkan sebagai berikut:

Harga tercatat	Rp	100.000.000
Jumlah terpulihkan	Rp	90.000.000
Penurunan nilai	Rp	10.000.000

Jurnal yang disajikan atas penurunan nilai tersebut sebagai berikut:

Rugi penurunan nilai - Paten	10.000.000	
Paten		10.000.000

Goodwill yang diperoleh dalam kombinasi bisnis merupakan aset yang tidak teridentifikasi secara individual, tidak menghasilkan arus kas independen, dan lazim berkontribusi pada arus kas beragam unit penghasil kas (UPK). *Goodwill* tersebut harus dialokasikan pada setiap UPK pihak pengakuisisi yang diharapkan memberikan manfaat dari kombinasi bisnis. Rugi penurunan nilai yang timbul dari UPK harus dialokasikan untuk mengurangi jumlah tercatat UPK dengan urutannya, yaitu mengurangi jumlah tercatat atas setiap *goodwill* yang dialokasikan ke UPK, dan aset lain UPK dibagi rata atas jumlah tercatat setiap aset di dalam UPK.

Contoh, awal tahun 2008, PT Andika mengakuisisi PT Andaka seharga Rp 1.500.000.000. Nilai wajar aset bersih PT Andaka sebesar Rp 800.000.000. Perhitungan *goodwill* sebagai berikut:

Harga akuisisi	Rp	1.500.000.000
Nilai wajar neto	Rp	800.000.000
<i>Goodwill</i>	Rp	700.000.000

Akhir 2008, nilai tercatat aset lain dan *goodwill* pada UPK 'X' masing-masing sebesar Rp 750.000.000 dan Rp 700.000.000. Entitas menemukan indikasi penurunan nilai dan menghitung jumlah terpulihkan UPK sebesar Rp 730.000.000. Dengan demikian, UPK mengakui kerugian penurunan nilai sebesar $(Rp\ 750.000.000 + Rp\ 700.000.000) - Rp\ 730.000.000 = Rp\ 720.000.000$. Alokasi kerugian penurunan nilai untuk urutan pertama adalah *goodwill*, sehingga nilai *goodwill* diturunkan sebesar Rp 700.000.000, dan sisanya sebesar Rp 20.000.000 dialokasikan ke aset lain secara rata-rata. Nilai tercatat aset lain dan *goodwill* setelah alokasi penurunan nilai masing-masing sebesar Rp 70.000.000 dan Rp 0.

Penghentian Pengakuan

Aset tidak berwujud harus dihentikan pengakuannya bila memenuhi kondisi berikut ini.

1. Dalam (proses) pelepasan
2. Ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Aset tidak berwujud yang memenuhi kondisi di atas, maka entitas perlu menghitung keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian aset tidak berwujud tersebut. Perbedaan antara nilai bersih atau nilai wajar imbalan atas pelepasan dan nilai tercatat aset menimbulkan kerugian atau keuntungan. Keuntungan dan kerugian tersebut diakui dalam laporan laba-rugi komprehensif saat aset tidak berwujud tersebut dihentikan pengakuannya. Imbalan yang diterima saat penghapusan aset tidak berwujud diakui pada awalnya berdasarkan nilai wajarnya. Jika pembayaran aset tidak berwujud ditangguhkan, maka imbalan yang diterima diakui sesuai dengan harga tunai. Dengan demikian,

perbedaan jumlah imbalan dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga.

Pertanyaan

Jawablah setiap pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas untuk membuktikan pemahaman teoretis pembahasan bab ini.

1. PSAK 19 (revisi 2010) mendefinisikan aset tidak berwujud sebagai aset non moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Uraikan beberapa karakteristik utama aset tidak berwujud berdasarkan definisi aset tersebut?
2. Masa manfaat aset tidak berwujud terbagi atas dua, yaitu aset tidak berwujud dengan masa manfaat terbatas dan aset tidak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas. Jelaskan perlakuan amortisasi untuk kedua jenis masa aset tidak berwujud tersebut?
3. Standar akuntansi mengatur pengukuran aset tidak berwujud saat pengakuan awal dan pengukuran setelah perolehan aset tidak berwujud. Jelaskan perbedaan pengukuran kedua *timing* pengakuan aset tidak berwujud tersebut?
4. Selain model biaya perolehan, model revaluasi dapat digunakan untuk pengukuran aset tidak berwujud setelah perolehan. Jelaskan penggunaan model revaluasi tersebut? Uraikan perlakuan akuntansi atas selisih revaluasi aset tidak berwujud?
5. Entitas berkewajiban menilai indikasi penurunan nilai aset tidak berwujud di setiap akhir periode pelaporan. Jelaskan perlakuan akuntansi penurunan nilai aset tidak berwujud, termasuk *goodwill*?

Latihan

1. Tanggal 1 Januari 2008, PT Dikarina mempunyai aset tidak berwujud hak cipta. Harga perolehan Rp. 250.000.000. Estimasi umur manfaat 10 tahun, entitas tersebut menggunakan model revaluasi untuk pengukuran aset tidak berwujudnya. Tanggal 31 Desember 2011 nilai wajar paten tersebut Rp 100.000.000, dan estimasi umur manfaat tidak berubah.

Instruksi:

- a. Sajikan jurnal untuk mencatat penurunan nilai aset akhir tahun 2011?
 - b. Sajikan jurnal untuk mencatat beban amortisasi untuk tahun 2012?
 - c. Scandainya pada akhir tahun 2013 ada nilai terpulihkan sebesar Rp 175.000.000. Sajikan jurnal untuk mencatat peningkatan nilai aset tidak berwujud tersebut?
2. Awal tahun 2009, PT Astaga membeli hak paten produk kesehatan dengan harga perolehan sebesar Rp 100.000.000, dan diestimasi mempunyai masa manfaat 10 tahun. Tahun 2013 entitas tersebut mengubah estimasi umur manfaat aset tidak berwujud yang dimaksudkan menjadi 12 tahun.

Instruksi:

- a. Sajikan jurnal untuk mencatat beban amortisasi periode-periode sebelum adanya perubahan estimasi masa manfaat aset tidak berwujud tersebut?
 - b. Sajikan jurnal untuk mencatat beban amortisasi aset tidak berwujud saat terjadinya perubahan estimasi masa manfaat aset tidak berwujud tersebut?
3. Awal tahun 2010, PT Renatahena mengakuisisi PT Anarenata seharga Rp 500.000.000. Nilai wajar aset

bersih PT Anarenata pada tanggal akuisisi sebesar Rp 350.000.000. Pada akhir tersebut, nilai tercatat *goodwill* sebesar Rp 175.000.000 dan UPK tertentu sebesar Rp 150.000.000. Entitas menemukan adanya indikasi penurunan nilai dan jumlah terpulihkan dari UPK tersebut sebesar Rp 160.000.000.

Instruksi:

- a. Hitunglah seberapa besar UPK mengakui kerugian penurunan nilai aset tidak berwujud tersebut?
- b. Sajikan alokasi penurunan nilai tersebut pada aset-aset lain yang dimaksudkan?
- c. Berapakah nilai tercatat aset lainnya dan *goodwill* setelah alokasi penurunan nilai aset tidak berwujud tersebut?

Pengertian Liabilitas Lancar

Kewajiban (*liability*) atau liabilitas merupakan kewajiban entitas saat ini (sekarang) yang timbul dari peristiwa masa lalu yang akan diselesaikan melalui arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Definisi liabilitas tersebut mengandung tiga unsur, yaitu adanya kewajiban (*obligation*) saat ini, timbul dari peristiwa masa lalu, dan akan mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi. Liabilitas diakui dan disajikan pada laporan posisi keuangan jika besar kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban saat ini, dan jumlah penyelesaiannya dapat diukur secara andal.

Liabilitas suatu entitas dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu liabilitas lancar (*current liabilities*) dan liabilitas jangka panjang (*long-term liabilities*) atau liabilitas tidak lancar (*non-current liabilities*). Liabilitas lancar adalah kewajiban yang jatuh temponya dibatasi dalam waktu satu tahun, atau jatuh tempo dalam siklus operasi normal perusahaan. Kewajiban yang jatuh tempohnya lebih dari periode waktu satu tahun tersebut diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang. Liabilitas lancar dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu liabilitas yang jumlahnya diketahui dan liabilitas yang jumlahnya tidak ketahu.

Pada dasarnya, liabilitas disajikan dalam laporan posisi keuangan (neraca) sebesar nilai tunai dari kewajiban-kewajiban entitas, tetapi liabilitas lancar disajikan sebesar nilai nominalnya. Penyimpangan penyajian nilai nominal

tersebut karena anggapan selisih nilai nominal dengan nilai tunai relatif kecil untuk jangka waktu pembayaran utang-utang yang jatuh tempo kurang dari satu tahun. Liabilitas lancar pada pembahasan berikut ini meliputi tiga bagian, yaitu liabilitas yang jumlahnya pasti, liabilitas yang jumlahnya harus diestimasi, dan liabilitas kontinjensi.

Liabilitas yang Jumlahnya Pasti

Entitas mengategorikan liabilitas lancar dengan jumlah yang sudah pasti dengan dua syarat, yaitu kewajiban membayar sudah pasti (sudah terjadi transaksi yang menimbulkan kewajiban membayar) dan jumlah yang harus dibayar juga sudah ada kepastian nominalnya. Liabilitas yang memenuhi kedua syarat tersebut terdiri dari utang-utang sebagai berikut:

1. Utang usaha
2. Utang wesel (wesel bayar jangka pendek)
3. Bagian lancar dari Utang jangka panjang
4. Kewajiban akrual
5. Kewajiban penggajian
6. Pendapatan diterima di muka

Utang usaha (*accounts payable*) atau lazim disebut utang dagang, timbul dari pembelian barang-barang atau jasa-jasa, dan pinjaman jangka pendek. Dengan kata lain, utang usaha merupakan jumlah yang terutang atas produk atau jasa yang dibeli secara kredit. Transaksi yang menimbulkan utang usaha bertujuan memperoleh pendapatan usaha perusahaan. Pencatatan utang usaha biasanya berdasarkan jumlah nominal yang tertera pada kwilansi, nota, atau faktur, dengan mempertimbangkan termin pembelian atau syarat jual-beli (pengiriman). Contoh, transaksi pembelian produk tertentu dengan harga

Rp 15.000.000, dengan persyaratan 2/15, n/30. Adapun jurnal yang disajikan sebagai berikut:

Jurnal yang disajikan saat pembelian:

Pembelian	15,000,000	
Utang usaha		15,000,000

Jurnal yang disajikan saat pelunasan (memanfaatkan potongan 2%):

Utang usaha	15,000,000	
Kas		12,000,000
Potongan tunai		3,000,000

Jurnal yang disajikan saat pelunasan (tidak memanfaatkan potongan 2%):

Utang usaha	15,000,000	
Kas		15,000,000

Seperti utang usaha, wesel bayar jangka pendek (*short-term notes payable*) atau utang wesel juga biasanya timbul dari pembelian barang-barang atau jasa-jasa, dan dari pinjaman jangka pendek. Wesel bayar tersebut merupakan utang yang disertai dengan janji tertulis untuk membayar sejumlah tertentu (termasuk bunga) kepada pihak kreditor di masa datang, dengan batasan jatuh temponya tidak lebih dari satu tahun. Contoh, PT Dahlia mengeluarkan/-menerbitkan wesel bayar senilai Rp 15.000.000 untuk meminjam kas atau membeli persediaan. Wesel tersebut jatuh tempo dalam satu tahun dengan suku bunga sebesar 10%. Adapun jurnal yang disajikan sebagai berikut:

Pembelian dengan menerbitkan wesel bayar:

1 Okt 2012	Pembelian	15,000,000	
	Wesel bayar		15,000,000

Akhir tahun sebelum jatuh tempo wesel bayar:

31 Des 2012	Beban bunga	375,000	
	Utang bunga		375,000

$$\begin{aligned}\text{Beban bunga} &= 15,000,000 \times 10\% \times 3/12 \\ &= 375,000\end{aligned}$$

Pelunasan wesel bayar dan bunga saat jatuh tempo:

1 Okt 2013	Wesel bayar	15,000,000	
	Utang bunga	375,000	
	Beban bunga	1,125,000	
	Kas		15,500,000

$$\begin{aligned}\text{Beban bunga} &= 15,000,000 \times 10\% \times 9/12 \\ &= 1,125,000\end{aligned}$$

Utang obligasi dan utang-utang jangka panjang lainnya yang akan dilunasi dalam jangka waktu kurang dari satu tahun disajikan sebagai liabilitas lancar. Bagian lancar dari utang jangka panjang (*current portion of long-term debt*) adalah jumlah pokok yang terutang dalam satu tahun. Bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam tahun bersangkutan disajikan atau dilaporkan sebagai liabilitas lancar, dan yang belum jatuh tempo dalam tahun

tersebut disajikan sebagai utang jangka panjang. Entitas melakukan reklasifikasi setiap akhir tahun untuk menentukan utang jangka panjang yang menjadi liabilitas lancar, jumlah utang jangka panjangnya harus dibayar pada tahun-tahun berikutnya.

Kewajiban akrual (*accrued liability*) atau biasa juga disebut beban akrual, merupakan beban perusahaan yang telah terjadi tetapi belum dibayarkan. Beban akrual (*accrued expense*) menimbulkan kewajiban sehingga memerlukan arus keluar sumber daya ekonomi. Contoh beban akrual, diantaranya utang gaji dan upah (*salaries and wage payable*), utang bunga (*interest payable*), utang pajak penghasilan (*income taxes payable*), dan utang dividen (*dividend payable*). Utang gaji dan upah merupakan kewajiban beban gaji yang belum dibayarkan pada akhir periode. Utang biaya atau bunga merupakan utang bunga perusahaan atas wesel bayar. Utang pajak penghasilan merupakan jumlah pajak penghasilan yang masih terutang pada akhir tahun. Utang dividen merupakan kewajiban perusahaan kepada para pemegang sahamnya untuk membayarnya di masa datang.

Kewajiban penggajian (*payroll*) juga lazim disebut kompensasi karyawan (*employee compensation*). Jenis kewajiban ini merupakan beban substansial bagi perusahaan. Kompensasi karyawan memiliki berbagai bentuk yang berbeda, diantaranya gaji (*salary*) yang merupakan pembayaran karyawan yang dinyatakan pada tingkat bulanan, upah (*wage*) merupakan pembayaran karyawan yang dinyatakan pada tingkat per jam, komisi (*commission*) merupakan persentase penjualan yang biasanya dilakukan karyawan bagian penjualan, dan bonus merupakan jumlah pembayaran yang melebihi kompensasi reguler. Beban penggajian merepresentasikan pembayaran kotor yang dilakukan entitas, yaitu sebelum dikurangi pajak dan potongan lainnya. Pajak dan potongan tersebut biasa

juga disebut dana yang dikumpulkan untuk pihak yang ketiga. Penyajian jurnal untuk bentuk-bentuk kompensitersebut dapat mengikuti pola umum berikut ini (angka yang diasumsikan).

Beban gaji	10,000,000	
Utang pajak penghasilan karyawan		1,500,000
Kas		8,500,000

Gaji dan upah	=	10,000,000
Potongan/pajak 15%	=	1,500,000
Kas dibayarkan	=	8,500,000

Utang pajak lainnya, seperti utang pajak penjualan, merupakan kewajiban yang timbul akibat perusahaan belum membayar pajak yang dikenakan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Contoh, entitas tertentu melakukan penjualan sebesar Rp 10.000.000, dan entitas tersebut memungut tambahan pajak sebesar 10%. Jurnal yang disajikan sebagai berikut:

Jurnal yang disajikan pada saat penjualan:

Kas	11,000,000	
Penjualan		10,000,000
Utang pajak penjualan		1,000,000

Kas yang diterima	= Rp 10.000.000 × 1,10
	= Rp 11.000.000
Utang pajak penjualan	= Rp 10.000.000 × 10%
	= Rp 1.000.000

Apabila entitas menyetorkan pajak penjualan tersebut ke kas negara, maka jurnal yang disajikan sebagai berikut:

Utang pajak penjualan	1,000,000	
Kas		1,000,000

Pendapatan diterima di muka (*unearned revenues*) biasa juga disebut pendapatan yang ditangguhkan (*deferred revenues*), merupakan jumlah yang diterima dari pelanggan dengan penyerahan barang-barang atau jasa-jasa dilakukan dalam waktu tertentu di masa datang. Entitas telah menerima kas dari pelanggan sebelum pendapatan dihasilkan. Kondisi tersebut mengikat perusahaan untuk menyediakan barang-barang atau jasa-jasa kepada pelanggan. Contohnya, penjualan tiket dengan penagihan kas terlebih dahulu. Entitas tertentu menagih Rp 4.000.000 untuk tiket penerbangan pulang-pergi dari Makassar ke Malaysia. Harga tiket penerbangan Makassar ke Jakarta sebesar Rp 1.500.000, dan penerbangan dari Jakarta ke Makassar sebesar Rp 1.000.000.

Jurnal yang disajikan saat penagihan uang muka:

Kas	2,500,000	
Pendapatan tiket diterima di muka		2,500,000

Jurnal yang disajikan saat penumpang terbang dari Makassar ke Jakarta:

Pendapatan tiket diterima di muka	1,500,000	
Pendapatan tiket		1,500,000

Jurnal yang disajikan saat penumpang terbang pulang dari Jakarta ke Makassar:

Pendapatan tiket diterima di muka	1,000,000
Pendapatan tiket	1,000,000

Liabilitas Lancar yang Harus Diestimasi

Aset dan liabilitas yang ada pada tanggal pelaporan keuangan harus diakui dan dilaporkan jumlah wajarnya, sedangkan yang tidak atau belum ada pada tanggal pelaporan keuangan seharusnya tidak disajikan dalam laporan keuangan. Namun, keadaan demikian sering kali memerlukan pertimbangan bijak untuk menentukan keberadaan dan besaran jumlah aset dan liabilitas untuk kepentingan pengungkapan akun-akun laporan keuangan tersebut. PSAK 57 (revisi 2009) menyatakan unsur liabilitas dan aset yang sering kali menimbulkan keraguan atas keberadaannya adalah provisi (*provision*), liabilitas kontingensi (*contingent liabilities*), dan aset kontingensi (*contingent assets*). Pembahasan kewajiban lancar berikut ini meliputi provisi dan liabilitas kontingensi.

PSAK 57 mendefinisikan provisi sebagai liabilitas yang waktu dan jumlahnya belum pasti. Keberadaan provisi sebagai kewajiban memiliki unsur kepastian (sudah pasti ada), tetapi waktu atau kapan harus dilunasi dan jumlahnya masih belum dapat dipastikan pada saat penyusunan laporan keuangan. Pengakuan provisi dapat dilakukan bilamana memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Entitas mempunyai kewajiban saat ini yang merupakan peristiwa masa lalu.
2. Besar kemungkinan penyelesaian liabilitas mengakibatkan arus keluar sumber daya.

3. Estimasi yang andal tentang jumlah liabilitas yang bersangkutan.

Peristiwa mengikat dalam pengakuan liabilitas adalah peristiwa masa lalu yang menimbulkan kewajiban saat ini, dan kewajiban saat ini dapat timbul dari kewajiban hukum ataupun kewajiban konstruktif. Kewajiban hukum timbul dari kontrak atau peraturan perundang-undangan, atau hukum yang berlaku. Kewajiban konstruktif timbul dari tindakan entitas berdasarkan praktik masa lalu dan akibat entitas akan melaksanakan tanggung jawabnya. Beberapa contoh kewajiban saat ini yang timbul dari kewajiban-kewajiban tertentu sebagai berikut:

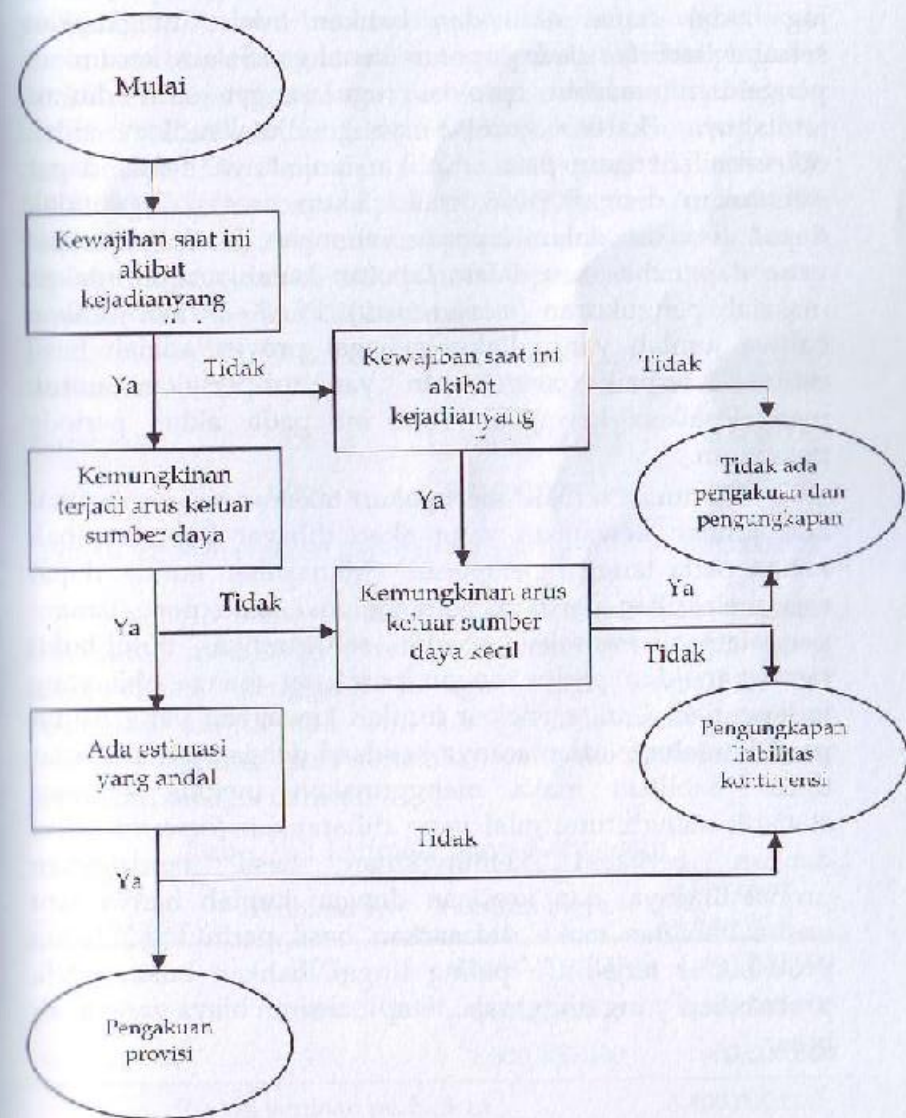
1. Kewajiban hukum yang timbul dari kontrak adalah penjualan barang elektronik, dan entitas penjualnya memberikan garansi apabila terjadi kerusakan barang dalam jangka waktu tertentu sejak tanggal penjualannya.
2. Kewajiban hukum yang timbul dari peraturan perundang-undangan adalah undang-undang pencemaran lingkungan, entitas berkeharusan mengembalikan lingkungan ke kondisi semula.
3. Kewajiban konstruktif, komitmen entitas kepada pihak ketiga yang timbul dari tindakan entitas terhadap praktik masa lalu, tindakan akibat publikasi kebijakan, dan tindakan atas pernyataan entitas kepada pihak luar. Seperti, kebijakan internal terkait lingkungan, tanpa regulasi entitas melakukan pembersihan lingkungan akibat pencemaran proses produksinya.

Provisi timbul dari peristiwa masa lalu, dan mungkin timbul dari peristiwa yang akan datang yang diantisipasi, atau diramalkan akan terjadi. Peristiwa masa lalu tersebut terbatas pada peristiwa yang mengikat, yang berdampak

timbulnya kewajiban hukum, maupun tindakan entitas yang menimbulkan kewajiban yang harus dipenuhi, atau kewajiban konstruktif. Arus sumber daya yang keluar diasumsikan sebagai suatu kemungkinan besar (*probable*). Kemungkinan terjadinya peristiwa arus keluar sumber daya masa datang lebih besar daripada kemungkinan tidak terjadinya peristiwa tersebut. Dengan demikian, provisi mengandung ketidakpastian kewajiban masa datang yang lebih tinggi, sehingga entitas memerlukan estimasi yang andal dalam menentukan besaran liabilitas lancar. Jika entitas tidak melakukan estimasi yang andal, maka provisi tidak perlu diakui, tetapi diungkapkan sebagai liabilitas kontingensi.

Proses pengakuan provisi dan pengungkapan liabilitas kontingensi ditunjukkan pada gambar berikut ini.

Gambar 10.1 Proses pengakuan provisi dan pengungkapan liabilitas kontingensi



Ketika provisi tidak dapat diakui, maka provisi tersebut berpeluang diungkapkan sebagai liabilitas kontinjensi. Namun, tidak tertutup kemungkinan provisi juga tidak dapat diakui dan bahkan tidak diungkapkan sebagai liabilitas pada laporan keuangan. Selain kerumitan pengakuan tersebut, provisi juga sangat sulit diukur jumlahnya, karena jumlah yang dimaksudkan tidak diketahui dengan pasti. Ketika jumlahnya tidak dapat ditentukan dengan pasti, maka akun provisi juga tidak dapat disajikan dalam laporan keuangan. Jumlah liabilitas yang dapat disajikan dalam laporan keuangan merupakan masalah pengukuran (*measurement*). PSAK 57 menyatakan bahwa jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban saat ini pada akhir periode pelaporan.

Estimasi terbaik merupakan taksiran secara rasional atas jumlah kewajiban yang akan dibayar kepada pihak ketiga pada tanggal pelaporan. Manajemen entitas dapat saja melakukan pertimbangan rasional, atau pengalaman-pengalaman transaksi serupa sebelumnya, bukti-bukti tambahan, dan pertimbangan pendapat tenaga ahli yang independen. Cara menaksir jumlah kewajiban yang belum pasti jumlahnya, diantaranya keadaan dengan jumlah besar unsur liabilitas maka menggunakan metode estimasi statistik menghitung nilai yang diharapkan (*expected value*) dengan berbagai kemungkinan hasil berdasarkan probabilitasnya, dan keadaan dengan jumlah hanya satu unsur liabilitas maka didasarkan hasil perhitungan yang probabilitas terjadinya paling tinggi, bahkan bukan pada probabilitas yang tinggi saja, tetapi taksiran biaya yang lebih besar.

Contoh, Produsen elektronik Televisi Plasma memberikan jaminan reparasi gratis untuk produk terjual dalam waktu satu tahun. Berdasarkan penelitian dan pengalaman, bahwa besarnya persentase beban reparasi di suatu kota tergantung keadaan tegangan listrik dan perilaku konsumen menggunakan peralatan elektronik. Metode estimasi statistik menunjukkan Makassar 10%, Surabaya 5%, dan Ambon 15%. Penjualan selama 2012 untuk Makassar Rp 5.000.000.000, Surabaya Rp 1.000.000.000, dan Ambon Rp 500.000.000. Dengan demikian, jaminan reparasi yang harus diperhitungkan dan disajikan pada laporan keuangan yang berakhir 31 Desember 2012 adalah:

Makassar	:	10%	x	5,000,000,000	=	500,000,000
Surabaya	:	5%	x	1,000,000,000	=	50,000,000
Ambon	:	15%	x	500,000,000	=	75,000,000
Provisi jaminan reparasi (laporan keuangan)						625,000,000

Contoh lainnya dengan satu unsur saja, entitas kontraktor membangun rel pelintasan kereta api, yang berkewajiban mengganti kerugian atau perbaikan rel pelintasan kereta api. Tim tenaga ahli menyimpulkan beberapa kemungkinan kerusakan yang memerlukan biaya perbaikan sebagai berikut:

Tabel 10.1 Estimasi Biaya Kerusakan

Jenis Kerusakan	Probabilitas	Taksiran Biaya	Estimasi Rasional
Berat	10%	10,000,000,000	1,000,000,000
Sedang	30%	6,000,000,000	1,800,000,000
Ringan	60%	1,000,000,000	600,000,000
Provisi jaminan perbaikan			3,400,000,000

Probabilitas tertinggi sebesar 60% adalah kerusakan ringan dengan taksiran biaya perbaikan sebesar Rp 1.000.000.000. Namun, estimasi tersebut bukanlah yang terbaik, karena terdapat probabilitas lain lebih kecil yang bilamana terjadi akan menimbulkan taksiran biaya yang besar. Dengan demikian, label di atas menunjukkan estimasi yang paling rasional adalah sebesar Rp 3.400.000.000.

Selain itu, waktu penyelesaian liabilitas juga memerlukan taksiran yang cermat. Liabilitas dengan waktu penyelesaian yang lebih lama akan menimbulkan dampak nilai waktu yang material. Kondisi demikian, jumlah provisi adalah nilai saat ini dari estimasi pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Contoh, suatu entitas sedang menghadapi tuntutan hukum, dan besar kemungkinan entitas tersebut akan kalah dalam kasus tersebut, dan entitas tersebut harus membayar biaya ganti rugi sebesar Rp 100.000.000, dalam waktu 3 tahun yang akan datang. Tingkat diskonto yang digunakan entitas adalah 10%. Jumlah provisi yang harus diakui entitas tersebut adalah sebesar nilai sekarang Rp 100.000.000 dengan diskonto 10%, yaitu sebesar Rp 75.131.480. Jumlah tersebut disajikan sebagai provisi pada laporan keuangan. Adapun perhitungan nilai saat ini sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Nilai Sekarang} &= \frac{100.000.000}{(1+10\%)^3} \\ &= \frac{100.000.000}{1.331} \\ &= 75.131.480 \end{aligned}$$

Peristiwa masa datang dapat memengaruhi jumlah yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban, yang harus tercermin dalam suatu provisi. Hal ini memerlukan bukti objektif, bahwa peristiwa tersebut akan terjadi. Contohnya, entitas bertanggung jawab atas biaya pembersihan lingkungan akibat pencemaran yang dilakukan pabrik produksinya. Dengan demikian, entitas perlu mempertimbangkan bukti yang ada mengenai biaya pembersihan lingkungan dengan menggunakan teknologi yang akan tersedia saat pembersihan di masa datang. Jumlah biaya pembersihan tersebut harus diestimasi dengan andal. Selain itu, entitas perlu mempertimbangkan dampak peraturan perundang-undangan yang kemungkinan akan diberlakukan (bukti objektif akan diberlakukan). Contohnya, Undang-undang No. 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, Pasal 74, yang mewajibkan perseroan menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya dan lingkungan. Entitas tersebut perlu menganggarkan dan memperhitungkan biaya perseroan untuk pelaksanaan tanggung sosial tersebut. Entitas perlu mengantisipasi timbulnya provisi atau liabilitas kontingensi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.

Setiap tanggal pelaporan keuangan, entitas harus menelaah saldo provisi yang mencerminkan estimasi terbaik paling kini. Telaahan yang menyatakan bahwa arus kas keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi harus dibatalkan. Pendiskontoan provisi yang dilaporkan dengan nilai kini, maka berjalannya waktu nilai kini akan makin meningkat. Dengan demikian jumlah provisi selalu disesuaikan secara berkala. Contoh, entitas harus membayar ganti rugi sebesar Rp 100.000.000, dalam waktu 2 tahun yang akan datang. Tingkat diskonto yang digunakan entitas

adalah 10%. Jumlah provisi yang harus diakui entitas tersebut adalah sebesar nilai sekarang Rp 100.000.000 dengan diskonto 10%, yaitu sebesar Rp 82.644.628. Akhir tahun pertama (1) nilai provisi tersebut akan meningkat sebesar Rp 90.909.091. Adapun hitungannya untuk akhir pertama adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Nilai Sekarang} &= \frac{100.000.000}{(1+10\%)^1} \\ &= \frac{100.000.000}{1,1} \\ &= 90.909.091\end{aligned}$$

Peningkatan sebesar Rp 8.264.463 (Rp 90.909.091 - Rp 82.644.628), diakui sebagai beban bunga.

Entitas yang melakukan restrukturisasi akan berdampak timbulnya kewajiban tertentu. Kewajiban tersebut belum pasti waktu pembayarannya, dan atau jumlahnya juga belum pasti. Provisi dibukukan dan disajikan dalam laporan keuangan ketika sudah terdapat kewajiban konstruktif. PSAK 57 menyatakan beberapa contoh restrukturisasi, antara lain, penjualan atau penghentian lini usaha, penutupan lokasi usaha atau relokasi kegiatan usaha, perubahan struktur manajemen, dan reorganisasi yang berdampak signifikan atas operasi perusahaan termasuk penggabungan dan peleburan badan usaha. Kewajiban konstruktif melakukan restrukturisasi timbul jika perusahaan memiliki rencana formal yang terperinci melaksanakan restrukturisasi, dan perusahaan menimbulkan harapan yang sah dan kuat kepada pihak-pihak yang terkena dampak restrukturisasi. Jumlah yang diakui sebagai provisi dari restrukturisasi hanya meliputi

pengeluaran-pengeluaran langsung yang timbul akibat restrukturisasi dengan persyaratan, yaitu benar-benar harus dikeluarkan dalam rangka restrukturisasi dan tidak terkait dengan aktivitas yang masih berlangsung. Pengeluaran-pengeluaran (beban) ditaksir akan timbul di masa datang setelah restrukturisasi bukan merupakan provisi, misalnya personalia yang dipekerjakan kembali, beban pemasaran, pembentukan jaringan distribusi, dan sebagainya.

Liabilitas Kontingensi

Semua provisi pada dasarnya bersifat kontingensi, karena jumlah dan waktu liabilitasnya tidak pasti. Namun, istilah 'kontingensi' hanya dilekatkan pada liabilitas dan aset yang tidak diakui karena keberadaannya baru dapat dipastikan terjadi atau tidak terjadi satu peristiwa atau lebih yang tidak pasti pada masa datang dan tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. Liabilitas kontingensi hanya digunakan untuk liabilitas yang tidak mengakui kriteria pengakuan provisi.

Liabilitas kontingensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali perusahaan. Selain itu, definisi liabilitas kontingensi adalah kewajiban saat ini yang timbul akibat peristiwa masa lalu, tetapi tidak diakui karena tidak terdapat kemungkinan besar entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajiban, atau jumlah kewajiban tidak dapat diukur secara andal. Adapun perbandingan provisi dengan liabilitas kontingensi ditunjukkan berikut ini.

Tabel 10.2 Pembandingan Provisi dengan
Liabilitas Kontingensi

Kondisi	Provisi	Liabilitas Kontinjensi
Kewajiban sekarang	Ya	Ya/ kewajiban potensial
Timbul peristiwa masa lalu	Ya	Ya
Mengakibatkan arus kas keluar sumber daya manfaat ekonomi	Ya/kemungkinan besar	Kemungkinan tidak besar/ juga tidak kecil
Jumlah diketahui dengan pasti	Tidak/dapat diukur dengan andal	Tidak/tidak dapat diestimasi dengan andal
Waktu pelunasan	Tidak	Tidak
Diakui dalam laporan posisi keuangan	Ya	Tidak
Diungkapkan dalam catatan laporan keuangan	Ya	Ya

Liabilitas kontingensi bukan merupakan kewajiban aktual, hanya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Kewajiban ini timbul apabila terdapat kewajiban yang mungkin akan dikonfirmasi peristiwa masa datang yang berada di luar kendali entitas, dapat menjadi kewajiban saat ini tetapi mungkin tidak akan memerlukan arus keluar sumber daya, dan estimasi jumlah kewajiban saat ini yang andal tidak dapat dilakukan. Contohnya, kewajiban masa datang karena tuntutan hukum, sengketa hukum, perselisihan pajak, dan pelanggaran undang-undang perlindungan lingkungan.

Pertanyaan

Jawablah setiap pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas untuk membuktikan pemahaman teoretis pembahasan bab ini.

1. Liabilitas adalah kewajiban entitas saat ini yang timbul dari peristiwa masa lalu yang akan diselesaikan melalui arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Uraikan poin-poin penting dari definisi liabilitas tersebut?
2. Liabilitas dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu liabilitas lancar dan liabilitas jangka panjang? Jelaskan perbedaan pengukuran kedua jenis liabilitas tersebut?
3. Liabilitas kategori jumlahnya yang sudah pasti mengandung dua syarat, yaitu kewajiban membayar sudah pasti dan jumlahnya juga sudah pasti. Jelaskan berbagai liabilitas yang termasuk kategori tersebut?
4. Entitas berkewajiban menyajikan liabilitasnya pada laporan posisi keuangan, namun mungkin saja entitas tidak mengetahui waktu pelunasan dan jumlah pasti liabilitas tersebut. Jelaskan persyaratan pengakuan liabilitas dengan yang dimaksudkan tersebut? Kemukakan contoh-contoh liabilitas kategori liabilitas provisi tersebut?
5. Liabilitas kontingensi merupakan kewajiban masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu tidak diakui karena kemungkinan pembayarannya tidak besar. Jelaskan perlakuan akuntansi liabilitas kontingensi? Kemukakan contoh-contoh liabilitas kontingensi tersebut?

Latihan

1. PT Media Trans melakukan transaksi-transaksi kepada pelanggannya pada tahun 2011 sebagai berikut:

1 Jun : Menjual kepada pelanggan, dengan menagih kas sebesar Rp 89.000.000, ditambah pajak penjualan sebesar 10%.

1 Agt : Membayar gaji tahunan (asumsi tahunan) sebesar Rp 60.000.000, beban pajak atas gaji tersebut sebesar 5%.

10 Okt : Entitas menyerahkan pajak penjualan ke kas negara.

31 Des : Entitas membuat penyesuaian yang diperlukan pada akhir tahun.

Instruksi:

a. Sajikan jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi-transaksi tersebut?

b. Sajikan akun-akun yang terkait (poin a) pada laporan keuangan entitas?

2. PT Sentosa Elektronik memproduksi Kamera Digital, dan berhasil menjual produknya sebesar Rp 150.000.000 dengan garansi produk. Entitas mengasumsikan pada tahun-tahun sebelumnya produk yang rusak berkisar 3% dan 5%. Entitas mengestimasi bahwa 4% dari penjualan tersebut akan memerlukan reparasi atau penggantian.

Instruksi:

a. Sajikan jurnal pengakuan provisi dan jurnal pada saat entitas mengganti produk garansi yang rusak?

b. Tunjukkan penyajian provisi tersebut pada laporan keuangan entitas?

3. Tahun 2012, PT Lintas Benua memperoleh pendapatan dari penjualan produknya sebesar Rp 255.000.000. Entitas ini tergugat dalam proses peradilan yang terkait produk tersebut. Entitas melakukan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangannya bahwa kebijakan perusahaan adalah mengakui jumlah yang terkait dengan permasalahan hukum ketika suatu kewajiban telah terjadi dan jumlahnya dapat diestimasi dengan andal.

Instruksi:

a. Misalkan kuasa hukum PT Lintas Benua yakin vonis hukum mungkin akan dijatuhkan kepada entitas. Bagaimana entitas tersebut menyajikan situasi tersebut dalam laporan keuangan?

b. Sebaliknya, misalkan kuasa hukum PT Lintas Benua yakin vonis sebesar Rp 65.000.000 mungkin akan diberikan kepada entitas. Jelaskan perlakuan akuntansinya? Sajikan jurnal yang diperlukan untuk mencatat penyelesaian sengketa hukum tersebut?

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Wahyuddin. 2011, *Persistensi Laba dan Arus Kas Mendatang*. Alauddin University Press, Makassar.
- Horrison, W.T., C.T. Horngren, C.W. Thomas dan T. Suwardy. 2011, *Akuntansi Keuangan International Financial Reporting Standards-IFRS*. Erlangga, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009, *Standar Akuntansi Keuangan per 1 Juli 2009*. Salemba Empat, Jakarta.
- Juan, N.E. dan E.T. Wahyuni. 2012, *Panduan Praktis Standar Akuntansi Keuangan Berbasis IFRS*, Edisi 2. Salemba Empat, Jakarta.
- Kartikahadi, H., R.U.sinaga, M. Syamsul, dan S.V.Siregar. 2012, *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS*. Salemba Empat, Jakarta.
- Kieso, D.E., J.J. Weygandt, and T.D. Warfield. 2011, *Intermediate Accounting, IFRS Edition*. John Willey & Sons Inc., United States of America.
- Martani, D., S.Veronica, R.Wardhani, A. Farahmita, dan E. Tanujaya. 2012, *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Salemba Empat, Jakarta.
- Purba, Marisi P. 2010, *International Financial Reporting Standards Konvergensi & Kendala Aplikasinya di Indonesia*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Rudianto. 2012, *Pengantar Akuntansi Konsep & Teknik Penyusunan Laporan Keuangan Adaptasi IFRS*. Erlangga, Jakarta.
- Suwardjono.2010, *Teori Akuntansi Perekrjasama Pelaporan Keuangan*, Edisi Ketiga. BPFE, Yogyakarta.



M. Wahyuddin Abdullah, lahir di Pangkajene (Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan), 25 Mei 1973. Pendidikan S.D. sampai SMA ditempuh di kota Pangkajene dan Kepulauan Sulawesi Selatan dan lulus SMA tahun 1991, lulus studi S1 di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta tahun 1996, Studi S2 di Program Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang tahun 2003, Program Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya (UNIBRAW) Malang tahun 2004, dan Program Doktor Ilmu Akuntansi di Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya (UNIBRAW) Malang tahun 2009. Menyandang penghargaan lulusan Terbaik dan Cumlaude pada Pascasarjana UNDIP Semarang tahun 2003, lulusan Cumlaude pada Fakultas Ekonomi Pendidikan Profesi Akuntansi UNIBRAW Malang tahun 2004, dan lulusan Cumlaude Pascasarjana Fakultas Ekonomi UNIBRAW Malang tahun 2009. Tugas pokok sebagai Tenaga Pengajar pada Jurusan Akuntansi UIN Alauddin Makassar. Pengajar tidak tetap pada beberapa Perguruan Tinggi Swasta di Makassar. Aktif publikasi karya ilmiah bidang akuntansi pada media jurnal nasional dan jurnal akreditasi nasional, dan aktif menulis artikel bertajuk akuntansi dan keuangan pada media surat kabar nasional. Buku yang sudah ditulis diantaranya: 1) Akuntansi Pengantar 1; 2) Persistensi Laba dan Arus Kas Mendatang; 3) Sensitivitas Etika Praktik Manajemen Laba.

Makassar, Oktober 2013
Penulis,

M. Wahyuddin Abdullah



ALAJDDIN UNIVERSITY PRESS

